

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 91);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 471);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);

24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Bina Program adalah Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2014.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2014 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2014 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Bagian Bina Program paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti, RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

Sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kota Surabaya Tahun 2014 mengacu pada RKP Tahun 2014, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan RPJMD

Kota Surabaya Tahun 2010-2015. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Surabaya yang Lebih Baik. Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Surabaya memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kota Surabaya masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman liar, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);

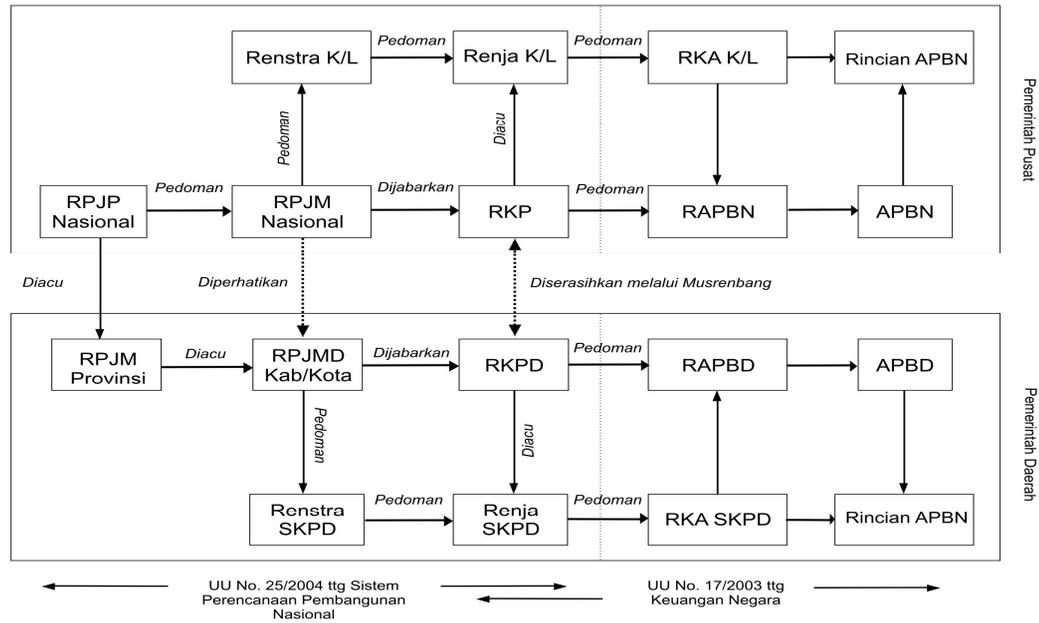
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka keberadaan RKPD Kota Surabaya Tahun 2014 mengacu kepada RKP Tahun 2014, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun 2014.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya Tahun 2014 dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

VI. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2014 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
5. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 33.048 Ha, terletak diantara 7°9' - 7°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah barat.

Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77%) dan sebelah selatan (6,52%) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25 - 50 meter diatas permukaan laut dan pada kemiringan 5 - 15%.

Secara administrasi pemerintahan, Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan yang terbagi atas 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

Sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya terbagi menjadi sejumlah area/kawasan strategis antara lain:

1. perumahan vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium (mewah);
2. perumahan real estate yang tersebar di kawasan barat, timur dan selatan kota;
3. perumahan kampung yang terkonsentrasi di area pusat kota;
4. area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang terkonsentrasi di kawasan pusat kota dan sebagian di area perumahan yang berkembang di kawasan barat dan timur kota;
5. area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
6. wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk perumahan pesisir (kampung nelayan), tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri kapal, pelabuhan, wisata serta jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu);

7. ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 3.125.576 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 242.735 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulak, yaitu 41.742 jiwa.

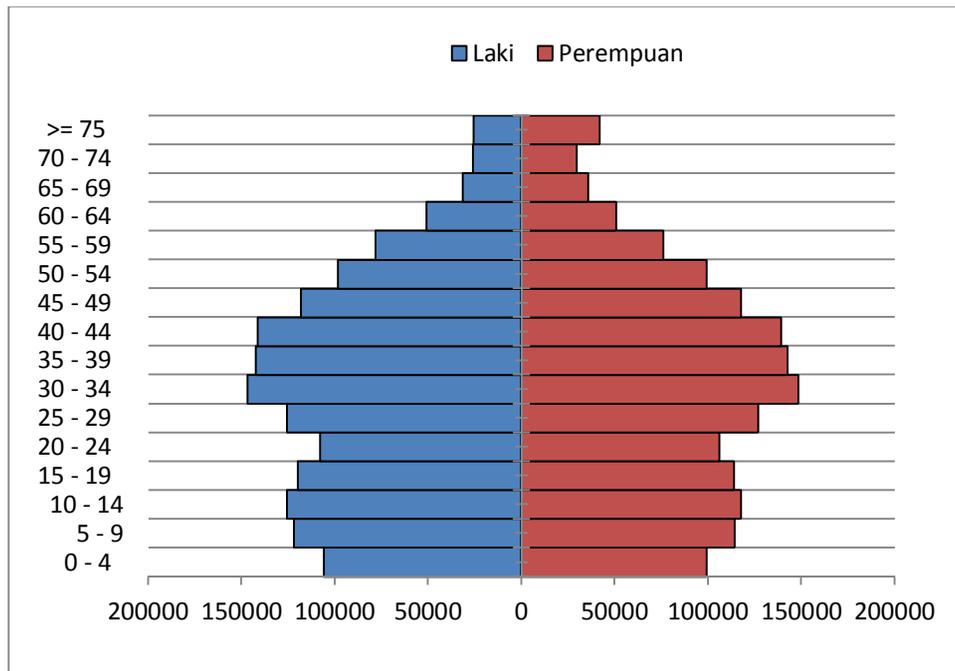
Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2012 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.566.072 jiwa penduduk laki-laki (50,105%) dan 1.559.504 jiwa penduduk perempuan (49,895%) sebagaimana yang disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Karang Pilang	38.924	38.298	77.222
2	Wonocolo	42.436	42.381	84.817
3	Rungkut	54.048	53.906	107.954
4	Wonokromo	96.122	96.131	192.253
5	Tegalsari	57.942	58.322	116.264
6	Sawahan	114.826	115.268	230.094
7	Genteng	33.784	34.588	68.372
8	Gubeng	76.230	77.924	154.154
9	Sukolilo	55.700	55.568	111.268
10	Tambak Sari	121.252	121.483	242.735
11	Simokerto	53.190	53.569	106.759
12	Pabean Cantian	46.556	46.056	92.612
13	Bubutan	57.695	57.564	115.259
14	Tandes	48.843	48.678	97.521
15	Krempangan	65.183	64.420	129.603
16	Semampir	103.414	102.025	205.439
17	Kenjeran	76.722	75.189	151.911
18	Lakar Santri	28.083	27.623	55.706
19	Benowo	27.586	27.324	54.910
20	Wiyung	34.670	34.123	68.793
21	Dukuh Pakis	31.723	31.443	63.166
22	Gayungan	24.630	24.456	49.086
23	Jambangan	25.095	24.545	49.640
24	Tenggilis Mejoyo	28.709	28.717	57.426
25	Gunung Anyar	26.880	26.712	53.592
26	Mulyorejo	43.820	44.303	88.123
27	Sukomanunggal	52.880	52.549	105.429
28	Asemrowo	23.445	22.177	45.622
29	Bulak	20.981	20.761	41.742
30	Pakal	24.577	23.781	48.358
31	Sambi Kerep	30.126	29.620	59.746
Jumlah		1.566.072	1.559.504	3.125.576

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013, diolah.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya
Berdasarkan Kelompok Usia
Tahun 2012



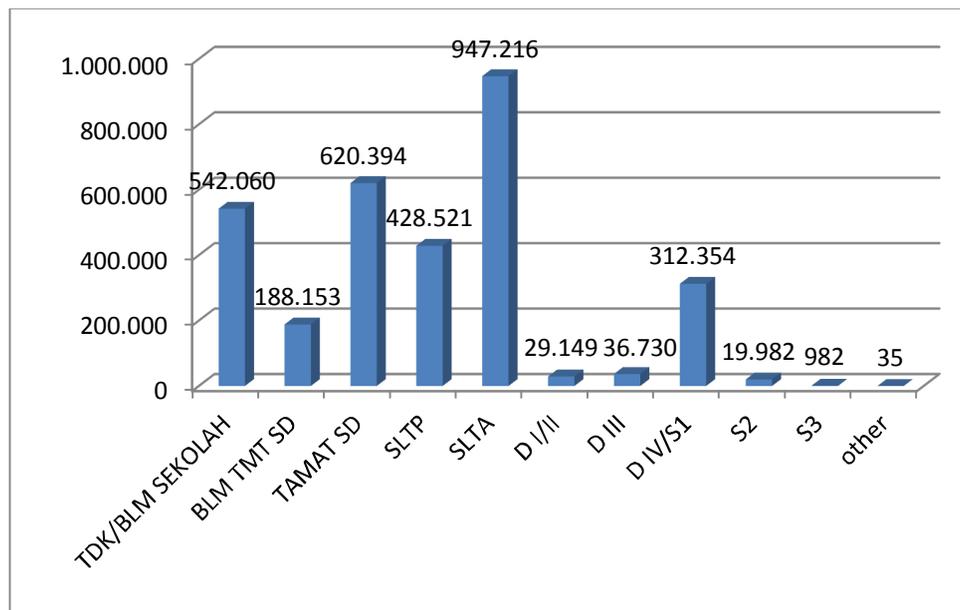
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013, diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2012 berdasarkan kelompok usia dapat dijelaskan bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun (2.250.805 jiwa) selanjutnya kelompok usia kurang dari 15 tahun (684.385 jiwa) dan kelompok usia diatas 64 tahun (190.386 jiwa). Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia secara lengkap disajikan pada Grafik 2.1 sebagaimana di atas.

Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2012 berdasarkan jenis pekerjaan dapat dijelaskan bahwa penduduk kota Surabaya pada umumnya bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 880.945 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan terbesar penduduk kota Surabaya adalah SMA/ sederajat sebanyak 947.216 jiwa, kemudian Sekolah Dasar (SD)/sederajat sebanyak 620.394 jiwa dan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 428.521 jiwa. Adapun informasi mengenai tingkat pendidikan penduduk kota Surabaya pada tahun 2012 secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Kota Surabaya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2012



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2013, diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian dunia sejak terjadinya krisis *subprime mortgage* di pasar keuangan Amerika Serikat tahun 2008 masih cenderung berfluktuasi hingga saat ini. Meskipun sempat terjadi pemulihan global di tahun 2010, akan tetapi beban utang negara-negara di kawasan Eropa menyebabkan perekonomian dunia kembali menghadapi tantangan serius di tahun 2011. Selain itu, bencana tsunami dan reaktor nuklir yang terjadi di Jepang pada triwulan awal 2011 telah mengganggu produksi dan perdagangan sehingga mengalami kontraksi ekonomi.

Pada kenyataannya, perekonomian nasional masih cukup kuat untuk menghadapi dampak krisis global yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011 yang mengalami peningkatan hingga mampu tumbuh 6,5 persen. Bayang-bayang dampak krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tidak berdampak terlalu signifikan pada perekonomian nasional dikarenakan permintaan domestik masih cukup kuat untuk menahan perlambatan yang terjadi di sisi eksternal.

Sejalan dengan perekonomian nasional, kinerja ekonomi Kota Surabaya juga sangat baik yang dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB.

PDRB Kota Surabaya yang dihitung berdasarkan harga konstan di tahun 2011 sebesar Rp94.471.049,66 juta. Kemudian pada tahun 2012 nilai PDRB ADHK meningkat mencapai Rp101.671.633,57 juta.

Ditinjau dari kontribusi ekonominya, sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR) masih menjadi kontributor utama pembentuk PDRB Kota Surabaya. Sektor lainnya yang juga memberi peranan besar pada PDRB adalah sektor industri pengolahan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi dari ketiga sektor ekonomi tersebut sepanjang tahun 2012 mencapai 76,21%. Sektor lainnya yang memiliki peningkatan kontribusi adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011		2012	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	77.663,11	0,08	78.013,26	0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	6.511,14	0,01	6.743,23	0,01
3	Industri Pengolahan	20.223.278,64	21,41	21.421.547,93	21,07
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.089.362,01	2,21	2.188.117,38	2,15
5	Konstruksi	6.316.849,86	6,69	6.782.238,21	6,67
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	40.371.150,00	42,73	44.011.461,26	43,29
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11.122.674,38	11,77	12.054.700,61	11,86
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.153.536,23	6,51	6.613.389,33	6,50
9	Jasa-Jasa	8.110.024,29	8,58	8.515.422,36	8,38
	PDRB	94.471.049,66	100,00	101.671.633,57	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, Mei 2013

Peningkatan nilai PDRB ADHK Kota Surabaya sejalan dengan peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku (ADHB). Jika angka PDRB ADHB tahun 2011 sebesar Rp235.034.299,43 juta maka nilai kumulatif PDRB hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp264.335.620,09 juta atau meningkat 12,47% dibandingkan tahun 2011. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011		2012	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	185.468,17	0,08	192.395,48	0,07
2	Pertambangan dan Penggalian	12.418,13	0,01	13.582,50	0,01
3	Industri Pengolahan	51.188.301,93	21,78	57.379.281,61	21,71
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.689.908,93	3,27	8.070.853,58	3,05
5	Konstruksi	16.218.469,27	6,90	18.154.474,45	6,87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	103.172.404,53	43,90	117.525.130,35	44,46

No.	Sektor	2011		2012	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.724.728,63	10,09	26.887.741,57	10,17
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	14.176.899,89	6,03	16.032.979,68	6,07
9	Jasa-Jasa	18.665.699,96	7,94	20.079.180,87	7,60
	PDRB	235.034.299,43	100,00	264.335.620,09	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, Mei 2013

Posisi Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa semakin terlihat dari besarnya kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dalam PDRB Kota Surabaya. Hal ini terlihat pada tahun 2012 dimana peranan sektor PHR dalam PDRB ADHB Kota Surabaya mencapai 44,46%. Selain itu sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan peranannya semakin meningkat setiap tahun. Kontribusi dari masing-masing sektor tersebut di tahun 2012 ini mencapai 10,17% dan 6,07%. Jumlah peranan dari ketiga sektor tersebut hingga saat ini mencapai 60,70%. Hal ini juga menandakan aktivitas bidang jasa yang makin menguat di Kota Surabaya.

Di sisi lain, industri pengolahan perlahan-lahan mulai menurun kontribusinya, namun tetap menjadi sektor tertinggi kedua dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya dengan nilai kontribusi sebesar 21,71% (tabel 2.4)

Tabel 2.4
Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011		2012*	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian	0,08	0,08	0,07	0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	21,78	21,41	21,71	21,07
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,27	2,21	3,05	2,15
5	Konstruksi	6,90	6,69	6,87	6,67
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	43,90	42,73	44,46	43,29
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,09	11,77	10,17	11,86
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,03	6,51	6,07	6,50
9	Jasa-Jasa	7,94	8,58	7,60	8,38
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, Mei 2013

b. Inflasi

Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Adanya gangguan produksi tersebut mendorong

peningkatan tekanan *output gap* di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri.

Hal yang sama juga terjadi pada inflasi di Kota Surabaya yang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, dikarenakan posisinya sebagai kota perdagangan yang lebih sering digunakan sebagai jalur distribusi perdagangan dari dan keluar Surabaya. Di sisi lain, sektor pertanian di Surabaya juga mulai menurun kinerjanya sehingga sebagian besar komoditas yang dikonsumsi diimpor dari daerah lain di luar Surabaya. Selain itu beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga mendorong inflasi.

Di tahun 2011 angka inflasi Kota Surabaya sebesar 4,72% dan menurun menjadi 4,39% di tahun 2012. Meskipun terjadi inflasi yang bersumber dari faktor musiman, seperti biaya sekolah terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari besar keagamaan (Puasa, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru), namun angkanya dapat dikendalikan selaras dengan minimnya kebijakan pemerintah di bidang harga serta terjaganya pasokan bahan pangan dan energi.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nilai Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Inflasi (%)	4,72	4,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Januari 2013

c. PDRB Per Kapita

Ditinjau dari PDRB per kapitanya, pada tahun 2011 nilainya sebesar Rp31,24 juta/jiwa/tahun. Kemudian di tahun 2012 jumlahnya menjadi Rp32,53 juta/jiwa/tahun dikarenakan adanya penambahan penduduk dari 3,02 juta jiwa (2011) menjadi 3,13 juta jiwa. Peningkatan nilai PDRB perkapita ini secara umum menandakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kota Surabaya yang masih cukup tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)	94.471.049,66	101.671.633,57
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.024.321	3.125.576
3	PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa)	31,24	32,53

Sumber: BPS Kota Surabaya, Mei 2013

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan di bidang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Adapun indikator yang menunjukkan hasil kinerja bidang pendidikan pada jalur non formal adalah angka melek huruf. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Pada tahun 2012, angka melek huruf di Kota Surabaya 100% yang artinya bahwa seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis. Angka ini berhasil dipertahankan dari tahun 2011 dimana angka melek hurufnya juga sudah mencapai 100% (tabel 2.7).

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.326.260	2.532.545
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.326.260	2.532.545
3	Angka Melek Huruf (%)	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. APM pada tahun 2012 mengalami peningkatan baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Pada tahun 2012, APM SD/MI menjadi 93,97% dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 93,02%. APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 92,63% dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 90,26%. Hal tersebut juga sama dengan capaian APM SMA/MA/SMK yang pada tahun 2012 meningkat menjadi 87,77% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 85,77% (tabel 2.8)

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	264.137	276.893
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	283.957	294.664
1.3	APM SD/MI (%)	93,02	93,97
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	122.889	128.648
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	136.150	138.884
2.3	APM SMP/MTs (%)	90,26	92,63
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	117.101	125.385
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	136.529	142.856
3.3	APM SMA/MA/SMK (%)	85,77	87,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

b. Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan menurunnya angka prevelansi balita gizi buruk. Beberapa capaian indikator program kesehatan yang dicapai pada tahun 2012 antara lain meningkatnya capaian AHH yang biasa digunakan sebagai indikasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi 71,63 tahun dari tahun 2011 yang sebesar 71,33 tahun. Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2012 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-Rata Penduduk (tahun)	71,33	71,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2013

Kondisi kesehatan gizi masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang positif dengan ditandai oleh menurunnya angka prevalensi gizi buruk balita menjadi 0,38% dari tahun sebelumnya sebesar 0,64%. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2011-2012 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2011-2012

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	% Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	% Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	27	3.449	0,77	10	3.005	0,33
2	Kec. Benowo	14	3.776	0,37	2	4.050	0,05
3	Kec. Bubutan	20	6.065	0,33	5	6.102	0,08
4	Kec. Bulak	12	1.902	0,63	22	2.176	1,01
5	Kec. Dukuh Pakis	2	2.604	0,08	8	2.867	0,28
6	Kec. Gayungan	4	1.815	0,22	2	1.716	0,12
7	Kec. Genteng	15	2.685	0,56	5	2.846	0,18
8	Kec. Gubeng	45	6.985	0,64	21	7.541	0,28
9	Kec. Gunung Anyar	15	2.261	0,66	7	2.510	0,28
10	Kec. Jambangan	5	3.355	0,15	14	3.651	0,38
11	Kec. Karangpilang	5	2.851	0,18	12	3.008	0,4
12	Kec. Kenjeran	108	8.588	1,26	34	8.456	0,4
13	Kec. Krembangan	56	7.080	0,79	33	7.356	0,45
14	Kec. Lakarsantri	6	3.179	0,19	5	3.253	0,15
15	Kec. Mulyorejo	31	3.153	0,98	10	3.224	0,31
16	Kec. Pabean Cantian	24	2.877	0,83	18	3.142	0,57
17	Kec. Pakal	63	3.514	1,79	43	4.749	0,91
18	Kec. Rungkut	32	5.093	0,63	14	5.000	0,28
19	Kec. Sambikerep	21	3.227	0,65	10	2.725	0,37
20	Kec. Sawahan	47	13.188	0,36	27	13.373	0,2
21	Kec. Semampir	86	11.312	0,76	50	11.368	0,44
22	Kec. Simokerto	43	5.259	0,82	50	5.648	0,89
23	Kec. Sukolilo	22	5.277	0,42	18	4.851	0,37
24	Kec. Sukomanunggal	18	6.896	0,26	73	7.090	1,03
25	Kec. Tambaksari	111	11.220	0,99	57	10.785	0,53
26	Kec. Tandes	33	4.789	0,69	19	5.291	0,36
27	Kec. Tegalsari	35	5.978	0,59	16	6.198	0,26
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	43	3.927	1,09	10	3.898	0,26
29	Kec. Wiyung	17	3.177	0,54	8	3.035	0,26
30	Kec. Wonocolo	19	5.205	0,37	7	4.712	0,15
31	Kec. Wonokromo	48	8.715	0,55	16	9.507	0,17
	Total	1.027	159.402	0,64	626	163.133	0,38

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

c. Ketenagakerjaan

Berdasarkan struktur komposisi angkatan kerja Kota Surabaya, golongan umur yang paling dominan terletak pada umur antara 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, komposisi angkatan kerja di Kota Surabaya masih cukup sehat karena didominasi oleh golongan umur yang masih produktif sebagaimana tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Golongan Umur	2011			2012		
		Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	15-19	38.308	19.541	57.849	47.417	12.669	60.086
2	20-24	150.595	17.615	168.21	148.843	29.061	177.904
3	25-29	222.722	14.322	237.044	183.459	9.305	192.764
4	30-34	174.884	5.896	180.780	212.481	6.664	219.145
5	35-39	198.765	6.071	204.836	182.378	3.156	185.534
6	40-44	162.757	2.516	165.273	176.096	2.084	178.180
7	45-49	158.996	3.605	162.601	117.430	1.964	119.394
8	50-54	108.766	3.558	112.324	120.366	1.964	122.330
9	55-59	97.332	1.01	98.342	74.589	5.130	79.719
10	60+	86.068	1.82	87.888	84.621	-	84.621
	Jumlah	1.399.193	75.954	1.475.147	1.347.680	71.997	1.419.677

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2013

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung masyarakat untuk melestarikan seni budaya tradisional, agar kelestarian seni budaya asli Kota Surabaya tetap terjaga. Upaya - upaya yang dilakukan dalam melestarikan seni budaya tersebut melalui pembinaan grup kesenian. Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 164 grup pada tahun 2011 menjadi 183 grup pada tahun 2012.

Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan gedung kesenian yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kesenian. Gedung kesenian yang dimiliki pemerintah kota Surabaya sebanyak 2 gedung, yaitu Gedung Balai Pemuda dan Gedung Taman Hiburan Rakyat (THR). Secara rinci, dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012
1	Jumlah Grup Kesenian	164	183
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2
3	Jumlah Klub Olahraga	43	0
4	Jumlah Gedung Olahraga	3	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2013

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

FOKUS URUSAN WAJIB

a. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK SD/MI pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 yang sebesar 105,37% menjadi 105,21%. Hal tersebut juga terjadi pada APK SMP/MTs dimana pada tahun 2011 sebesar 107,17% memurun menjadi 107,11% pada tahun 2012. Sedangkan pada APK SMA/MA/SMK pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 105,13% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 105,09%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	299.205	310.016
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	283.957	294.664
1.3	APK SD/MI (%)	105,37	105,21
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	145.912	148.759
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	136.150	138.884
2.3	APK SMP/MTs (%)	107,17	107,11
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	143.477	150.185

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	136.529	142.856
3.3	APK SMA/MA/SMK (%)	105,09	105,13

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk di usia sekolah yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. APM pada tahun 2012 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan tahun 2011. APM SD/MI pada tahun 2012 meningkat menjadi 93,97% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 93,02%. APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 92,63% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 90,26%. APM SMA/MA/SMK pada tahun 2012 juga meningkat menjadi 87,77% dibandingkan tahun 2011 sebesar 85,77%. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	264.137	276.893
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	283.957	294.664
1.3	APM SD/MI (%)	93,02	93,97
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	122.889	128.648
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	136.150	138.884
2.3	APM SMP/MTs (%)	90,26	92,63
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	117.101	125.385
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	136.529	142.856
3.3	APM SMA/MA/SMK (%)	85,77	87,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

Angka Kelulusan jenjang SD/MI pada tahun 2011 dan 2012 tetap sama yaitu sebesar 100%. Untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 99,89% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 99,73%. Sama

halnya dengan angka kelulusan jenjang SMA/MA yang pada tahun 2012 meningkat menjadi 99,93% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 99,33%. Sedangkan angka kelulusan jenjang SMK pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 99,88% dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 99,94%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15
Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	40.575	45.801
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	40.575	45.801
1.3	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	38.260	38.788
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.362	38.832
2.3	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,73	99,89
3	SMA/MA		
3.1	Jumlah Siswa SMA/MA yang Lulus	18.268	18.063
3.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMA/MA Kelas 12	18.391	18.075
3.3	Angka Kelulusan SMA/MA (%)	99,33	99,93
4	SMK		
4.1	Jumlah Siswa SMK yang Lulus	15.452	17.858
4.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12	15.461	17.879
4.3	Angka Kelulusan SMK (%)	99,94	99,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

Angka Melanjutkan merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau juga berfungsi untuk mengetahui daya serap sekolah yang lebih tinggi. Semakin tinggi capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa lulusan suatu jenjang pendidikan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 99,42% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 98,78%. Peningkatan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK yang pada tahun 2012 menjadi sebesar 99,15% dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 90,00%. Meningkatnya Angka Melanjutkan tersebut di atas merupakan salah satu keberhasilan dari program Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16

Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	AM SD/MI ke jenjang SMP/MTs		
1.1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTs	40.079	45.536
1.2	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	40.575	45.801
1.3	Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs (%)	98,78	99,42
2.	AM SMP/MTs ke jenjang SMA/MA		
2.1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMA/SMK/MA	34.434	38.460
2.2	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Sebelumnya	38.260	38.788
2.3	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK (%)	90,00	99,15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013

b. Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak perlu diperluas cakupannya mengingat aspek kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang relevan dengan target *Millenium Develepment Goals* (MDGs) yang harus dipenuhi pada tahun 2015. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi. Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2012, terdapat penambahan jumlah posyandu yang sebelumnya berjumlah 2.794 posyandu menjadi 2.808 posyandu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel 2.17.

Tabel 2.17
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Posyandu	2.794	2.808
2	Jumlah Balita	203.773	204.951
3	Rasio Posyandu per 1.000 penduduk	13,71	13,70

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

Kondisi sarana prasarana kesehatan di Kota Surabaya pada tahun 2012 menunjukkan adanya sejumlah perkembangan. Beberapa perkembangan tersebut antara lain meningkatnya jumlah pukesmas pembantu (pustu) yang dinaikkan statusnya menjadi

puskesmas induk, dengan jumlah 4 (empat) unit. Dengan demikian total jumlah puskesmas di Kota Surabaya meningkat dari semula 58 unit menjadi 62 unit. Selain itu terdapat juga peningkatan poliklinik sebesar 82 unit atau meningkat dari semula 190 poliklinik menjadi 272 poliklinik. Peningkatan tersebut cukup tinggi karena mencapai 43% dari jumlah poliklinik yang ada. Peningkatan sarana kesehatan, baik publik maupun swasta diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
2	Puskesmas		
2.1	Jumlah Puskesmas	58	62
2.2	Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk	0,019	0,020
3	Poliklinik		
3.1	Jumlah	190	272
3.2	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	0,063	0,087
4	Pustu		
4.1	Jumlah	64	60
4.2	Rasio Pustu per 1.000 penduduk	0,021	0,019

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Kondisi peningkatan jumlah sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas dan poliklinik juga diikuti dengan pertumbuhan rumah sakit di Kota Surabaya, dimana pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) rumah sakit swasta baru yang beroperasi di Kota Surabaya. Penambahan jumlah rumah sakit ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatan lanjutan bagi seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Dilihat dari rasio, terdapat peningkatan dari semula 0,0185 di tahun 2011 menjadi 0,0192 pada tahun 2012. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	2	2
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	2	2
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	47
7	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0185	0,0192

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Sementara itu, ketersediaan dokter di Kota Surabaya pada tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2011. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan persebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya. Secara rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah dokter, maka terdapat peningkatan dari semula 1,60 di tahun 2011 menjadi 1,71 di tahun 2012. Adapun peningkatan jumlah dokter di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah Dokter Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
2	Jumlah Dokter	4.835	5.343
3	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	1,60	1,71

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

c. Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting dalam mendukung kelancaran berlalu lintas. Untuk itu Dinas PU Bina Marga dan Pematuan berupaya melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.21, panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 1.381,995 km bertambah menjadi 1.386,276 km pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2011 panjang jalan kewenangan kota sebesar 1.426,645 km menjadi 1.427,754 km pada tahun 2012. Pertambahan panjang seluruh jalan tersebut disebabkan adanya pembangunan jalan aksesibilitas untuk mendistribusikan volume kendaraan secara merata sehingga memperlancar arus lalu lintas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.381,995	1.386,276
2	Panjang Jalan (Km)	1.426,645	1.427,754
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	96,87	97,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, 2013

Kondisi topografi Kota Surabaya terdiri atas perbukitan di bagian barat, relatif rendah di pantai sisi utara dan timur serta daerah datar di sisi selatan. Untuk itu saluran drainase perlu pemeliharaan yang baik sehingga air tidak menggenangi jalan yang dapat mengakibatkan dampak kerusakan jalan. Hal ini dapat memperparah kemacetan di beberapa ruas jalan. Pada tabel 2.22, panjang drainase kondisi baik tahun 2011 sebesar 319.881,73 km sedangkan pada tahun 2012, panjang drainase kondisi baik menjadi

sebesar 320.842 km. Di beberapa lokasi, masih terdapat saluran drainase yang belum terkoneksi dengan baik, untuk itu perlu pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala sehingga mampu meningkatkan kinerja sistem jaringan drainase. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air (Km)	319.881,73	320.842,00
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	326.808,00	326.808,00
3	Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik (%)	97,88	98,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2013

d. Perumahan Rakyat

Konsepsi pengembangan kualitas lingkungan permukiman perkotaan di Kota Surabaya bertujuan untuk melakukan penataan perumahan dan pemukiman di perkotaan dan mengurangi kekumuhan di kawasan berpenduduk padat. Program perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengatasi permasalahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mendapat manfaat rumah layak huni. Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman tidak hanya membangun perumahan atau permukiman baru, akan tetapi juga menjaga kualitas sarana prasarana permukiman itu menjadi lebih baik, lebih sehat dan tidak kumuh. Penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan secara multisektoral melalui upaya pembenahan fisik dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. pengembangan hunian diarahkan secara vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, luasan kawasan kumuh di Kota Surabaya mencapai 329,1 Ha atau 1,01% dari luas wilayah kota. Data lingkungan permukiman kumuh Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.23 dan 2.24.

Tabel 2.23
Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Luas Wilayah (Ha)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	%	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	%
1	Kec. Asemrowo	1.544	5,4	0,35	1.544	5,3	0,34
2	Kec. Benowo	2.678	4,2	0,16	2.678	4,2	0,16
3	Kec. Bubutan	368	18,3	4,97	368	16,7	4,54
4	Kec. Bulak	678	4,3	0,63	678	3,7	0,55

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Luas Wilayah (Ha)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	%	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	%
5	Kec. Dukuh Pakis	994	4,1	0,41	994	3,4	0,34
6	Kec. Gayungan	607	1	0,16	607	0,8	0,13
7	Kec. Genteng	405	7,3	1,80	405	7,3	1,80
8	Kec. Gubeng	800	28,7	3,59	800	24,9	3,11
9	Kec. Gunung Anyar	871	8,7	1,00	871	6,4	0,73
10	Kec. Jambangan	419	4,7	1,12	419	2,7	0,64
11	Kec. Karangpilang	923	24,3	2,63	923	14,8	1,60
12	Kec. Kenjeran	764	2,8	0,37	764	2,6	0,34
13	Kec. Krembangan	834	18,7	2,24	834	17,1	2,05
14	Kec. Lakarsantri	2.043	9,7	0,47	2.043	4	0,20
15	Kec. Mulyorejo	1.421	8,4	0,59	1.421	6	0,42
16	Kec. Pabean Cantian	680	7,2	1,06	680	6,5	0,96
17	Kec. Pakal	1.901	0,7	0,04	1.901	0,3	0,02
18	Kec. Rungkut	2.108	9,1	0,43	2.108	7	0,33
19	Kec. Sambikerep	1.605	2,3	0,14	1.605	2,3	0,14
20	Kec. Sawahan	693	21,7	3,13	693	13,3	1,92
21	Kec. Semampir	877	37,2	4,24	877	36,5	4,16
22	Kec. Simokerto	259	10,2	3,94	259	7,5	2,90
23	Kec. Sukolilo	2.368	19,2	0,81	2.368	14,4	0,61
24	Kec. Sukomanunggal	923	12,7	1,38	923	12,7	1,38
25	Kec. Tambaksari	900	43,7	4,86	900	34,4	3,82
26	Kec. Tandes	1.106	20,8	1,88	1.106	20	1,81
27	Kec. Tegalsari	429	18,5	4,31	429	17,5	4,08
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	552	22,1	4,00	552	14	2,54
29	Kec. Wiyung	1.246	8,9	0,71	1.246	6,7	0,54
30	Kec. Wonocolo	678	13,2	1,95	678	8,1	1,19
31	Kec. Wonokromo	847	9,9	1,17	847	8,2	0,97
	Total	32.519	407,9	1,25	32.519	329,1	1,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2013

Tabel 2.24
Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Luas Wilayah (Ha)	32.519	32.519
2	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	407,9	329,1
3	Persentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	1,25	1,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2013

Pemerintah Kota Surabaya juga mengupayakan penyediaan lahan bagi terbangunnya rumah sederhana layak huni yang memiliki konsep pembangunan vertikal dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi MBR di Kota Surabaya agar bisa mendapatkan manfaat rumah layak huni. Sampai dengan tahun 2012, di Kota Surabaya terdapat 11 lokasi Rumah Susun

(Rusun) yang terdiri dari 70 blok rusun yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Rusun Dupak Bangunrejo, Rusun Sombo, Rusun Urip Sumoharjo, Rusun Penjaringan Sari I, II dan III, Rusun Wonorejo I dan II, Rusun Warugunung, Rusun Tanah Merah I dan II, Rusun Randu, Rusun Jambangan, Rusun Pesapen dan Rusun Grudo.

Selain mengupayakan konsep pembangunan rumah sederhana layak huni vertikal, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan permukiman kumuh/tidak layak huni melalui kegiatan rutin antara lain pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana permukiman, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa serta pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25 dan 2.26 sebagai berikut.

Tabel 2.25
Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%
1	Kec. Asemrowo	9.290	0	0	9.290	20	0,22
2	Kec. Benowo	18.382	40	0,22	18.382	0	0
3	Kec. Bubutan	21.014	60	0,29	21.014	20	0,10
4	Kec. Bulak	9.760	0	0	9.760	0	0
5	Kec. Dukuh Pakis	14.793	0	0	14.793	20	0,14
6	Kec. Gayungan	15.687	0	0	15.687	0	0
7	Kec. Genteng	14.117	0	0	14.117	40	0,28
8	Kec. Gubeng	34.124	20	0,06	34.124	20	0,06
9	Kec. Gunung Anyar	13.796	0	0	13.796	0	0
10	Kec. Jambangan	10.276	0	0	10.276	0	0
11	Kec. Karangpilang	18.486	20	0,11	18.486	0	0
12	Kec. Kenjeran	25.116	60	0,24	25.116	0	0
13	Kec. Krembangan	26.586	0	0	26.586	20	0,08
14	Kec. Lakarsantri	14.883	60	0,4	14.883	0	0
15	Kec. Mulyorejo	30.705	20	0,07	30.705	20	0,07
16	Kec. Pabean Cantian	19.190	0	0	19.190	0	0
17	Kec. Pakal	9.896	20	0,2	9.896	40	0,40
18	Kec. Rungkut	24.924	0	0	24.924	0	0
19	Kec. Sambikerep	11.125	20	0,18	11.125	0	0
20	Kec. Sawahan	44.444	0	0	44.444	40	0,09
21	Kec. Semampir	32.550	20	0,06	32.550		
22	Kec. Simokerto	20.794	0	0	20.794	40	0,19
23	Kec. Sukolilo	22.733	0	0	22.733	0	0
24	Kec. Sukomanunggal	24.929	0	0	24.929	0	0
25	Kec. Tambaksari	59.463	0	0	59.463	60	0,10
26	Kec. Tandes	27.716	0	0	27.716	20	0,07
27	Kec. Tegalsari	19.779	20	0,1	19.779	0	0
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	16.312	0	0	16.312	0	0

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%
29	Kec. Wiyung	9.847	20	0,2	9.847	0	0
30	Kec. Wonocolo	19.275	20	0,1	19.275	40	0,21
31	Kec. Wonokromo	39.099	20	0,05	39.099	0	0
	Total	679.091	420	0,06	679.091	400	0,06

Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2013 (diolah)

Tabel 2.26
Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Seluruh Rumah	679.091	679.091
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	420	400
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,06	0,06

Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2013 (diolah)

e. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan pemanfaatan ruang adalah dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB reklame. Untuk IMB rumah tinggal, pada tahun 2012 jumlah IMB yang diterbitkan adalah sebanyak 149 berkas atau menurun sebanyak 96,67% dari tahun 2011 (4.477 berkas). Untuk IMB non rumah tinggal, pada tahun 2012 jumlah IMB yang diterbitkan adalah sebanyak 3.194 berkas atau meningkat sebanyak 298,75% dari tahun 2011 (801 berkas). Untuk IMB reklame, pada tahun 2012 jumlah IMB yang diterbitkan adalah sebanyak 175 berkas atau menurun sebanyak 57% dari tahun 2011 (407 berkas), sebagaimana tabel berikut (tabel 2.27).

Tabel 2.27
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Rumah Tinggal	4.477	149
2	Non Rumah Tinggal	801	3.194
3	Reklame	407	175
	Total	5.685	3.518

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013

Penataan ruang yang baik juga harus mempertimbangan pembangunan ruang publik. Ruang publik adalah suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 2011 dan 2012, ruang publik yang dimiliki Kota Surabaya seluas 10.593,9 Ha dan tidak ada yang berubah fungsi atau peruntukannya, hal tersebut dilakukan mengingat fungsi ruang publik yang sangat besar yaitu sebagai tempat berinteraksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya serta sebagai ruang evakuasi bencana, sebagaimana tabel 2.28

Tabel 2.28
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Ruang Publik yang Tersedia (Ha)	10.593,90	10.593,90
2	Jumlah Ruang Publik yang Berubah Fungsi (Ha)	0	0
3	Persentase Ruang Publik yang Berubah Fungsi (%)	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2013

f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD Kota Surabaya merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Jenis Dokumen	2011	2012
1	RPJPD	Tidak ada	Ada
2	RPJMD	Tidak ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2010 - 2015 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2010-2015 merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2012 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program (tabel 2.30).

Tabel 2.30
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	60	60
2	Jumlah Program RKPD	60	60
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2013

g. Perhubungan

Di Surabaya saat ini terdapat 4 terminal yang melayani angkutan umum jenis bis yang terdiri dari 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun, 1 terminal tipe B yaitu Terminal Joyoboyo dan 1 terminal tipe C yaitu Terminal Bratang dengan jumlah angkutan darat pada tahun 2011 sejumlah 16.389 kendaraan dan pada tahun 2012 menurun menjadi 10.155 kendaraan.

Selain jumlah angkutan darat yang mengalami penurunan, kondisi angkutan umum juga semakin lesu ditandai dengan menurunnya jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dari semula di tahun 2011 sebanyak 8.299 ijin trayek menjadi 7.134 ijin trayek di tahun 2012 (tabel 2.31 dan 2.32).

Tabel 2.31
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Terminal Bis	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	16.389	10.155

Sumber : Dinas Perhubungan, 2013

Tabel 2.32
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	8.299	7.134
3	Rasio Ijin Trayek	0,003	0,002

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendukung keselamatan lalu lintas di jalan antara lain melalui pembinaan keselamatan bagi pelajar dan bagi masyarakat umum, uji emisi kendaraan umum maupun pribadi serta pemeriksaan kelaikan kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang meliputi angkutan penumpang dan barang di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2011 adalah 147.569 kendaraan dan pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 146.575 kendaraan (tabel 2.33).

Tabel 2.33
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*	12.547	27.346
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	85.488	93.511
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	156.790	149.741
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	147.569	146.575

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Keterangan: *) Angkutan Umum (penumpang dan barang)

Upaya-upaya lain dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas adalah melalui penyediaan perlengkapan jalan dan APILL. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemasangan rambu sebagai bagian dari perlengkapan jalan baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Sampai dengan tahun 2011 telah terpasang 8.022 buah rambu yang bertambah pada tahun 2012 sejumlah 514 buah menjadi 8.536 buah rambu (tabel 2.34).

Tabel 2.34
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	8.022	8.536

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

h. Lingkungan Hidup

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari yaitu sebesar 3 l/org.hari. Pada Tahun 2011,

volume timbunan sampah di Kota Surabaya mencapai 9.072,96 m³/hari dan pada tahun 2012 mencapai 9.376,73 m³/hari.

Dengan menerapkan konsep 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) mulai dari sumber sampah, maka sampah yang masuk ke TPA berkurang menjadi 1.150,02 ton/hari atau setara dengan 3.833,40 m³/hari pada tahun 2011 dan 1.169,27 ton/hari atau setara dengan 3.897,57 m³/hari di tahun 2012 (dengan mengasumsikan berat jenis sampah adalah 300 kg/m³). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Volume Produksi Sampah	9.072,96 (m ³ /hari)	9.376,73 (m ³ /hari)
2	Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA	3.833,40 (m ³ /hari)	3.897,57 (m ³ /hari)
3	Persentase Sampah yang Ditangani di TPA (%)	42,25	41,57

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2013

Pada Tahun 2011, penduduk kota Surabaya berjumlah 3.024.321 jiwa (Dispendukcapil, 2012) dan pada tahun 2012 penduduk Kota Surabaya mencapai 3.125.576 jiwa (Dispendukcapil, 2013). Untuk memberikan pelayanan persampahan kepada penduduk Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 174 TPS di Tahun 2011 (DKP, 2012) dengan daya tampung 953,4 ton dan meningkat menjadi 176 TPS di tahun 2012 (DKP, 2013) dengan daya tampung 979,2 ton. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui rasio antara daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011 adalah 0,000315 dan rasio antara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012 adalah 0,000313. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
2	TPS		
2.1	Jumlah (Unit)	174	176
2.2	Jumlah Daya Tampung (Ton)	953,40	979,2
3	Rasio TPS	0,000315	0,000313

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2013

Disamping masalah persampahan diatas terdapat pula permasalahan lingkungan lainnya, yaitu pencemaran lingkungan. Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran lingkungan pada tahun 2011 tercatat 90 kasus pencemaran (46 kasus pencemaran udara, 20 kasus pencemaran air, dan 24 kasus pencemaran lingkungan lainnya seperti kebisingan, pencemaran tanah, perijinan, dan lain-lain) dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 85 kasus pencemaran (24 kasus pencemaran udara, 39 kasus pencemaran air, dan 22 kasus pencemaran lingkungan lainnya seperti gangguan kebisingan, pencemaran tanah, eksploitasi air bawah tanah, dan lain-lain) seperti pada tabel 2.37

Tabel 2.37
Penegakan Hukum Lingkungan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ada	90	85
2	Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan PemKot	90	85
3	Persentase Penegakan Hukum (%)	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2013

Berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran di Kota Surabaya pada tahun 2012, jenis kegiatan/usaha *home industry* menempati nilai tertinggi dari jumlah kasus yang ada yaitu sebanyak 26 kasus (31%). Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kegiatan/usaha lainnya seperti kegiatan/usaha industri sebanyak 19 kasus (22%), rumah makan 8 kasus (9%), bengkel, percetakan dan pergudangan masing-masing 5 kasus (18%), perdagangan 4 kasus (5%), hotel, rumah sakit, dan apartemen masing-masing 2 kasus (7%) dan sisanya 7 kasus pencemaran (8%) berasal dari pasar, permukiman warga dan tempat hiburan). Penyelesaian kasus lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan observasi, verifikasi di lapangan dan pengambilan sampel.

Penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan klarifikasi atas dugaan pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan/usaha sebanyak 65 kasus (76,5%), dengan mediasi sebanyak 13 kasus (15,3%), pengawasan sebanyak 6 kasus (7%), maupun penerapan sanksi administrasi melalui surat peringatan sebanyak 1 kasus (1,2%). Kasus lingkungan dianggap selesai jika sudah tidak ada pencemaran yang dilaporkan oleh pengadu, kasus sudah diselesaikan sendiri oleh pengusaha, atau perusahaan sudah tidak beroperasi (tutup). Sedangkan kasus dianggap selesai dan dalam pengawasan lingkungan jika kasus tersebut dalam kesepakatan bersama terdapat masa tenggang untuk penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi.

i. Pertanian

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya. Dalam

mengelola dan mengawasi tanah sebanyak itu tentu bukan perkara gampang. perlu bukti kepemilikan memadai, pengawasan dan pemeliharaan reguler agar tanah itu bermanfaat dan menghasilkan pendapatan. Ini yang sekarang tengah dihadapi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam pengurusan aset-aset tanah tersebut Pemerintah Kota berpedoman pada regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yang mana dalam pengawasan dan pengamanan aset tanah disyaratkan bahwa barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.38

Tabel 2.38
Daftar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Status Tanah	2011			2012		
		Jumlah (m ²)	(%)	Jumlah Sertifikat / Bidang	Jumlah (m ²)	(%)	Jumlah Sertifikat / Bidang
1.	Hak Pengelolaan (HPL)	7.687.775,00	32,65	86 Sertifikat	7.704.855,00	32,27	87 Bidang
2.	HAK PAKAI (HP)	5.440.014,50	23,11	507 Sertifikat	5.693.428,50	23,85	531 Bidang
3.	BA P2TUN	622.669,50	2,64	10 Bidang	622.669,50	2,61	10 Bidang
4.	BESLIT	379.993,29	1,61	177 Bidang	379.993,29	1,59	177 Bidang
5.	EIGENDOM	4.171.741,00	17,72	46 Bidang	4.171.741,00	17,47	46 Bidang
6.	Tanah Negara	978.044,00	4,15	11 Bidang	978.044,00	4,1	11 Bidang
7.	Fasum/Fasos Penyerahan Dari Pengembang	896.107,00	3,81	354 Bidang	896.107,00	3,8	351 Bidang
8.	Petok D BTKD Penyerahan Dari Bagian Pemerintahan	3.249.919,00	13,8	116 Petok D	3.249.919,00	13,77	116 Petok D
9.	Hak Milik (SHM)	98.231,00	0,42	6 Sertifikat	91.376,00	0,38	4 Bidang
10.	Hak Guna Bangunan (HGB) Penyerahan Dari Bagian Perlengkapan	788	0	1 Sertifikat	788	0	1 Bidang
11.	Pembelian/Pengadaan Tanah	6.948,00	0,03	4 Sertifikat			
		10.805,70	0,05	4 Bidang	11.908,70	0,05	5 Bidang

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2013

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya melaksanakan pengamanan terhadap aset tanah milik daerah adalah adanya pengakuan dan gugatan hukum atas tanah aset tersebut oleh pihak lain. Data jumlah kasus tanah aset pemerintah kota yang ditangani/terdaftar di pengadilan dan jumlah yang telah diselesaikan disajikan dalam tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39
Penyelesaian Kasus Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Kasus yang Terdaftar	28	30
2	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	4	2
3	% Kasus yang Diselesaikan	14,29	6,67

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2013

Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut ditahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar ditahun berikutnya).

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 3.125.576 dari jumlah tersebut penduduk yang wajib memiliki KTP adalah sebanyak 2.346.704 jiwa. Dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP, sebanyak 2.136.309 jiwa telah ber-KTP dan seluruhnya telah berbasis NIK. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2013, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	2.029.828	2.136.309

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Pada tahun 2011, jumlah pekerja perempuan di Kota Surabaya sebanyak 564.849 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 529.654 orang, dari jumlah tersebut pekerja perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011 sebanyak 10.918 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 10.604, jika dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Surabaya persentasenya sebesar 1,93% pada tahun 2011 dan sebesar 2% pada tahun 2012. Meskipun jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya menurun pada tahun 2012, tetapi secara keseluruhan persentasenya meningkat dibandingkan tahun 2011. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pekerja Perempuan	564.849	529.654
2	Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	10.918	10.604
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota (%)	1,93	2,00

Sumber: BPS dan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, 2013

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan dari sebesar 93,54% pada tahun 2011 menjadi 95,79% pada tahun 2012. Namun secara jumlah angkatan kerja perempuan mengalami penurunan dari sebesar 603.839 orang tahun 2011 menjadi sebesar 552.925 orang pada tahun 2012. Ini berarti ada cukup banyak angkatan kerja perempuan yang memilih tidak bekerja atau melanjutkan pendidikan sebelum memasuki dunia kerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.42

Tabel 2.42
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	603.839	552.925
2	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	564.849	529.654
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	93,54	95,79

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43
KDRT Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga	593.603	685.468
2	Jumlah KDRT	84	79
3	Persentase KDRT (%)	0,014	0,012

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2013

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 84 kasus pada tahun 2011 dan 79 kasus pada tahun 2012. Kecenderungan menurunnya kasus KDRT

yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya. Jenis kasus KDRT meliputi:

- a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c) Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d) Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, *Shelter* (Rumah Aman).

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarki, doktrin agama dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang).

Jumlah pengaduan kasus KDRT, non KDRT dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak sebanyak 294 kasus pada tahun 2011 dan 211 kasus pada tahun 2012. Kecenderungan menurunnya kasus KDRT, Non KDRT dan *trafficking* yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan dan kesadaran masyarakat. Jenis kasus KDRT, non KDRT dan *trafficking* meliputi fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, tindakan medis berupa rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu/Rumah Sakit, konsultasi hukum serta pendampingan ke polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, shelter (rumah aman). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	294	211
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	294	211
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%)	100	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Atas komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang ketiga kali pada tahun 2012.

I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Surabaya telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB baik sebagai akseptor KB maupun Peserta Program KB aktif.

Jumlah akseptor KB pada tahun 2011 sebesar 44.918 atau sebesar 9,46% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 474.973 dan dengan jumlah akseptor KB pada tahun 2012 sebesar 76.545 atau sebesar 15,88% dari jumlah PUS 481.915. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	474.973	481.915
2	Jumlah Akseptor KB	44.918	76.545
3	Rasio Akseptor KB (%)	9,46	15,88

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2011 sebesar 401.733 atau sebesar 84,58% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 474.973 dan dengan jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2012 sebesar 395.352 atau sebesar 82,04% dari jumlah PUS sebesar 481.915. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	474.973	481.915
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	401.733	395.352
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	84,58	82,04

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Menurunnya angka peserta program KB Aktif dikarenakan:

- a) Pertambahan PUS yang baru menikah;
- b) PUS yang masih usia produktif ingin menambah anak;
- c) Angka Drop Out KB jenis Pil, Suntik dan Kondom tidak terpantau secara optimal.

Pelayanan yang telah Pemerintah Kota Surabaya lakukan adalah fasilitasi kepada 1.417 sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kota (Sub PPKBK) dan 160 orang PPKBK yang kemudian disebut kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) berupa gebyar KB sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat/kader KB yang telah turut aktif mensukseskan Program KB di Surabaya. Selain hal tersebut diatas bagi keluarga miskin diberikan pelayanan KB berupa pelayanan KB *Implaby*, IUD, Pil, Suntik, Vasektomi (MOP), Tubektomi (MOW) dan kondom.

Dalam upaya menambah pengetahuan dan wawasan penyuluh/petugas lapangan sebanyak 110 orang diberi pembekalan pelatihan *Software* Sistem Informasi Manajemen bidang KB Aktif, dimana melalui software ini dapat diketahui jumlah peserta KB baru maupun jumlah peserta KB Aktif setiap metode kontrasepsi.

Atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Kencana Keluarga Berencana pada Tahun 2011 untuk pencapaian Keluarga Berencana terbaik.

Masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah memiliki angka kelahiran total yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan lebih tinggi. Upaya Pemerintah Kota mengendalikan laju pertumbuhan penduduk memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera(KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga maka keluarga tersebut diharapkan dapat meningkatkan gizi makanan, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
- 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih;
- 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah;
- 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 191.483 atau 29,25% dari jumlah keluarga sebesar 654.734 pada tahun 2011 dan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 189.246 atau 27,61% dari jumlah keluarga sebesar 685.468 pada tahun 2012. Penurunan angka keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya
 Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Keluarga	654.734	685.468
2	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	191.483	189.246
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	29,25	27,61

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

m. Sosial

Dari tahun 2012 jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan di Kota Surabaya adalah sejumlah 14.792 orang yang meliputi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, pelayanan di UPTD Pondok Sosial Kalijudan, UPTD Liponsos Kusta Babat Jerawat, UPTD Kampung Anak Negeri, UPTD Liponsos Keputih, pemberian permakanaan bagi Lansia sangat miskin dan terlantar, pemberian permakanaan bagi penyandang cacat miskin dan terlantar serta untuk korban bencana. Dari jumlah tersebut, jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun 2012 sejumlah 11.936 orang atau 80,69%. Secara rinci PMKS yang memperoleh bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48
 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Surabaya
 Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	1.453	14.792
2	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	1.700	11.936
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan (%)	117	80,69

Sumber: Dinas Sosial, 2013

Di tahun 2012 PMKS yang ada di Kota Surabaya sejumlah 42.236 orang terdiri dari 26 jenis yang diantaranya keluarga miskin, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik, tuna susila dan lain-lain. Dari jumlah yang ada, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial menangani sejumlah 16.241 orang. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pembinaan dan pelatihan kepada tuna susila, anak jalanan, penyandang cacat, gelandangan, pengemis, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan kepada lansia sangat miskin dan terlantar, pemberian permakanaan bagi penyandang cacat miskin dan terlantar serta pelayanan di Liponsos dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49
Penanganan PMKS Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah PMKS yang Ada	41.805	42.236
2	Jumlah PMKS yang Tertangani	33.937	16.241
3	Persentase PMKS yang Tertangani (%)	81,18	38,45

Sumber: Dinas Sosial, 2013

n. Ketenagakerjaan

Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami penurunan dari sebesar 0,69 di tahun 2011 menjadi 0,66 di tahun 2012, dengan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan jumlah angkatan kerja justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya angkatan kerja yang memilih melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi sebelum masuk ke dunia kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.475.147	1.419.677
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.152.931	2.147.116
3	Rasio angkatan kerja	0,69	0,66

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013

Jumlah perusahaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari sebanyak 11.359 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 11.760 perusahaan pada tahun 2012. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tersebut maka secara signifikan bertambah pula kompleksitas jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. yang pada tahun 2011 jumlah sengketa pekerja pengusaha sebanyak 213 meningkat cukup signifikan menjadi 388 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan banyaknya pengaduan terkait masalah jamsostek, upah murah, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja	213	388
2	Jumlah Perusahaan	11.359	11.760
3	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja (%)	1,88	3,30

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2013

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan berhasil ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2012 sebanyak 2.974 orang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 3.568 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan dari sisi permintaan lowongan pekerjaan pada pasar kerja formal, akibat peningkatan yang cukup signifikan dari segi upah pegawai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.52

Tabel 2.52
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Berhasil Ditempatkan	3.568	2.974
2	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi	6.985	6.081

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2013

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya mengalami penurunan dari 5,15% pada tahun 2011 menjadi 5,07% pada tahun 2012. Hal ini selain ditopang oleh semakin tumbuhnya wirausaha mandiri, juga disebabkan banyaknya pengangguran yang meneruskan pendidikan yang lebih tinggi sebelum masuk dunia kerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	75.954	71.997
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.475.147	1.419.677
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,15	5,07

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2013

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun 2012 sebesar 3.203 perusahaan dibandingkan tahun 2011 sebesar 3.103 perusahaan, mengalami kenaikan yang berbanding lurus dengan kenaikan jumlah perusahaan. Kenaikan jumlah perusahaan baru ini juga harus diimbangi sosialisasi intensif tentang penerapan norma kerja dan norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk mendorong pemahaman perusahaan dalam penerapan K3. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.103	3.203
2	Jumlah Perusahaan	11.359	11.760
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (%)	27,32	27,24

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2013

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi sampai dengan tahun 2012 adalah mencapai 1.548 atau meningkat 2,52% dibanding dengan tahun sebelumnya (1.510 Unit). Perkembangan jumlah koperasi secara kuantitas diikuti dengan perbaikan kualitas pengelolaan oleh pengurus-pengurus koperasi yang ada, dimana hal tersebut tercermin dari jumlah koperasi aktif di tahun 2012 yang mencapai 80,75%, sedangkan jumlah koperasi aktif pada tahun sebelumnya hanya mencapai 76,03%. Secara rinci disajikan pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Koperasi	1.510	1.548
2	Jumlah Koperasi Aktif	1.148	1.250
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	76,03	80,75

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2013

Pada tahun 2011, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 28.994 UMKM yang terdiri dari 19.882 usaha mikro, 6.956 usaha kecil dan 2.216 usaha menengah. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 27.926 UMKM yang terdiri dari 18.222 Usaha Mikro, 7.131 Usaha Kecil dan 2.573 Usaha Menengah. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin.

Secara umum terjadinya penurunan jumlah UMKM dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebanyak 1.068 unit disebabkan oleh berkurangnya jumlah pelaku usaha mikro. Secara rinci disajikan pada tabel 2.56

Tabel 2.56
Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Seluruh UMKM	28.994	27.926
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	26.778	25.353
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	92,36	90,79

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, 2013

p. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang maupun jasa yang berlanjut dengan suatu proses produksi. Dengan demikian investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi barang atau jasa

untuk di pasarkan kepada konsumen, serta menyebabkan adanya interaksi antara produsen (dalam hal ini investor) dan konsumen sehingga pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Jumlah Proyek PMDN dan PMA Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah PMDN	12	9
2	Jumlah PMA	20	15
3	Total	32	24

Sumber :Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2013

Jumlah investasi PMA dan PMDN di surabaya tahun 2012 terdapat 24 proyek, mengalami penurunan dibanding tahun 2011, namun dari segi nilai investasi dan tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan cukup signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Persetujuan		
1.1	Jumlah Proyek	75	73
1.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	1.388,95	4678,92
1.3	(USD Juta)	435,41	121,51
2	Realisasi		
2.1	Jumlah Proyek	32	24
2.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	748,13	4.695,08
2.3	(USD Juta)	25,43	11,18

Sumber :Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2013

Berdasarkan data perijinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM RI dan BPM Jatim, rencana investasi langsung PMA dan PMDN di Surabaya pada tahun 2012 menunjukkan minat investasi yang masih cukup tinggi dengan nilai investasi sebesar 4,76 trilyun rupiah dan 121,51 juta USD dimana rencana investasi paling besar pada sektor industri kertas dan barang dari kertas senilai kurang lebih 1,6 trilyun rupiah.

Adapun realisasi nilai investasi langsung di Kota Surabaya mencapai 4,695 trilyun rupiah dan 11,18 juta USD, hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2011, dengan investasi terbesar di sektor telekomunikasi tanpa kabel sebesar 3,6 trilyun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.184 orang.

Investasi/penanaman modal langsung (*direct investment*) berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Berikut ini rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung pada tabel 2.59.

Tabel 2.59
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	32	24
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	5.563	21.011
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	173,84	875,46

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2013

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN tahun 2012 terdapat 24 proyek PMA dan PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 21.011 orang, sehingga didapatkan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 875,46, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 dikarenakan realisasi investasi PMA dan PMDN pada sektor Telekomunikasi tanpa kabel mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (dengan nilai investasi cukup besar).

q. Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta. Pada tahun 2011 sebanyak 442 festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surabaya dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 493 festival seni dan budaya. Secara rinci disajikan pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	442	493

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Adapun sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi pada tahun 2012 terdapat 10 tempat yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan kesenian / berekspresi yaitu:

1. Gedung Merah Putih;
2. Gedung Nasional Indonesia;
3. Pendopo Agung di THP Kenjeran;
4. Panggung musik di THP Kenjeran;
5. Gedung serba guna di UPTD Ampel;
6. Gedung Ludruk di UPTD THR;
7. Gedung Srimulat di UPTD THR;
8. Gedung Pringgodani di UPTD THR;
9. Pendopo Utama di UPTD THR;
10. Teater terbuka di UPTD THR.

Secara rinci sarana penyelenggaraan seni dan budaya kota Surabaya disajikan pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	10	10

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs, kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Adapun jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,78% yaitu 180 pada tahun 2011 menjadi 185 pada tahun 2012 sebagaimana tabel 2.62.

Tabel 2.62
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kota Surabaya Tahun 2011 – 2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	180	185
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	180	185
3	Persentase Pelestarian (%)	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

r. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka pembinaan pemuda dan olahraga, ketersediaan prasarana kegiatan seperti gelanggang/balai remaja sangat dibutuhkan sebagai simpul-simpul pusat kegiatan

aktif remaja dan pemuda di perkotaan. Salah satu prasarana yang dimiliki dan merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya adalah Gedung Gelanggang Remaja di Kecamatan Tambaksari, yang masuk didalam Kawasan Kompleks Olahraga Gelora 10 Nopember yang masih aktif digunakan dalam kegiatan olahraga, kesenian, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu juga terdapat sekitar 116 gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) yang tersebar berada pada lingkungan kawasan militer, lingkungan perguruan tinggi, lingkungan pendidikan kedinasan, lingkungan perumahan dan pemukiman, fasilitas Pemerintah Provinsi dan KONI Provinsi Jawa Timur yang dapat digunakan warga dan masyarakat umum di Kota Surabaya. Sehingga rasio gelanggang/balai remaja sebesar 0,43 per 1000 penduduk pada tahun 2011 dan 0,42 per 1000 penduduk di tahun 2012 (tabel 2.63).

Tabel 2.63
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia Remaja (15-20 tahun)	269.966	279.498
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	116	116
3	Rasio Gelanggang/Balai Remaja	0,43	0,42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2013

Tercapainya prestasi olahraga tidak lepas dari pembinaan cabang olahraga dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar minimal dan memadai, prasarana olahraga yang berupa lapangan olahraga ataupun gedung olahraga yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari: Lapangan THOR, Lapangan Softball, Lapangan Hockey, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan 40 lapangan dibangun tahun 2011, dan 39 lapangan dibangun pada tahun 2012 yang merupakan lapangan olahraga untuk masyarakat yang berada di fasilitas umum permukiman dan perumahan. Selain itu terdapat juga lapangan maupun gelanggang lain yang tersebar berada pada lingkungan kawasan militer, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, KONI, maupun pemerintah provinsi dengan total jumlah 506 lapangan pada tahun 2012 (tabel 2.64).

Tabel 2.64
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah penduduk	3.023.680	3.125.576
2	Jumlah lapangan olahraga	497	506
3	Rasio lapangan olahraga	0,16	0,16

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas). Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang keberadaannya, sehingga nantinya seluruh Orkemas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jadi tiap organisasi kemasyarakatan (orkemas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, Orkemas akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang..

Pada tahun 2011, jumlah LSM aktif sebanyak 322 dari 423 yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2012 LSM yang sudah termasuk bagian dari Orkemas tercatat sebanyak 78 organisasi yang telah mendaftarkan keberadaannya. Bagi Orkemas yang telah mendapat SKT mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan bagi Orkemas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan didalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 akan dibekukan SKT-nya. Adapun pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.65

Tabel 2.65
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surabaya juga, telah melakukan pembinaan terhadap organisasi politik. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.66

Tabel 2.66
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1	2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Penegakan Perda

Salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam keberhasilan penegakan perda adalah tersedianya jumlah satuan polisi pamong praja yang memadai. Jumlah polisi pamong praja pada tahun 2011 sebanyak 525 orang dan pada tahun 2012 menjadi 505 orang yang terdiri dari 205 orang PNS dan 300 orang tenaga kontrak. Pada tahun 2011, rasio jumlah Satpol PP di Kota Surabaya adalah 1 orang Satpol PP untuk 5.760 penduduk, sedangkan di tahun 2012 jumlah rasio 1 orang Satpol PP untuk 6.189 penduduk (tabel 2.67).

Tabel 2.67
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	525	505
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,73	1,61

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2013

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2011, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 29 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2012 Jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami peningkatan yaitu sejumlah 90 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya (tabel 2.68).

Tabel 2.68
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Tahun	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3
2011	29 kali
2012	90 kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2013

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Dari Hasil pemantauan dan penertiban dapat diketahui jumlah pelanggaran perda/K3. Pada tahun 2011 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100%. Hal ini dapat menggambarkan kinerja aparat dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Demikian pula pada tahun 2012, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 72.251, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	60.011	72.251
2	Jumlah Pelanggaran K3	60.011	72.251
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2013

Anggota Linmas di kota Surabaya pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 37.330 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 3.024.321 orang maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 123 orang. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah linmas adalah sebanyak 37.048 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 118 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.125.576 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.70
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Linmas	37.330	37.048
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	123,43	118,53

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Surabaya dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan linmas dilakukan setiap tahun melalui berbagai upaya salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 3.024.321 orang, maka persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat adalah 1,23%, sementara pada tahun 2012 persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat adalah 1,18% dari total jumlah penduduk sebanyak 3.125.576. Semakin besar persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk, maka semakin besar ketersediaan petugas perlindungan masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.71.

Tabel 2.71
Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	37.330	37.048
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
3	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	1,23	1,19

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

Adanya penurunan persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 diantaranya disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Surabaya tidak dibarengi dengan ketersediaan potensi linmas yang memadai. Selain itu faktor lain adalah adanya petugas perlindungan masyarakat yang sudah bekerja di tempat lain dan sudah berpindah alamat.

- Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang positif, dan mampu menjadi pendorong bagi perekonomian provinsi maupun nasional. Stabilitas keamanan serta proyek-proyek infrastruktur yang secara intensif dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi insentif meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kota ini. Pada tahun 2011, Surabaya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,56% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi (7,22%) dan nasional (6,5%). Di tahun 2012 catatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya (7,62%) kembali lebih tinggi daripada Jawa Timur (7,27%) dan Nasional (6,23%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.72.

Tabel 2.72
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	PDRB (n)	94.471.049,66	101.671.633,57
2	PDRB (n-1)	87.828.841,77	94.471.049,66
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,56	7,62

Sumber: BPS Kota Surabaya; *) Data sementara, Maret 2013

- Pelayanan Publik

Sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan online disajikan pada tabel 2.73 sebagai berikut.

Tabel 2.73
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Online Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	4	5
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	1	4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2013

Sistem informasi pelayanan perijinan/non perijinan secara online yang dibangun pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2012 yaitu :

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Ijin Gangguan (HO);
3. Perijinan Jenazah;
4. Ijin Pemakaian Tanah Sempadan;
5. Ijin Pemakaian Tanah;
6. Retribusi/Sewa Rumah Susun;
7. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
8. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
9. Rekomendasi Menara Telekomunikasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disajikan pada tabel 2.74.

Tabel 2.74
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Survey IKM	Ada	Ada

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2013

Penyusunan IKM mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BPS, diperoleh 15 unsur yang menjadi acuan pengukuran IKM. Kelimabelas unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan;
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kecepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan;
10. Keramahan petugas dalam pelayanan;
11. Kewajaran biaya pelayanan;
12. Kepastian biaya pelayanan;
13. Kepastian jadwal pelayanan;
14. Kenyamanan lingkungan;
15. Keamanan pelayanan.

Survey IKM ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (pelanggan) secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan publik sebagai penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Kedepan diharapkan terwujudnya kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Survey IKM tahun 2012 dilaksanakan pada 31 Kecamatan, 62 Puskesmas dan 20 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya, antara lain Badan Arsip dan Perpustakaan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematuan, Dinas Tenaga Kerja, PDAM, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. M. Soewandhie. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kecamatan sejumlah 23 Kecamatan masuk kategori baik dan 8 Kecamatan masuk kategori sangat baik, serta untuk Puskesmas sejumlah 55 Puskesmas masuk kategori baik dan 7 Puskesmas masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 20 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya keseluruhannya masuk dalam kategori baik.

Pelayanan publik lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 3.024.321 orang, maka persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,0016%, sedangkan pada tahun 2012 persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,0018%, dari total jumlah penduduk sebanyak 3.125.576 orang sebagaimana tabel 2.75.

Tabel 2.75
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	49	55
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	0,0016	0,0018

Sumber: Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2013

Sepanjang tahun 2011 tercatat telah terjadi 366 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 305 kejadian. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah kejadian kebakaran lebih banyak dibanding tahun 2011 yaitu 539 kejadian tetapi jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 433 kejadian sebagaimana tabel 2.76 dan 2.77.

Tabel 2.76
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah
Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	305	433
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	366	539

Sumber: Dinas Kebakaran, 2013

Tabel 2.77
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	15	17
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576

Sumber: Dinas Kebakaran, 2013

- Aparatur dan Pemerintahan

Pada tahun 2012 jumlah aparat yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur pemerintahan mengalami penurunan dari tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel pelanggaran disiplin aparatur pemerintah Kota Surabaya selama tahun 2011 – 2012 jumlah sanksi yang diberikan terus menurun . Pada tahun 2011 terdapat 92 aparat yang mendapatkan sanksi, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 56 orang aparat yang mendapatkan sanksi. Penurunan pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Kota Surabaya tersebut menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya serta menunjukkan kesadaran disiplin dan ketaatan aparat Pemerintah Kota Surabaya pada peraturan yang ada. Secara rinci disajikan pada tabel 2.78.

Tabel 2.78
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011 – 2012

No	Jenis Sanksi	Tahun 2011 (Jumlah Orang)	Tahun 2012 (Jumlah Orang)
1.	Tegoran Lisan	1	-
2.	Tegoran Tertulis	14	5
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	8	4
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling Lama 1 (satu) tahun	10	11
5.	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun (PP 30 Tahun 1980)	-	-
6.	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling Lama 1 (satu) tahun	4	3

No	Jenis Sanksi	Tahun 2011 (Jumlah Orang)	Tahun 2012 (Jumlah Orang)
7.	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	9	2
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	1
9.	Pembebasan dari jabatan	8	4
10.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	15	5
12	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	7	12
13	Pemberhentian tidak dengan hormat	-	-
14	Pemberhentian senentara (PP No. 04 Tahun 1966)	4	-
15	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS (karena sanksi) PP 11 Tahun 2001	6	2
16	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun	6	7
17	Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri / Pensiun dini / Mengundurkan diri	-	-
18	Pemberhentian sementara (PP No. 04 Tahun 1966)	-	-
19	Pemberhentian dengan hormat karena menjadi anggota Parpol	-	-
20	Pencabutan pemberhentian sementara	-	-
21	Rehabilitasi	-	-
Jumlah		92	56

Sumber : Inspektorat, 2013

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, disamping itu pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indiscipliner merupakan langkah yang berimplikasi kepada seluruh pegawai.

Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya melalui anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembangunan 5 sistem informasi manajemen guna mendukung kinerja pemerintah kota Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Surabaya. Kelima sistem tersebut yaitu:

1. *Dashboard* Pelayanan Kesehatan, merupakan sistem informasi manajemen yang berisi data kompilasi tentang layanan kesehatan yang disajikan dalam bentuk grafik. Data-data yang diproses dalam sistem ini berasal dari puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi para pemangku kebijakan sebagai bahan dalam pengambilan suatu kebijakan;

2. Sistem antrian di puskesmas yang terintegrasi dengan data kependudukan merupakan sistem antrian bagi pasien yang menggunakan NIK atau sidik jari pasien;
3. Sistem monitoring data obat merupakan aplikasi untuk monitoring transaksi data obat;
4. Modul OK (*Operatie Kamer*) dan VK (*Verlos Kamer*) merupakan aplikasi data transaksi dan rekam medis pasien;
5. Sistem hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan TIK.

Sistem Informasi Manajemen Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79
Sistem Informasi Manajemen Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang Telah Dibuat	10	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2013

u. Ketahanan Pangan

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 411.545.650 kg dalam setahun, dengan jumlah penduduk sebesar 3.024.321 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita per tahun sebesar 136,08 kg/kapita/th. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah ketersediaan pangan sebesar 410.070.970 kg dalam setahun, dengan jumlah penduduk sebesar 3.125.576 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita per tahun sebesar 131,20 kg/kapita/th (tabel 2.80)

Tabel 2.80
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (kg/th)	411.545.650	410.070.970
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.024.321	3.125.576
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	136,08	131,20

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2013

Tingkat konsumsi beras masyarakat Jawa Timur pada tahun 2011 berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur rata-rata sebesar 88,6 kg/kapita/th. Dengan asumsi bahwa tingkat konsumsi beras masyarakat di kota Surabaya sama dengan tingkat konsumsi beras masyarakat Jawa Timur maka rata-rata ketersediaan pangan (beras)/kapita/th pada tahun 2011 maupun 2012 tersebut diatas masih dapat mencukupi tingkat konsumsi masyarakat kota Surabaya.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam

memberdayakan masyarakat. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c) Pengembangan kemitraan; dan
- d) Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b) Lembaga Adat;
- c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d) RT/RW;
- e) Karang Taruna;
- f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan adalah LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan) dan Pemerintah Kota Surabaya mengakomodir dalam bentuk LKMK yaitu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. LKMK mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

LKMK dibentuk di setiap kelurahan di daerah. Jumlah LKMK di Kota Surabaya sebanyak 160 pada tahun 2011 dan 2012. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.81 sebagai berikut.

Tabel 2.81
Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	Jumlah LKMK	
		2011	2012
1	Asemrowo	5	5
2	Benowo	5	5
3	Bubutan	5	5
4	Bulak	5	5
5	Dukuh Pakis	4	4

No	Kecamatan	Jumlah LKMK	
		2011	2012
6	Gayungan	4	4
7	Genteng	5	5
8	Gubeng	6	6
9	Gununganyar	4	4
10	Jambangan	4	4
11	Karngpilang	4	4
12	Kenjeran	4	4
13	Krembangan	5	5
14	Lakarsantri	6	6
15	Mulyorejo	6	6
16	Pabean Cantian	5	5
17	Pakal	5	5
18	Rungkut	6	6
19	Sambikerep	4	4
20	Sawahan	6	6
21	Semampir	5	5
22	Simokerto	5	5
23	Sukolilo	7	7
24	Sukomanunggal	6	6
25	Tambaksari	8	8
26	Tandes	6	6
27	Tegalsari	5	5
28	Tenggilis Mejoyo	5	5
29	Wiyung	4	4
30	Wonocolo	5	5
31	Wonokromo	6	6
	JUMLAH	160	160

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan meliputi Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dimana pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma, RW dan RT. Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.82.

Tabel 2.82
Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK
1	Asemrowo	5	578	115,60	5	591	118,20
2	Benowo	5	726	145,20	5	733	146,60
3	Bubutan	6	1553	258,83	6	761	126,83
4	Bulak	5	584	116,80	5	795	159,00
5	Dukuh Pakis	4	698	174,50	4	745	186,25
6	Gayungan	6	697	116,17	6	1118	186,33
7	Genteng	6	1016	169,33	6	1293	215,50
8	Gubeng	5	1911	382,20	5	1553	310,60
9	Gununganyar	5	649	129,80	5	1017	203,40
10	Jambangan	5	864	172,80	5	2751	550,20
11	Karngpilang	5	900	180,00	5	1534	306,80
12	Kenjeran	4	3656	914,00	4	729	182,25
13	Krembangan	4	1600	400,00	4	697	174,25
14	Lakarsantri	4	703	175,75	4	864	216,00
15	Mulyorejo	4	919	229,75	4	900	225,00
16	Pabean Cantian	6	1711	285,17	6	3679	613,17
17	Pakal	4	723	180,75	4	817	204,25
18	Rungkut	5	1498	299,60	5	1241	248,20
19	Sambikerep	6	745	124,17	6	2858	476,33
20	Sawahan	6	3679	613,17	6	1954	325,67
21	Semampir	4	3974	993,50	4	649	162,25
22	Simokerto	6	2751	458,50	6	919	153,17
23	Sukolilo	6	1781	296,83	6	1587	264,50
24	Sukomanunggal	7	1109	158,43	7	1781	254,43
25	Tambaksari	8	2854	356,75	8	2854	356,75
26	Tandes	5	1293	258,60	5	1201	240,20
27	Tegalsari	5	1534	306,80	5	584	116,80
28	Tenggilis Mejoyo	4	983	245,75	4	3656	914,00
29	Wiyung	5	816	163,20	5	2008	401,60
30	Wonocolo	5	1241	248,20	5	1711	342,20
31	Wonokromo	5	2858	571,60	5	3974	794,80
	JUMLAH	160	46604	291,28	160	47554	297,21

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Jumlah kelompok binaan PKK Kota Surabaya sebanyak 46.604 atau rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 291,28 pada tahun 2011 dan 47.554 atau rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 297,21 pada tahun 2012 dari jumlah PKK sebanyak 160. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk

ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.83.

Tabel 2.83
Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah PKK	160	160
2	Jumlah Kelompok Binaan	46.604	47.554
3	Rata-rata Jumlah PKK	291,28	297,21

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Jumlah PKK aktif di Pemerintah Kota Surabaya mencapai 160 atau 100%. Besarnya jumlah PKK aktif menunjukkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah (tabel 2.84 dan 2.85).

Tabel 2.84
PKK Aktif menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
1	Asemrowo	5	5	100	5	5	100
2	Benowo	5	5	100	5	5	100
3	Bubutan	6	6	100	6	6	100
4	Bulak	5	5	100	5	5	100
5	Dukuh Pakis	4	4	100	4	4	100
6	Gayungan	6	6	100	6	6	100
7	Genteng	6	6	100	6	6	100
8	Gubeng	5	5	100	5	5	100
9	Gununganyar	5	5	100	5	5	100
10	Jambangan	5	5	100	5	5	100
11	Karngpilang	5	5	100	5	5	100
12	Kenjeran	4	4	100	4	4	100
13	Krembangan	4	4	100	4	4	100
14	Lakarsantri	4	4	100	4	4	100
15	Mulyorejo	4	4	100	4	4	100
16	Pabean Cantian	6	6	100	6	6	100
17	Pakal	4	4	100	4	4	100
18	Rungkut	5	5	100	5	5	100
19	Sambikerep	6	6	100	6	6	100
20	Sawahan	6	6	100	6	6	100
21	Semampir	4	4	100	4	4	100
22	Simokerto	6	6	100	6	6	100
23	Sukolilo	6	6	100	6	6	100

No	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
24	Sukomanunggal	7	7	100	7	7	100
25	Tambaksari	8	8	100	8	8	100
26	Tandes	5	5	100	5	5	100
27	Tegalsari	5	5	100	5	5	100
28	Tenggilis Mejoyo	4	4	100	4	4	100
29	Wiyung	5	5	100	5	5	100
30	Wonocolo	5	5	100	5	5	100
31	Wonokromo	5	5	100	5	5	100
	Jumlah	160	160	100	160	160	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Tabel 2.85
PKK Aktif Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah PKK	160	160
2	Jumlah PKK Aktif	160	160
3	Persentase PKK aktif (%)	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Posyandu aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.86.

Tabel 2.86
Posyandu Aktif Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Posyandu	2.794	2.808
2	Jumlah Posyandu Aktif	2.794	2.808
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Jumlah posyandu di Kota Surabaya pada tahun 2011 sebanyak 2.794 unit dengan status posyandu aktif 100% sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.808 unit dengan status posyandu aktif 100%. Secara kuantitatif jumlah posyandu maupun jumlah kader sudah memenuhi standar yang ditetapkan dan perlu diimbangi dengan kualitas posyandu maupun kadernya. Meningkatnya jumlah posyandu aktif menggambarkan keaktifan

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Pemerintah Kota Surabaya melalui posyandu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:

- a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kelompok program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagi Pemerintah Kota Surabaya permasalahan keluarga miskin tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kaum perempuan yang ada dalam keluarga miskin tersebut. Oleh karenanya peran perempuan harus ditingkatkan dalam peningkatan kualitas kehidupan keluarga miskin. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya memberdayakan perempuan dari keluarga miskin melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan. Pada tahun 2011, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 391 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau 69,82% dari 560 total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat dan pada tahun 2012, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 177 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau 63,21% dari 280 total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. KSM yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat terdiri dari bidang usaha makanan, *handycraft* dan aneka usaha sesuai dengan fasilitasi pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pasca program berupa Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat adalah KSM yang aktif melakukan usaha ekonomi produktif (tabel 2.87).

Tabel 2.87
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	560	280
2	Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	391	177
3	% Program Pemberdayaan Masyarakat	69,82	63,21

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2013

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas). Adapun jumlah Orkemas pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.88:

Tabel 2.88
Jumlah LSM Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah LSM Aktif	322	78
2	Jumlah LSM Tidak Aktif	101	-
3	Jumlah LSM Terdaftar	423	78

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang keberadaannya, sehingga nantinya seluruh Orkemas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jadi tiap organisasi kemasyarakatan (orkemas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, Orkemas akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari

lembaga yang berwenang. Bagi Orkemas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan bagi Orkemas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan didalam pasal 25 Permendagri nomor 33 tahun 2012 akan dibekukan SKT-nya.

Dari data diatas dapat dilihat dengan adanya Permendagri nomor 33 tahun 2012 jumlah LSM dari tahun 2011 dan 2012 menurun drastis disebabkan karena adanya aturan baru yang menyebutkan tentang definisi dan persyaratan Orkemas, disamping itu Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran ulang ke Bakesbangpol dan Linmas sesuai dengan Permendagri tersebut baru sebanyak 78 Organisasi Masyarakat.

w. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Program yang dijalankan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah adalah program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan indikatornya adalah persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku).

Arsip pola baru (sistem baku) adalah arsip yang mempergunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip dan jadwal retensi sebagai sarana penyusutan. Yang dimaksud kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian penemuan kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip ke arsip nasional. Sedangkan yang dimaksud pola klasifikasi kearsipan sebagai sarana penataan arsip disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas semua unit organisasi pemerintah daerah dengan pola klasifikasi mulai 000 s/d 900 yang meliputi umum, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagaan, pengawasan, kepegawaian, dan keuangan. Dan yang dimaksud jadwal retensi sebagai sarana penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindahkan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional. SKPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan SKPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, *filling cabinet*, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar, folder kecil beserta skatnya. Data pengelolaan arsip secara baku selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89
Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	79	117
2	Jumlah SKPD	232	232
3	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	34	50

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2011 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 79 SKPD. Sehingga sampai dengan tahun 2012 dari 232 SKPD yang ada (sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009) terdapat sebanyak 117 SKPD atau 50 % yang telah menerapkan arsip secara baku. Agar seluruh SKPD dapat menerapkan arsip secara baku, pemerintah kota berupaya terus melaksanakan pembekalan, pelatihan, pendampingan, lomba, evaluasi dan penyusunan jadwal retensi arsip.

Berikut ini adalah tabel 2.90 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan kota Surabaya selama tahun 2011-2012.

Tabel 2.90
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	6	6

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pembekalan, pelatihan, pendampingan, evaluasi, lomba sistem tata kearsipan pola baru dan penyusunan jadwal retensi arsip. Pada tahun 2012 telah dilakukan pembekalan dan pelatihan pada kelurahan dengan materi yang disampaikan diantaranya yaitu Pelatihan Arsip Masuk Kelurahan yang meliputi tata cara metode pemberkasan arsip, kode klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip (JRA), sarana pemberkasan, sistem penemuan kembali, penyusunan pola klasifikasi dan sistematika penyusunan JRA.

Pada tahun 2012 SKPD yang didampingi dan mendapat monitoring sebanyak 117 SKPD, sedangkan yang belum mendapat pendampingan dan monitoring sebanyak 115 SKPD. Pendampingan dan monitoring dilakukan dengan penerapan penggunaan sistem pola baru yang akan dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah; menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; menjamin

terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kearsipan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih predikat juara ke-1 Lomba Lembaga Kearsipan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

x. Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung pertukaran data antar SKPD, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai mekanisme penyediaan jaringan telekomunikasi yaitu melalui pembangunan dan pemanfaatan jasa sewa jaringan dari pihak swasta. Untuk pembangunan jaringan telekomunikasi, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun jaringan fiber optik sepanjang ± 48 km sebagai jaringan utama dan 103 unit menara telekomunikasi sebagai *back up link*. Pembangunan jaringan utama akan dilanjutkan secara bertahap hingga semua SKPD terlayani sedangkan untuk menara telekomunikasi yang sudah terbangun akan dipelihara secara kontinu setiap tahun seperti pengecekan struktur, *sling*, dan *grounding* menara untuk memastikan kondisi menara agar selalu berfungsi dengan baik. Pada tahun 2012 jumlah menara telekomunikasi menjadi 97 unit, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terjadi renovasi gedung di 5 puskesmas dan 1 kecamatan, sehingga menyebabkan menara tersebut harus direlokasi ke tempat lain dan akan didirikan kembali setelah renovasi gedung tersebut selesai (tabel 2.91).

Tabel 2.91
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Menara (Tower) (unit)	103	97

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2013

Di era keterbukaan publik sekarang ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikannya dengan membangun sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya melalui website pemerintah kota surabaya yaitu www.surabaya.go.id. Website tersebut menjadi portal informasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti informasi terkait kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Surabaya, pengaduan masyarakat, dan perijinan/non perijinan online (tabel 2.92).

Tabel 2.92
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2013

y. Perpustakaan

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca. Selain itu perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik, melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan masyarakat (TBM). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.93.

Tabel 2.93
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Perpustakaan Milik Pemda	1	1
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	58	59
3	Total	59	60

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013

Berdasarkan data tersebut diatas pada tabel 2.93 pada tahun 2011 hingga tahun 2012 jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah sebanyak 1 unit sedangkan perpustakaan milik non pemerintah daerah pada tahun 2011 sebanyak 58 unit sampai dengan pada tahun 2012 terdapat penambahan 1 unit menjadi 59 unit.

Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1.506.592 orang, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.147.829 orang. Pada Tahun 2011 jumlah anggota baru sebanyak 3.265 orang sehingga rata-rata perbulan sebanyak 272 orang sedangkan pada Tahun 2012 jumlah anggota baru sebanyak 6049 orang dan rata-rata perbulan sebanyak 504 Orang. Jumlah pengunjung perpustakaan ini antara lain adalah pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan keliling. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemkot	1.506.592	2.147.829

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013

Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung layanan baca maka diperlukan pula penambahan jumlah koleksi buku, hal ini untuk memperkaya koleksi bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan minat membaca masyarakat. Data tentang Penambahan Koleksi Buku Baru di Perpustakaan Daerah Kota Surabaya disajikan pada tabel 2.95 berikut:

Tabel 2.95
Penambahan Koleksi Buku Baru di Perpustakaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penambahan Koleksi Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	119.796	117.922
2	Jumlah Penambahan Koleksi Judul Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	11.396	11.183
3	Rasio Koleksi Judul Buku	0,10	0,09

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013

Pada tahun 2011, jumlah penambahan koleksi buku baru yang tersedia sebanyak 119.796 buku dan penambahan jumlah koleksi judul buku baru yang tersedia sebanyak 11.396 buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 10 buku. Pada tahun

2012, penambahan jumlah koleksi buku baru sebanyak 117.922 buku dan penambahan jumlah koleksi judul buku baru sebanyak 11.183 judul buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 9 buku. Sehingga, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 jumlah koleksi buku sebanyak 452.696 buku dan jumlah koleksi judul buku sebanyak 98.236 judul buku.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan yaitu Perpustakaan “Ngagel Rejo” Kelurahan Ngagel, meraih predikat Juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Juara I *Cluster A* Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional pada Tahun 2012.

FOKUS URUSAN PILIHAN

a. Pertanian

Berikut ini adalah data tentang kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB sebagaimana tabel 2.96.

Tabel 2.96
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/Perkebunan (Juta Rp)	178.517,17	192.101,26
2.	Jumlah PDRB (Juta Rp)	235.257.223,66	264.750.412,16
3.	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB (%)	0,08	0,07

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013

Ket. : *) Data sementara

Jumlah kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari sektor pertanian dibandingkan terhadap jumlah PDRB ADHB Kota Surabaya sangat kecil yaitu 0,08% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 0,07% pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan perkembangan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa dimana pengembangan sektor pertanian mengarah ke pemanfaatan ruang terbuka hijau atau areal yang terlantar/pekarangan untuk kegiatan produktif.

Sedangkan data tentang kontribusi sektor pertanian (palawija) disajikan pada tabel 2.97 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1.	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Palawija) (ton)	726,16	454,74

No.	Uraian	2011	2012
2.	Jumlah Total Produksi Sektor Pertanian/Perkebunan (ton)	20.584,66	23.939,72
3.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) (%)	3,53	1,90

Sumber: Dinas Pertanian dan BPS Kota Surabaya, 2013

Jumlah produksi sektor pertanian tanaman palawija Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan yaitu 37,38% dari produksi sebesar 726,16 ton pada tahun 2011 menjadi 454,74 ton pada tahun 2012. Sedangkan jumlah total produksi sektor pertanian/perkebunan terjadi kenaikan sebesar 16,30% yaitu dari 20.584,66 ton menjadi 23.939,72 ton. Jika dilihat berdasarkan prosentase maka terjadi penurunan yaitu dari 3,53% menjadi 1,90%.

Bahan pangan utama masyarakat Kota Surabaya tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam daerah karena keterbatasan lahan pertanian di kawasan perkotaan. Tingginya alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan terjadi penurunan pada luas areal pertanian tanaman padi sebesar 2,08% yaitu dari 1.634 Ha pada tahun 2011 menjadi 1.600 Ha pada tahun 2012. Jika dilihat dari sisi produktivitas berdasarkan hasil ubinan Dinas Pertanian yang bekerjasama dengan BPS Kota Surabaya, pertanian tanaman pangan (padi) mengalami penurunan sebesar 0,83% yaitu dari 6,01 ton/ha menjadi 5,96 ton/ha. Dari perhitungan tersebut, jumlah produksi tanaman padi mengalami penurunan sebesar 11,93% yaitu dari 15.541,34 ton pada tahun 2011 menjadi 13.687,41 ton pada tahun 2012. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.98.

Tabel 2.98
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	15.541,34	13.687,41
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.634,00	1.600,00
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,01	5,96

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Dibandingkan tahun 2011, sebagian besar komoditi pertanian mengalami penurunan produksi yaitu pada komoditi padi, lombok dan sayur. Padi mengalami penurunan sebesar 11,93% yaitu dari 15.541,34 ton pada tahun 2011 menjadi 13.687,41 ton. Komoditi lombok mengalami penurunan yang cukup signifikan 86,84% dari 442,2 ton menjadi 58,2 ton. Komoditi sayur mengalami penurunan sebesar 54,78% yaitu dari 1.053,32 ton pada tahun 2011 menjadi 476,3 ton pada tahun 2012. Sedangkan produksi tanaman buah mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 189,77% yaitu dari 3.237 ton menjadi 9.380 ton. Komoditi jagung mengalami sedikit kenaikan sebesar 8,69% yaitu dari 310,8 ton menjadi 337,81 ton (tabel 2.99).

Tabel 2.99
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	15.541,34	13.687,41
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	310,80	337,81
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	442,20	58,20
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	1.053,32	476,30
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.237,00	9.380,00

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Penurunan yang signifikan terutama untuk komoditi lombok disebabkan antara lain penggunaan bahan anorganik/bahan kimia untuk pestisida maupun pupuk yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan kandungan unsur hara tanah dan mengakibatkan tanaman rentan penyakit. Selain itu, terjadi perubahan alih fungsi lahan pertanian sehingga luas areal tanam untuk tanaman pangan dan hortikultura berkurang.

b. Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada tabel 2.100 belum memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada obyek wisata lainnya seperti Mangrove Wonorejo, tempat-tempat hiburan, tempat wisata kuliner dan sebagainya.

Tabel 2.100
Obyek Kunjungan Wisata Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011		2012	
		Jumlah Kunjungan	Persentase (%)	Jumlah Kunjungan	Persentase (%)
1	THP Kenjeran	297.941	6,98	228.564	9,16
2	Kenjeran Park	600.280	14,07	364.408	14,61
3	Taman Prestasi	79.110	1,85	18.029	0,72
4	Taman Hiburan Rakyat	41.896	0,98	21.936	0,88
5	Taman Remaja Surabaya	433.762	10,17	233.060	9,34
6	Monumen Tugu Pahlawan	104.431	2,45	91.268	3,66
7	Kawasan Wisata Religi Ampel	1.191.984	27,94	786.835	31,54
8	Masjid Al-Akbar	51.485	1,21	17.465	0,7
9	Masjid Cheng Ho	17.956	0,42	9.627	0,39
10	Kebun Binatang	1.000.322	23,45	391.181	15,68
11	Monumen Kapal Selam	8.993	0,21	7.031	0,28
12	Monumen Jalesveva Jayamahe	36.767	0,86	19.381	0,78
13	Loka Jala Srana	33.396	0,78	17.822	0,71
14	Makam WR. Soepratman	1.394	0,033	440	0,02

No.	Uraian	2011		2012	
		Jumlah Kunjungan	Persentase (%)	Jumlah Kunjungan	Persentase (%)
15	Makam DR. Soetomo	1.438	0,034	250	0,01
16	Patung Djoko Dolog	1.100	0,026	1.088	0,04
17	Balai Pemuda	58.953	1,38	31.398	1,26
18	House Of Sampoerna	110.153	2,58	78.029	3,13
19	Ciputra Water Park	191.126	4,48	175.125	7,02
20	Museum Kesehatan	3.313	0,08	1.940	0,08
	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	4.266.521	100	6.721.132	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Dari data pada tabel 2.100 pada tahun 2011 dan tahun 2012 kunjungan wisatawan terbanyak ada pada kawasan wisata Religi Ampel, Kebun Binatang, Kenjeran Park, Taman Remaja Surabaya dan THP Kenjeran.

Dalam bidang pariwisata pemerintah kota Surabaya senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara melalui kegiatan promosi, menjalin kerjasama dengan biro perjalanan serta melakukan perbaikan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata di Kota Surabaya. Upaya tersebut memberikan hasil yang positif yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 4,34% yaitu dari 9.473.346 pada tahun 2011 menjadi 9.884.918 pada tahun 2012 (tabel 2.101)

Tabel 2.101
Kunjungan Wisata Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Seluruh Kunjungan Wisata	9.473.346	9.884.918

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Pada tahun 2011 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar Rp34.717.586,39,- atau sebesar 14,76% dari total PDRB sebesar Rp235.257.223,66 juta. Sedangkan pada tahun 2012 kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar Rp38.686.168,47 juta atau sebesar 14,61% dari total PDRB sebesar Rp264.750.412,14 juta. Kontribusi yang meningkat menunjukkan bahwa aktifitas dibidang pariwisata juga meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.102.

Tabel 2.102
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (Juta Rp)	34.717.586,39	38.686.168,47
2.	Jumlah PDRB (Juta Rp)	235.257.223,66	264.750.412,16
3.	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (%)	14,76	14,61

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2013

c. Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan secara total mengalami penurunan sebesar 2,19% dari 16.240,95 ton pada tahun 2011 menjadi 15.885,47 ton pada tahun 2012. Penurunan produksi terjadi pada hasil produksi perikanan tambak dan perikanan laut. Pada perikanan laut disebabkan penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran maupun perubahan cuaca (anomali iklim) yang berakibat pada penurunan jumlah tangkapan sebesar 1,25% dari 7.119,89 ton menjadi 7.031,16 ton. Dampak perubahan cuaca ini juga dirasakan pada usaha tambak sehingga terjadi penurunan produksi sebesar 4,28% dari 7.932,84 ton menjadi 7.593,18 ton, selain karena faktor terjadinya alih fungsi lahan pertambakan untuk kawasan non produktif (tabel 2.103).

Tabel 2.103
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)	
		2011	2012
1.	Perikanan Laut	7.119,89	7.031,16
2.	Perikanan Tambak	7.932,84	7.593,18
3.	Perairan umum	264,55	269,27
4.	Kolam	923,67	991,86
	Jumlah	16.240,95	15.885,47

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Jumlah konsumsi ikan di kota Surabaya pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,56% yaitu dari 24,70 kg/kap/thn menjadi 26,32 kg/kap/thn. Sedangkan capaian terhadap target nasional juga mengalami kenaikan yaitu dari 78,07% pada tahun 2011 menjadi 81,26% pada tahun 2012. Dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan berbagai kegiatan yaitu gerakan gemar makan ikan, urban farming bidang perikanan serta melalui kegiatan pengembangan diversifikasi pangan produk perikanan (tabel 2.104).

Tabel 2.104
Konsumsi Ikan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	24,70	26,32
2	Target Daerah (kg/kap/thn)	31,64	32,39
3	Persentase Konsumsi Ikan (%)	78,07	81,26

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Cakupan bina kelompok nelayan diperhitungkan dari jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan seperti perahu, mesin perahu, jaring dan lain-lain. Pada tahun 2012, cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan sebesar 16,68% yaitu dari 46,15% pada tahun 2011 menjadi 53,85% (tabel 2.105)

Tabel 2.105
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemkot (kelompok)	12	14
2	Jumlah Kelompok Nelayan (kelompok)	26	26
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	46,15	53,85

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan yang berada di bawah binaan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan adanya penurunan dari segi jumlah (kuantitas) sebesar 1,25% yaitu dari 7.119,89 ton pada tahun 2011 menjadi 7.031,16 ton pada tahun 2012. Namun jika dilihat dari persentase terhadap jumlah produksi ikan di daerah, terjadi kenaikan sebesar 0,96%. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah produksi ikan daerah secara total lebih besar yaitu 2,19% dari 16.241 ton menjadi 15.885,47 ton (tabel 2.106).

Tabel 2.106
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan (ton)	7.119,89	7.031,16
2	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	16.241	15.885,47
3	Persentase Produksi Ikan Kelompok Nelayan (%)	43,84	44,26

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Berikut ini adalah tabel tentang Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB dan Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Sektor Pertanian sebagaimana tersaji pada tabel 2.107 dan 2.108.

Tabel 2.107
Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB ADHB
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sub Sektor Perikanan (Juta Rp)	147.758,30	158.831,87
2	Jumlah PDRB (Juta Rp)	235.257.223,66	264.750.412,16
3	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB ADHB (%)	0,06	0,06

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 (diolah)

Ket : *) Data sementara

Tabel 2.108
Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB ADHB Sektor Pertanian
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Jumlah Kontribusi PDRB ADHB dari Sub Sektor Perikanan (Juta Rp)	147.758,30	158.831,87
2	Jumlah Kontribusi PDRB ADHB dari Sektor Pertanian (Juta Rp)	178.517,17	192.101,26
3	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB ADHB Sektor Pertanian (%)	82,77	82,68

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 (diolah)

Ket : *) Data sementara

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terhadap jumlah PDRB Kota Surabaya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,06%. Namun apabila ditinjau dari jumlah kontribusi PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB ADHB sektor pertanian terjadi penurunan dari 82,77% pada tahun 2011 menjadi 82,68% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pada PDRB sektor pertanian di kota Surabaya berasal dari sub sektor perikanan meskipun kontribusi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,11%.

d. Perdagangan

Berikut ini adalah tabel tentang Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebagaimana tersaji pada tabel 2.109.

Tabel 2.109
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (Juta Rp)	69.821.310,80	79.886.018,79
2	Jumlah PDRB (Juta Rp)	235.257.223,66	264.750.412,16
3	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	29,68	30,17

Sumber: BPS Kota Surabaya; *) Data sementara, Maret 2013

Meningkatnya PDRB dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) didukung oleh peningkatan dari nilai PDRB dari subsektor perdagangan yang merupakan

kontributor terbesar dibandingkan dengan subsektor hotel maupun restoran. Sepanjang tahun 2012, pembentukan PDRB dari subsektor ini mencapai Rp79.886.018,79 juta atau 30,17% dari total PDRB Kota Surabaya. Jika dibandingkan dengan nilai PDRB sektor PHR sendiri yang mencapai Rp116.887.398,40 juta maka peranan dari subsektor perdagangan sebesar 68,34% atau jauh lebih besar dari dua subsektor pembentuk lainnya.

Sejak pertengahan tahun 2011 kinerja ekspor menunjukkan kondisi yang mulai menurun, sebagai dampak dari belum membaiknya perekonomian global pasca krisis keuangan di Amerika dan beberapa negara di Eropa. Hingga akhir tahun 2011 neraca perdagangan internasional Kota Surabaya memiliki surplus US\$ 1.574.057.682,00. Akan tetapi, melemahnya daya beli negara-negara yang terdampak krisis menyebabkan arus perdagangan internasional bergerak melambat. Bahkan hingga nilai kumulatif ekspor Kota Surabaya bulan Januari hingga Desember 2012 hanya sebesar US\$ 15.448.541.322,00 atau lebih rendah dari kumulatif impornya yang mencapai US\$ 16.852.596.453,00. Sehingga neraca perdagangan kali ini mengalami defisit US\$ 1.404.055.130,00. Komposisi komoditas yang diimpor ke Kota Surabaya sebagian besar adalah barang baku dan barang modal yang digunakan untuk mendukung proses produksi (tabel 2.110)

Tabel 2.110
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

Sumber:

Dinas
Perdagangan
dan

No.	Uraian	2011	2012
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.545.307.329,00	15.448.541.322,00
2	Nilai Impor (US \$)	15.971.249.647,00	16.852.596.453,00
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	1.574.057.682,00	-1.404.055.130,00

Perindustrian dari Bank Indonesia, Maret 2013

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus kemampuan ekonomi daerah

a.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Berikut ini adalah data mengenai konsumsi rumah tangga kota Surabaya sebagaimana tersaji pada tabel 2.111.

Tabel 2.111
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Total Pengeluaran Perkapita (Rp)	581.036	587.594
2	Jumlah Rumah Tangga (KK)	859.372	908.854
3	Persentase Konsumsi Rumah Tangga (%)	0,67	0,64

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Dpenduk Kota Surabaya;

*) Data Sementara, Maret 2013

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang ada di Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 859.372 KK dan meningkat di tahun 2012 menjadi 908.854 KK seiring dengan adanya penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2011, rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita di Kota Surabaya selama sebulan besarnya Rp581.036,- berdasarkan hasil Susenas tahun 2010 seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Nilai ini meningkat di tahun 2012 menjadi Rp587.594,- perkapita perbulan. Dari nilai total pengeluaran tersebut, untuk pengeluaran RT non pangan jumlahnya sebesar Rp306.241 perbulan atau 52,12% dari total seluruh pengeluaran RT. Sedangkan pengeluaran RT untuk kebutuhan pangan sebesar Rp281.353,- (tabel 2.112).

Tabel 2.112
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012*
1	Total Pengeluaran Perkapita Non Pangan (Rp)	305.292	306.241
2	Total Pengeluaran (Rp)	581.036	587.594
3	Persentase Konsumsi Perkapita Non-Pangan (%)	52,54	52,12

Sumber: Hasil Susenas BPS Provinsi Jawa Timur, diolah;

*) Data sementara, April 2013

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Surabaya tahun 2011 sebesar 1.475.147 orang dan sedikit terkoreksi pada tahun 2012 dengan jumlah yang mencapai 1.419.677 orang. Jika dibandingkan dengan kumulatif nilai PDRB Kota Surabaya tahun 2012, maka produktivitas total daerah Kota Surabaya sebesar 186,49 sebagaimana pada tabel 2.113 berikut:

Tabel 2.113
Produktivitas Per Sektor Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Sektor	2011		2012*	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	PDRB	235.034.299,43	100	264.335.620,09	100
1.1	Pertanian	185.468,17	0,08	192.395,48	0,07
1.2	Pertambangan dan Penggalian	12.418,13	0,01	13.582,50	0,01
1.3	Industri Pengolahan	51.188.301,93	21,78	57.379.281,61	21,71

No.	Sektor	2011		2012*	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1.4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.689.908,93	3,27	8.070.853,58	3,05
1.5	Konstruksi	16.218.469,27	6,90	18.154.474,45	6,87
1.6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	103.172.404,53	43,90	117.525.130,35	44,46
1.7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.724.728,63	10,09	26.887.741,57	10,17
1.8	Keuangan, Sewa dan Js. Perusahaan	14.176.899,89	6,03	16.032.979,68	6,07
1.9	Jasa-Jasa	18.665.699,96	7,94	20.079.180,87	7,60
2	Jumlah Angkatan Kerja	1.475.147		1.419.677	
3	Produktivitas Total Daerah (Juta Rp/Orang)	159,48		186,49	

Sumber: BPS Kota Surabaya; *) Data sementara, Mei 2013

b. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

b.1. Perhubungan

Jumlah kendaraan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 1.645.212 unit menjadi 1.800.415 unit pada tahun 2012 sehingga rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 0,91 menjadi 0,84 pada tahun 2012 (tabel 2.114).

Tabel 2.114
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Panjang Jalan (m)	1.504.843	1.505.590
2	Jumlah Kendaraan	1.645.212	1.800.415
3	Rasio Panjang Jalan	0,91	0,84

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, 2013

b.2. Penataan Ruang

Demi tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas Pemerintah Kota Surabaya perlu menyusun penataan ruang yang baik, sehingga pembangunan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan seimbang (tabel 2.115).

Tabel 2.115
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011 (ha)	2012 (ha)
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Produktif	23.665,80	23.665,80
3	Persentase luas wilayah produktif (%)	93,27	93,27

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2009

Pada tahun 2011 dan 2012, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27%. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri adalah sebesar 9,88% dari keseluruhan Kota Surabaya dan tidak ada penambahan luasan pada tahun 2012 (tabel 2.116).

Tabel 2.116
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011 (ha)	2012 (ha)
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Industri	2.506,40	2.506,40
3	Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2009

Pada tahun 2012, luasan wilayah genangan di Kota Surabaya mengalami penurunan menjadi sebesar 1.613,48 ha dibandingkan luasan wilayah genangan pada tahun 2011 sebesar 2.213 ha. Penurunan luasan wilayah genangan disebabkan karena pada tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengembangkan sistem drainase secara terpadu dengan memaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematuan air hujan dan menambah jumlah pompa untuk mempercepat mengurangi lama genangan (tabel 2.117)

Tabel 2.117
Rasio Luas Wilayah Genangan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011 (ha)	2012 (ha)
1	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25.374,00	25.374,00
2	Luas Wilayah Genangan	2.213,00	1.613,48
3	Rasio luas wilayah genangan	0,09	0,06

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematuan, 2013

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100% dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya (tabel 2.118).

Tabel 2.118
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011 (ha)	2012 (ha)
1	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Perkotaan	25.374,40	25.374,40
3	Rasio luas wilayah perkotaan (%)	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2009

b.3. Lingkungan hidup

Perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih meningkat sebesar 118.746 dari tahun 2011 ke tahun 2012. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka prosentase mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 83,51% menjadi sebesar 86,88% pada tahun 2012 (tabel 2.119).

Tabel 2.119
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih
Kota Surabaya Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	2.270.751	2.389.497
2	Jumlah Penduduk*	2.719.237	2.750.357
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	83,51	86,88

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2013

Keterangan: *) Survey PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

c. Fokus iklim berinvestasi

c.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Untuk meningkatkan iklim investasi Pemerintah Kota Surabaya perlu pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Dari tabel 2.121 dapat dijelaskan bahwa jumlah unjuk rasa yang terjadi secara keseluruhan mengalami kenaikan, jika pada tahun 2011 terdapat 129 kasus, unjuk rasa di tahun 2012 terdapat sebanyak 231 kasus. Kasus pemogokan kerja menjadi faktor utama naiknya jumlah unjuk rasa di Kota Surabaya khususnya mengenai demo buruh terhadap Upah Minimum Kota (UMK) dan permasalahan *outsourcing* (tabel 2.120).

Tabel 2.120
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Bidang Politik	35	31
2	Bidang Ekonomi	54	116
3	Kasus Pemogokan Kerja	40	84
	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	129	231

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2013

Walaupun jumlah unjuk rasa di kota Surabaya tahun 2012 meningkat dari tahun 2011, tetapi kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Berikut ini adalah tabel mengenai lama proses perijinan kota Surabaya yang disajikan secara lengkap pada tabel 2.121.

Tabel 2.121
Lama Proses Perijinan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011			2012		
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)
1	SIUP	3	8	-	3	8	-
2	TDP	3	4	-	3	4	-
3	IUI	5	8	-	5	8	-
4	TDI	5	8	-	5	8	-
5	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	3	6	-	3	6	-
6	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4	5	-	4	5	-
7	Surat Ijin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang	3	7	-	3	7	-
8	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB)						
8.1	Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C pada Hotel Bintang 3, 4, dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Kelab Malam	5	8	-	5	8	-
8.2	Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol Golongan yang	5	9	-	5	9	-

No.	Uraian	2011			2012		
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)
	mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar aethanol paling banyak 15 persen						
9	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)						
9.1	Untuk pasar tradisional yang tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan bangunan lain	5	5	-	5	5	-
9.2	untuk pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain	5	7	-	5	7	-
10	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	5	8	-	5	8	-
11	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)						
11.1	untuk toko modern yang tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain	5	8	-	5	8	-
11.2	untuk toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain	5	5	-	5	5	-
12	Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar (STPWL)	3	10	-	3	10	-
13	Surat Izin Perluasan Industri (IPI)	5	5	-	5	5	-
14	Persetujuan Prinsip (PP)	5	3	-	5	3	-
15	IMB						
15.1	Rumah Tinggal	7HR+X	<100m ² : 6 >100m ² : 7	Progresif max.2000/m ²	7HR+X	<100m ² : 6 >100m ² : 7	Progresif max.2000/m ²

No.	Uraian	2011			2012		
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)
15.2	Rumah Tinggal > 1 lt	10HR+X	8	Progresif max.2000/m2	10HR+X	8	Progresif max.2000/m2
15.3	Non Rumah Tinggal	20HR+X	9	Progresif max.4000/m2	20HR+X	9	Progresif max.4000/m2
15.4	Reklame						
	Butuh Pertimbangan Tim Reklame	16HR+X	11	4000/m2	16HR+X	11	4000/m2
	Tidak Butuh Pertimbangan Tim Reklame (Papan dan Megatron)	16HR+X	8	4000/m2	16HR+X	8	4000/m2
	Tidak Butuh Pertimbangan Tim Reklame (Baliho, Kain, Selebaran, Melekat, Film, Udara, Suara, Peragaan)	16HR+X	5	4000/m2	16HR+X	5	4000/m2
16	HO *) Jumlah Persyaratan Izin Baru	≥ 15	6	1. Luas s/d 100 m2 sebesar Rp. 562,500 2. Luas lebih dari 100 m2 s/d 500 m2 sebesar Rp. 1,125,000 3. Luas lebih dari 500 m2 s/d 1000 m2 sebesar Rp. 2,254,525 4. Luas lebih dari 1000 m2 sebesar Rp. 13,942,539	≥ 15	6	1. luas < 50 m2 sebesar Rp. 50.000,- 2. luas 50 - 100 m2 sebesar Rp. 75.000,- 3. luas 100 - 200 m2 sebesar Rp. 100.000,- 4. luas 200 - 300 m2 sebesar Rp. 150.000,- 5. luas 300 - 400 m2 sebesar Rp. 200.000,- 6. luas 400 - 500 m2 sebesar Rp. 250.000,- 7. luas 500 - 600 m2 sebesar Rp. 300.000,- 8. luas 600 - 700 m2 sebesar Rp. 350.000,- 9. luas 700 - 800 m2 sebesar Rp. 400.000,-

No.	Uraian	2011			2012		
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)
							10. luas 800 - 900 m2 sebesar Rp. 450.000,-
							11. luas >- 900 m2 sebesar Rp. 500,- /m2

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2013

Waktu layanan perijinan serta tidak adanya pengenaan biaya perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Berikut ini adalah data mengenai Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya sebagaimana tersaji pada tabel 2.122.

Tabel 2.122
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	3
2	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	1	3
3	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	-	-

Sumber: Bagian Hukum, 2013

Menuju Surabaya yang Lebih Baik Sebagai Pusat Jasa Dan Perdagangan merupakan visi Kota Surabaya yang menuntut Pemerintah Kota untuk terus berbenah guna terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif sebagai prasyarat utama terwujudnya kota pusat jasa dan perdagangan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota dituntut komitmennya untuk dapat menyusun regulasi yang mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi.

Keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung terwujudnya Surabaya sebagai kota pusat jasa dan perdagangan tercermin dari semakin meningkatnya jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Pada tahun 2011 jumlah perda yang mendukung iklim usaha sebanyak 2 perda, sedangkan tahun 2012 jumlah perda yang mendukung iklim usaha sebanyak 6 perda.

Perda yang disusun pada tahun 2011 terdiri dari :

- a. Perda terkait perijinan sebanyak 1 perda yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- b. Perda terkait lalu lintas barang dan jasa sebanyak 1 perda yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Perda yang disusun pada tahun 2012 terdiri dari :

- a. Perda terkait perijinan sebanyak 3 perda yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Perda Nomor 22 tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Perda terkait lalu lintas barang dan jasa sebanyak 3 perda yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tempat Khusus Parkir dan Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

d.1. Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah data mengenai Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tersaji pada tabel 2.123.

Tabel 2.123
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Lulusan S1	294.104	312.354
2	Jumlah Lulusan S2	19.430	19.982
3	Jumlah Lulusan S3	899	982
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	314.433	333.318
5	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,10	0,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

Pada tahun 2012 telah ada peningkatan penduduk dengan kelulusan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Yaitu dengan rasio 0,11 dibandingkan dengan tahun 2011 dengan rasio 0.10. Fakta ini mencerminkan bahwa sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia diatas 64 tahun (usia belum produktif dan usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan usia produktif. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya (tabel 2.124).

Tabel 2.124
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya
Tahun 2011-2012

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia dibawah 15 Tahun	650.681	684.385
2	Jumlah Penduduk Usia diatas 64 Tahun	183.987	190.385
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	834.668	874.770
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	2.189.653	2.250.805
5	Rasio Ketergantungan	0,38	0,39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

Dari data rasio ketergantungan yang ada menunjukkan bahwa struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun;
- 2) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun; dan
- 3) kelompok umur tua, usia 64 tahun keatas.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat ketergantungan Kota Surabaya mengalami kenaikan, hal ini tercermin dari jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 874.770 pada tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktifnya sebesar 2.250.805 sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,39. Sedangkan pada tahun 2011, rasio ketergantungan Kota Surabaya sebesar 0,38 yaitu dari jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 834.668 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2.189.653 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2014, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun tahun 2012, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dijelaskan pada Tabel 2.125 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2012 sebagaimana berikut.

Tabel 2.125
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2012
Pemerintah Kota Surabaya

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.01	Pendidikan					
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	90%	91.88%	102.09%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	90%	91.88%	102.09%	
1.01.15.0018	Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta pembinaan tumbuh kembang anak	300 Orang	300 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.01.15.0022	Pendidikan Anak Usia Dini	Waktu pelaksanaan pembinaan kepada 2598 lembaga PAUD	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100.00%	100.00%	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.98%	99.89%	100.92%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	93.00%	93.97%	101.04%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105.20%	105.21%	100.01%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	92.50%	92.63%	100.14%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105.00%	107.11%	102.01%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00%	0.003%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.00%	0.002%		
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	98.75%	99.42%	100.68%	
1.01.16.0009	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup	575 orang	575 orang	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.01.16.0040	Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang disediakan	22553 Unit	22,533 Unit	99.91%	Bagian Perlengkapan
1.01.16.0004	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah gedung sekolah yang dibangun/direhabilitasi	80 unit	80 unit	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01.16.0016	Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan	Waktu Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan sebanyak 630 titik	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.01.16.0001	Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan	Jumlah paket pekerjaan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pendidikan yang diberikan	2283 paket	270 paket	11.83%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0002	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS	Jumlah peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional SD dan SMP	86782 siswa	84,633 siswa	97.52%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0004	Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	900 orang	900 orang	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0006	Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	660 siswa	660 siswa	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0014	Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS	Waktu persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SD	3 bulan	3 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0016	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan dasar	92 lembaga	92 lembaga	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0018	Pengelolaan Informasi Pendidikan	Waktu pelaksanaan pendataan dan pengelolaan informasi pendidikan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0020	Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pembinaan kepada 87 lembaga pelayanan pendidikan dasar	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pemberian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung sekolah kepada 540 lembaga TK, SD dan SMP Negeri	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0027	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA untuk 237.539 siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri Non RSBI dan SMP Negeri RSBI	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0030	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pada isu pendidikan	3615 orang	3,615 orang	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0032	Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS	100 lembaga	100 lembaga	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0035	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi	Jumlah lembaga yang dikembangkan	3 lembaga	0 lembaga		Dinas Pendidikan
1.01.16.0004	Operasional Bis Sekolah	Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah	312 hari	226 hari	72.44%	Dinas Perhubungan
1.01.16.0015	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Waktu pelaksanaan 14 kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 96 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kalijudan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	98.88%	99.93%	101.06%	
		Angka Kelulusan (AL) SMK	98.81%	99.88%	101.08%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	87.50%	87.77%	100.31%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105.00%	105.13%	100.12%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	90.00%	99.15%	110.17%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0.00%	0.002%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0.00%	0.026%		
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirasusaha	57.00%	63.54%	111.47%	
1.01.17.0008	Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50.00%	Bagian Kerjasama
1.01.17.0041	Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Menengah yang disediakan	5442 Unit	5,442 Unit	100.00%	Bagian Perlengkapan
1.01.17.0015	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Jumlah gedung sekolah Pendidikan Menengah yang dibangun/direhabilitasi	11 unit	11 unit	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01.17.0003	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Jumlah peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional SMA dan SMK	38102 siswa	36,779 siswa	96.53%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0005	Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	6150 orang	5,172 orang	84.10%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0007	Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	1048 orang	1,048 orang	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0015	Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN	Waktu persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP, SMA dan SMK	3 bulan	3 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.01.17.0017	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan menengah	25 lembaga	20 lembaga	80.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0021	Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah	waktu pelaksanaan pembinaan kepada 5 lembaga pelayanan pendidikan menengah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0026	Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan pemberian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung sekolah kepada 33 SMA dan SMK Negeri	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0028	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA untuk 46.588 siswa SMA/MA dan SMK Negeri Non RSBI serta SMA dan SMK Negeri RSBI	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0031	Pencitraan Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah yang mengikuti pelaksanaan pameran	96 sekolah	96 sekolah	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0036	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi	Jumlah lembaga yang dikembangkan	1 lembaga	0 lembaga	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0015	Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar	Jumlah kegiatan Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar	48 kali	48 kali	100.00%	Dinas Perhubungan
1.01.17.0012	Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK	Pemanduan orientasi kerja melalui penelusuran minat, bakat, dan kreatifitas siswa SMK negeri	5000 orang	4,756 orang	95.12%	Dinas Tenaga Kerja
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	100%	100.00%	100.00%	
1.01.18.0008	Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS	Jumlah siswa yang mendapatkan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	1003 orang	1,003 orang	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.18.0023	Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah	Waktu pelaksanaan pemberian tunjangan mutu kepada 10.000 guru agama dan kelas minggu	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	88.08%	91.08%	103.41%	
1.01.20.0009	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan KKG/MGMP	4200 orang	4,200 orang	100.00%	Dinas Pendidikan
1.01.20.0013	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2	714 orang	658 orang	92.16%	Dinas Pendidikan
1.01.20.0019	Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan mutu	15001 orang	10,805 orang	72.03%	Dinas Pendidikan
1.01.20.0033	Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Waktu Pelaksanaan Penunjang BOSDA Madin didalam pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan guru Madrasah Diniyah/Salafiyah Ula dan Wustho/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk 6765 orang	6 bulan	6 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 7 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0012	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100.00%	
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	
1.02.16.0003	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4057 Orang	2,945 Orang	72.59%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0004	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0005	Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah obyek sasaran (sanitasi air, pemukiman, TTU, MAKMIN) yang diuji dan diinspeksi	5405 Sampel	5,405 Sampel	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah penderita kanker/paliatif yang mendapat pelayanan kesehatan	306 Orang	306 Orang	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0010	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah Sampel yang diawasi	309 sampel	309 sampel	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0011	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100 Persen	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0013	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas	83 jenis	81 jenis	97.59%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0015	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga					Dinas Kesehatan
1.02.16.0019	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dasar di puskesmas	164 jenis	159 jenis	96.95%	Dinas Kesehatan
1.02.16.0003	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan non kuota di RSUD. Bhakti Dharma Husada	100 Persen	100 Persen	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.16.0004	Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat di RSUD Bhakti Dharma Husada selama	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.16.0006	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan obat dan perbekalan kesehatan RS Bhakti Dharma Husada yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.16.0003	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Non Kuota Pada RSUD. dr. M. Soewandhie	100 Persen	100 Persen	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.16.0004	Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat	Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.16.0006	Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)	Waktu penyediaan obat-obatan rumah sakit	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.16.0007	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)	Tersedianya Alat Kesehatan Pakai Habis Rumah Sakit Selama	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.16.0011	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	15	16	106.67%	
		Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	4	9	225.00%	
1.02.25.0005	Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi	13 unit	12 unit	92.31%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.02.25.0007	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialisik	25 Puskesmas	25 Puskesmas	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0012	Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen pengembangan standart pelayanan kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0014	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan	168 Jenis	168 Jenis	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0016	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pelatihan bagi kader dan tenaga kesehatan	1455 orang	1,455 orang	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0017	Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya sertifikasi dan akreditasi SDM kesehatan	862 orang	862 orang	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0018	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	terlaksananya kegiatan pengembangan SDM kesehatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0020	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0021	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	4 Jenis	4 Jenis	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0041	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Kesehatan	3 lokasi	0 lokasi	0.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.02.26	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B	Kelas B		
		Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas C	Kelas C		
1.02.26.0014	Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi	Jumlah gedung RSD dr. Soewandhi yang dibangun	1 unit	1 unit	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.02.26.0005	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan RSUD. Bhakti dharma Husada yang disediakan	12 kelompok alat kesehatan	12 kelompok alat kesehatan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Pelaksanaan Promosi Kesehatan Rumah Sakit melalui	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0008	Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah Tenaga kesehatan yang ditingkatkan SDMnya	475 Orang	475 Orang	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0009	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan RS yang diadakan	140 jenis	81 jenis	57.86%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0005	Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit	Penyediaan alat Kesehatan Rumah Sakit	7 kelompok alat kesehatan	7 kelompok alat kesehatan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0008	Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah Sistem Operasi Manajemen Operasional Rumah Sakit yang ditingkatkan	1 Sistem Manajemen	1 Sistem Manajemen	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0009	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Tersedianya Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	10 jenis	10 jenis	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0010	Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan SDMnya	84 tenaga kesehatan	84 tenaga kesehatan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	97.61%	101.68%	
		Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90%	91.29%	101.43%	
		Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90%	92.58%	102.87%	
		Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90%	89.54%	99.49%	
		Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90%	88.06%	97.84%	
		Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90%	84.45%	93.83%	
		Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100.00%	100.00%	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%	101.77%	103.85%	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	79.62%	88.47%	
1.02.32.0008	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Meningkatnya Upaya Kesehatan Keluarga	160 Kelurahan	160 Kelurahan	100.00%	Dinas Kesehatan
1.02.32.0009	Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi	4030 orang	4,030 orang	100.00%	Dinas Kesehatan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kesehatan
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan pengadaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran RS Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang layak	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kesehatan
X.XX.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa RSUD Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
X.XX.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.03	Pekerjaan Umum					
1.03.28	Program Pengendalian Banjir					
		Luas wilayah genangan	2291 ha	1613.779 ha	129.56%	
		Rata-rata lama terjadinya genangan	60 menit	57.84 menit	103.60%	
		Rata-rata tinggi genangan yang terjadi	20 cm	19.66 cm	101.70%	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.03.28.0008	Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai	Jumlah lokasi rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	47 lokasi	78 lokasi	165.96%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0009	Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai	Terpeliharanya saluran pematusan/sungai/kali	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0010	Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	29 lokasi	50 lokasi	172.41%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0011	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan	13 dokumen	18 dokumen	138.46%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0012	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota	92 dokumen	98 dokumen	106.52%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0013	Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pematusan kota	20 unit	21 unit	105.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0019	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0026	Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan saluran pematusan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0029	Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	waktu pelaksanaan posko pengendalian dan penanggulangan banjir	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.31	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	% Cakupan Layanan Air Bersih	83.45%	86.88%	104.11%	
		% kebocoran air bersih	32.95%	32.96%	99.97%	
1.03.31.0020	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)	Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun	32 lokasi	11 lokasi	34.38%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.31.0023	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih	3 dokumen	2 dokumen	66.67%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit	6 jam 34 menit	100.25%	
1.03.32.0001	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dibangun/ditingkatkan	3 lokasi	2 lokasi	66.67%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0002	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab	10 lokasi	6 lokasi	60.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan	35 dokumen	36 dokumen	102.86%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0004	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan	92 dokumen	92 dokumen	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0005	Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang direhab/dipelihara	40 lokasi	37 lokasi	92.50%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0006	Pengadaan Tanah	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan	17 lokasi	9 lokasi	52.94%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0007	Pembangunan Kelengkapan Jalan	Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan	9 lokasi	8 lokasi	88.89%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0015	Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut	Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana bina marga	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0021	Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)	Jumlah lokasi jalan yang direhabilitasi dan ditingkatkan	3 lokasi	2 lokasi	66.67%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0022	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	3 dokumen	1 dokumen	33.33%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0024	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0025	Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan jalan dan jembatan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0027	Koordinasi Jaringan Utilitas	waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0028	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan kelengkapannya	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.32.0031	Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	Lokasi jalan yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.04	Perumahan Rakyat					
1.04.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	102	172	31.37%	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
		Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	76%	80.33%	105.70%	
		Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	83%	89.64%	108.00%	
1.04.21.0072	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)	3 unit	2 unit	66.67%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.04.21.0001	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kebakaran
1.04.21.0002	Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang sistem proyeksi kebakarannya diperiksa	5600 Gedung/Bangunan	5,338 Gedung/Bangunan	95.32%	Dinas Kebakaran
1.04.21.0004	Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan	110 Kegiatan	75 Kegiatan	68.18%	Dinas Kebakaran
1.04.21.0005	Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran	630 Peserta	648 Peserta	102.86%	Dinas Kebakaran
1.04.21.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan	1181 Unit	1,176 Unit	99.58%	Dinas Kebakaran
1.04.21.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 91 unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kebakaran
1.04.22	Program Utilitas Perkotaan	Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	76.55%	80.46%	105.11%	
1.04.22.0018	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik Penerangan Jalan Umum yang dipasang	3294 titik	3,638 titik	110.44%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.04.22.0028	Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.04.23	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	2785	2985	107.18%	
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	316	275.58	87.21%	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0.26	0.16	138.46%	
1.04.23.0002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	5 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.04.23.0012	Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman	Jumlah permukiman yang mendapat pengurangan tanah dan pemadatan	9 unit	9 unit	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.04.23.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam	19 makam	19 makam	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.04.23.0014	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman	250 lokasi	295 lokasi	118.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.04.23.0022	Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya	waktu pelaksanaan pengelolaan rumah susun 9 lokasi	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 7 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kebakaran
X.XX.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0009	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Kebakaran
X.XX.02.0025	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
X.XX.02.0040	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan	Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk prasarana kantor pemerintahan	4 lokasi	1 lokasi	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05	Penataan Ruang					
1.05.18	Program Penataan Ruang					
1.05.18.0027	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	35.64%	18.26%	51.23%	
1.05.18.0027	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.05.18.0001	Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen Review Rencana Detail Tata Ruang Kota yang disusun	3 unit pengembangan	0 unit pengembangan	0,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0007	Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Waktu pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0008	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang	24 dokumen	24 dokumen	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0009	Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0010	Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan	Waktu Pengawasan Pengendalian dan Penertiban tata bangunan di 31 Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0011	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Waktu pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0016	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan ke pemkot	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0022	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 berkas	733 berkas	146.60%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0023	Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS	Jumlah dokumen hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS yang disusun	19 dokumen	19 dokumen	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0026	Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran	Jumlah dokumen hasil audit sistem manajemen mutu ISO 9001 2008 bidang tata bangunan dan taat ruang yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0028	Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan	Jumlah kasus penataan ruang dan perijinan bangunan yang ditangani	6 kasus	3 kasus	50.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.05.18.0004	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot yang disusun	3 peraturan	2 peraturan	66.67%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0010	Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	20 kasus	20 kasus	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0011	Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang tertangani	10 kasus	10 kasus	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0017	Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian Pemanfaatan Tanah/ Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 buku	12 buku	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0029	Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD	Jumlah dokumen hasil pendataan dan penelitian terhadap BTKD yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0030	Pemetaan Tanah IPT	Jumlah dokumen hasil pemetaan IPT	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0031	Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya	Jumlah dokumen hasil verifikasi masalah bangunan dikuasai/dikelola Pemkot Surabaya yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0048	Pemetaan Tanah BTKD	Jumlah dokumen hasil pemetaan BTKD	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0031	Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi	73 unit	62 unit	84.93%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
X.XX.02.0070	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.06	Perencanaan Pembangunan					
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100.00%	
1.06.21.0003	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0005	Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan	5 dokumen	5 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0006	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang	13 dokumen	13 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0007	Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi	Waktu pelaksanaan Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0008	Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan	Jumlah dokumen hasil penunjang kegiatan perhubungan dan pematusan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0009	Penunjang Perencanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen hasil penunjang kegiatan penanggulangan kebakaran dan pengelolaan utilitas perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0010	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0011	Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0012	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan pembangunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0013	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0014	Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya	Jumlah dokumen penyusunan IPM, IKM dan IPG kota Surabaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0015	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0016	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0017	Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD	Jumlah dokumen Nota Rancangan dan Perhitungan APBD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0018	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0019	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan	1 dokumen	2 dokumen	200.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0020	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0021	Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang kesra yang dilaksanakan	1 dokumen	2 dokumen	200.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0022	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0023	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0025	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0026	Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan	Jumlah dokumen hasil kegiatan perencanaan/evaluasi program pematusan perkotaan	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0028	Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2010-2015	Jumlah dokumen RPJMD tahun 2010-2015 dan RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0001	Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD	Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD sebanyak	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Bagian Bina Program
1.06.21.0002	Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah	Dokumen Standart Analisa Belanja Daerah yang disusun sebanyak	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	Bagian Bina Program

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.06.21.0003	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Bina Program
1.06.21.0004	Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Pengembangan 4 Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Bina Program
1.06.21.0003	Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesehatan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0004	Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0005	Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang pendidikan, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0002	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian kota	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.00%	Kec. Asemrowo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.00%	Kec. Benowo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Bubutan
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Bulak
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Gayungan
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.00%	Kec. Genteng
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.00%	Kec. Gubeng
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Jambangan
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Karangpilang
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Kenjeran
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Krembangan
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.00%	Kec. Pakal
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00%	Kec. Rungkut
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Sambikerep
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.00%	Kec. Sawahan
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.00%	Kec. Semampir
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Simokerto
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100.00%	Kec. Sukolilo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	9 kegiatan	9 kegiatan	100.00%	Kec. Tambaksari
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00%	Kec. Tandes
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Tegalsari
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%	Kec. Wiyung
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Kec. Wonocolo
1.06.21.0011	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0002	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0001	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.07	Perhubungan					
1.07.21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23.73	26.99	113.74%	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21.47	30.49	142.01%	
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14.72	24.18	35.73%	
		Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	32.41	41.59	71.68%	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.07.21.0005	Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah rambu lalu lintas dan marka yang disediakan	11 jenis	11 jenis	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0006	Pengadaan / pemeliharaan APILL	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan APILL	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0007	Penyelenggaraan manajemen lalu lintas	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0008	Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum	Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan	10 lokasi	10 lokasi	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0009	Pengembangan sarana prasarana perhubungan	Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat	2 lokasi	2 lokasi	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0010	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Kegiatan Sosialisasi Angkutan Umum Massal Perkotaan	3 kali	2 kali	66.67%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0011	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0012	Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan	Jumlah peserta pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan	400 orang	400 orang	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0013	Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0014	Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen hasil pengumpulan dan analisa database pelayanan angkutan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0016	Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0019	Pengelolaan terminal angkutan umum	Waktu pengelolaan terminal angkutan umum	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0020	Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	9 kali	8 kali	88.89%	Dinas Perhubungan
1.07.21.0021	Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0002	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.08	Lingkungan Hidup					
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
		Kualitas air limbah industri				
		BOD	64%	65.09%	101.70%	
		COD	60%	65.47%	109.12%	
		TSS	56%	56.41%	100.73%	
		Kualitas air limbah domestik				
		BOD	36%	36.77%	102.14%	
		TSS	38%	38.79%	102.08%	
		Kualitas air limbah RS				
		BOD	46%	48.02%	104.39%	
		COD	50%	50.23%	100.46%	
		TSS	40%	40.62%	101.55%	
		Kualitas air limbah hotel				
		BOD	34%	34.74%	102.18%	
		COD	28%	30.30%	108.21%	
		TSS	30%	33.13%	110.43%	
		Kualitas udara emisi di kawasan industri				
		SO2	70%	70.53%	100.76%	
		NO2	50%	51.95%	103.90%	
1.08.16.0001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Terlaksananya pemantauan lokasi penilaian Adipura	50 kali	61 kali	122.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0004	Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	16 sampel	16 sampel	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0005	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim	80 kali	80 kali	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0006	Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3	26 kegiatan/usaha	25 kegiatan/usaha	96.15%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0007	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup	750 orang	750 orang	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0008	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Jumlah peserta yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup	200 orang	200 orang	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0010	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0016	Pengelolaan Kualitas Air	Jumlah upaya pengelolaan kualitas air yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0017	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani	65 kasus	85 kasus	130.77%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0018	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Waktu operasional dan pemeliharaan stasiun monitoring udara ambien	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0019	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim yang dilaksanakan	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0020	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem	Jumlah dokumen keanekaragaman hayati kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0021	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Waktu operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0022	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air	Jumlah peserta kegiatan/usaha yang mengikuti sosialisasi SDA Air	100 orang	100 orang	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang diadakan	4 paket	4 paket	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0030	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel yang diambil dan diuji untuk pengendalian dampak lingkungan	630 sampel	630 sampel	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
1.08.16.0017	Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak	Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor	50 kali	50 kali	100.00%	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	30.40%	27.35%	89.97%	
1.08.24.0029	Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas	Luasan RTH sepanjang Sungai Kalimas yang ditata	934.05 m2	934.050 m2	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.08.24.0005	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang terbuka hijau yang ditata di Kota Surabaya	19 lokasi	24 lokasi	126.32%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.24.0023	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah kegiatan pendekorasi kota yang dilaksanakan	55 kegiatan	55 kegiatan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.24.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Taman dan jalur hijau yang dipelihara	17 lokasi	17 lokasi	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.24.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	1 jenis	1 jenis	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.24.0090	Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian ruang Terbuka Hijau	60 buku	60 buku	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.24.0047	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	2 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.08.24.0010	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Luasan Kawasan Lindung yang dikelola dengan penanaman Mangrove	20 Ha	36.370 Ha	181.85%	Dinas Pertanian
1.08.24.0015	Pembangunan Hutan Kota	Optimalisasi Hutan Kota	17.2 Ha	17.200 Ha	100.00%	Dinas Pertanian
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	167/175	176/175	105.86%	
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1217.09	1169.27	103.93%	
		Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3552.93	3533.52	100.55%	
1.08.25.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Waktu pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0004	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPAL dan TPA Benowo	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0011	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah lokasi pendampingan untuk meningkatkan peran serta	6 lokasi	6 lokasi	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0013	Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0014	Operasional Pengangkutan Sampah	Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah 1610 m3	366 hari	366 hari	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0015	Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan	jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun	8 buku	8 buku	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0017	Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih	Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT	366 hari	366 hari	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0024	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 224 unit sarana kebersihan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0025	Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo	Waktu pelaksanaan peningkatan 3 jenis sarana dan prasarana di TPA Benowo	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0033	Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan	Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan	104 hari	234 hari	225.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0045	Operasional Penyapuan Jalan	Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan seluas 832.402 m2	366 hari	366 hari	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0065	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah saluran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	144 orang	144 orang	100.00%	Kec. Asemrowo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100.00%	Kec. Benowo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100.00%	Kec. Bubutan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100.00%	Kec. Bulak
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	90 Orang	90 Orang	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	102 Orang	102 Orang	100.00%	Kec. Gayungan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100.00%	Kec. Genteng
1.08.25.0009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100.00%	Kec. Gubeng
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 Orang	200 Orang	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100.00%	Kec. Jambangan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	104 Orang	104 Orang	100.00%	Kec. Karangpilang
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100.00%	Kec. Kenjeran
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	270 Orang	270 Orang	100.00%	Kec. Krembangan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	252 orang	252 orang	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 Orang	240 Orang	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	90 Orang	90 Orang	100.00%	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100.00%	Kec. Pakal
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	360 orang	360 orang	100.00%	Kec. Rungkut
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 Orang	240 Orang	100.00%	Kec. Sambikerep
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	280 Orang	280 Orang	100.00%	Kec. Sawahan
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	140 orang	140 orang	100.00%	Kec. Semampir
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 Orang	300 Orang	100.00%	Kec. Simokerto
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100.00%	Kec. Sukolilo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100.00%	Kec. Tambaksari
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100.00%	Kec. Tandes
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	100 Orang	100 Orang	100.00%	Kec. Tegalsari
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	175 Orang	175 Orang	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 Orang	200 Orang	100.00%	Kec. Wiyung
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 Orang	240 Orang	100.00%	Kec. Wonocolo
1.08.25.0009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 orang	210 orang	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
X.XX.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Lingkungan Hidup
X.XX.02.0032	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.09	Pertanahan					
1.09.19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	582	552	94.85%	
1.09.19.0007	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah	192 hari	176 hari	91.67%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.09.19.0016	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Lokasi tanah aset/barang daerah yang bersertifikat	25 bidang	13 bidang	52.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.09.19.0027	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya	3 jenis	3 jenis	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	% penduduk yang berKTP	89%	91.03%	102.28%	
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	90%	97.39%	108.21%	
1.10.15.0001	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah lembar Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan yang diterbitkan	632250 lembar	727,225 lembar	115.02%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.0002	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Lembar Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil yang diterbitkan	98000 lembar	74,106 lembar	75.62%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.0003	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah publikasi bidang kependudukan melalui 2 media yang dilaksanakan	8 publikasi	8 publikasi	100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.0004	Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.0007	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang disusun	400 buku	400 buku	100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Asemrowo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Benowo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bubutan
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bulak
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gayungan
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Genteng
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Jambangan
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Karangpilang
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Kenjeran
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Krembangan
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Pakal
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Rungkut
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sambikerep
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sawahan
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Semampir
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Simokerto
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sukolilo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tambaksari
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tandes
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tegalsari
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wiyung
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wonocolo
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.11	Pemberdayaan Perempuan					
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	85 Lembaga	100.00%	
1.11.16.0012	Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender	Jumlah Pembinaan Lembaga berbasis gender	85 Lembaga	85 Lembaga	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.16.0014	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah peserta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2800 Orang	2,800 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 lembaga	7 lembaga	100.00%	Kec. Asemrowo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 lembaga	7 lembaga	100.00%	Kec. Benowo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Bubutan
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Bulak
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Gayungan
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Genteng
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00%	Kec. Gubeng
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Jambangan
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Kenjeran
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Krembangan
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 lembaga	8 lembaga	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 lembaga	7 lembaga	100.00%	Kec. Pakal
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 lembaga	8 lembaga	100.00%	Kec. Rungkut
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Sambikerep
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00%	Kec. Sawahan
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 lembaga	7 lembaga	100.00%	Kec. Semampir
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Simokerto
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	9 Lembaga	9 Lembaga	100.00%	Kec. Sukolilo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	10 lembaga	10 lembaga	100.00%	Kec. Tambaksari
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 lembaga	8 lembaga	100.00%	Kec. Tandes
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Tegalsari
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%	Kec. Wiyung
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00%	Kec. Wonocolo
1.11.16.0007	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	8 lembaga	8 lembaga	100.00%	Kec. Wonokromo
1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100%	100%	100.00%	
1.11.17.0013	Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	Jumlah peserta pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	3825 Orang	3,825 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.17.0015	Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi/ditangani	200 Kasus	211 Kasus	105.50%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
1.12.15	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	78.78%	82.04%	100.00%	
1.12.15.0016	Fasilitasi Masyarakat Peduli KB	Waktu pelaksanaan pembinaan 1574 Institusi Masyarakat Perkotaan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.12.15.0017	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta Keluarga Berencana yang dibina	5875 Orang	5,875 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.12.15.0019	Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin	Jumlah pelayanan alat kontrasepsi	273 Orang	253 Orang	92.67%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.12.15.0020	Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana	15 Item	12 Item	80.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.13	Sosial					

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.13.16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	25% (15.927)	78.76% (50.178)	315.05%	
1.13.16.0001	Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial	1119 Orang	1,206 Orang	107.77%	Dinas Sosial
1.13.16.0002	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni di 20 kelurahan	400 kepala keluarga	400 kepala keluarga	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0003	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 130 Orang Penghuni UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0004	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo	Waktu Pelaksanaan 16 Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0005	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1000 Orang Penghuni UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0006	Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan pelatihan ketrampilan	2640 Orang	2,505 Orang	94.89%	Dinas Sosial
1.13.16.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Waktu penyediaan 4 jenis barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0008	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Dinas Sosial
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Asemrowo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Benowo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Bubutan
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Bulak
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Gayungan
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Genteng
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Gubeng
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Jambangan
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Karangpilang
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Kenjeran
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Krembangan
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Pakal
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Rungkut
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Sambikerep
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Sawahan
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Semampir
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Simokerto
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Sukolilo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Tambaksari
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Kec. Tandes
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Tegalsari
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Wiyung
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Wonocolo
1.13.16.0005	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Kec. Wonokromo
1.13.21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	40% (527)	64.64% (824)	156.60%	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.13.21.0009	Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial	Jumlah Pekerja Sosial masyarakat (PSM) yang dibina	650 Orang	686 Orang	105.54%	Dinas Sosial
1.13.21.0010	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.13.21.0011	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang dibina	610 Orang	598 Orang	98.03%	Dinas Sosial
1.13.21.0012	Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial	Jumlah jenis barang kebutuhan dasar (sembako) yang disediakan untuk 175 Ponsos/Orsos	4 Jenis	4 Jenis	100.00%	Dinas Sosial
1.13.21.0017	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi 16425 orang	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Sosial
1.14	Ketenagakerjaan					
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	4%	3.92%	97.89%	
1.14.16.0001	Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja	jumlah fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja yang dapat dilaksanakan	6 kali	6 kali	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0002	Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial	Jumlah pencari kerja potensial yang difasilitasi untuk dapat mengikuti program magang kerja	160 orang	160 orang	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0004	Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha baru hasil seleksi yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana pendukung usaha	160 Orang	142 Orang	88.75%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0005	Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha baru	Jumlah stan dipasar modern yang dapat disediakan bagi calon wirausaha baru	8 stan	8 stan	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0007	Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2012	Jumlah kecamatan yang diidentifikasi kondisi ketenagakerjaan	31 kecamatan	31 kecamatan	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0008	Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha	Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan pelatihan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha	1880 orang	1,720 orang	91.49%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.16.0015	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal	1220 orang	1,220 orang	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	73%	75.26%	103.10%	
1.14.17.0003	Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang diintervensi untuk dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis	216 perusahaan	222 perusahaan	102.78%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.17.0006	Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2012	Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak kota Surabaya tahun 2012 di 3 lokasi selama	12 bulan	9 bulan	75.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.17.0009	Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3	360 perusahaan	320 perusahaan	88.89%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.17.0011	Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa	240 perusahaan	284 perusahaan	118.33%	Dinas Tenaga Kerja
1.14.17.0013	Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaan yang diawasi	180 lembaga	163 lembaga	90.56%	Dinas Tenaga Kerja
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0014	Penyediaan barang & jasa perkantoran	Tersedianya barang dan jasa perkantoran 6 jenis	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0010	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 4 Jenis	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	39 Kelompok	39 Kelompok	100%	
1.15.17.0006	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah pasar tradisional dan sentra unggulan yang dibangun	5 unit	4 unit	80.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.15.17.0002	Fasilitasi Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru	Jumlah kelompok usaha skala mikro-kecil baru yang dapat dibentuk	5 kelompok	5 kelompok	100.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.17.0003	Fasilitasi pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil	Jumlah kelompok usaha skala mikro-kecil yang difasilitasi untuk dikembangkan	10 kelompok	10 kelompok	100.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.17.0001	Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi	5 sentra	5 sentra	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0002	Fasilitasi Pengembangan UKM	Jumlah UKM yang Memperoleh Fasilitasi pengembangan usaha	256 UKM	256 UKM	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0003	Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri	Waktu pengelolaan 2 sistem manajemen pelayanan perijinan perdagangan dan industri	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0004	Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri	Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan	24859 ijin	24,244 ijin	97.53%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0005	Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau	Jumlah UKM Rokok yang dibina	13 UKM	13 UKM	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0006	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	300 perusahaan	300 perusahaan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.15.17.0007	Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan yang diterbitkan	140 rekom	267 rekom	190.71%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0008	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dibina	448 UKM	448 UKM	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.17.0009	Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam dan luar negeri	69 UKM	73 UKM	105.80%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 unit	172 unit	100%	
		Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	100 unit	51 unit	51.00%	
		Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit	80 unit	266.67%	
1.15.18.0001	Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru	Jumlah lembaga baru koperasi yang terbentuk	61 koperasi	61 koperasi	100.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0006	Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dievaluasi kesehatan	300 koperasi	372 koperasi	124.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0007	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan & dikembangkan usahanya	170 koperasi	134 koperasi	78.82%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0008	Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT	Jumlah koperasi aktif (RAT) yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya	210 Koperasi	155 Koperasi	73.81%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0009	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT	Jumlah koperasi aktif belum RAT yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya	120 koperasi	113 koperasi	94.17%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0011	Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi	Jumlah tenaga pembina koperasi yang mendapatkan pemahaman mengenai aturan perkoperasian	80 orang	79 orang	98.75%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0012	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi prinsip dasar perkoperasian di 10 lokasi	500 orang	1,015 orang	203.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.15.18.0014	Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak RAT yang direvitalisasi	100 koperasi	51 koperasi	51.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0013	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Tersedianya 8 jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0004	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.16	Penanaman Modal Daerah					
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	80%	75.44%	94.30%	
1.16.16.0001	Analisa Kebijakan Investasi	Tersusunnya analisa kebijakan investasi	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0002	Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal Yang difasilitasi	100 perusahaan	131 perusahaan	131.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0003	Pelayanan UPTSA	waktu Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTSA	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0004	Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan badan/Dinas pelayanan perijinan /non perijinan	42 unit pelayanan	46 unit pelayanan	109.52%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0006	Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN	Jumlah hasil laporan pengawasan Perusahaan PMA/PMDN	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0007	Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya	Hasil Monitoring Lokasi pelayanan perijinan / Non perijinan di Surabaya	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0008	Pengelolaan data investasi di surabaya	jumlah Dokumen data investasi di surabaya yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0009	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem informasi penanaman modal yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0010	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal	4 kali	3 kali	75.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0012	Penyelenggaraan Promosi Investasi	penyelenggaraan promosi investasi	2 kali	2 kali	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0013	Penyusunan Draft Raperda penanaman modal	Jumlah Draft Raperda penanaman modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.16.16.0014	Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II	Dokumen Peta Investasi Di Surabaya yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0011	Penyediaan barang dan Jasa perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0005	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.17	Kebudayaan					

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	150 Kelompok seni	168 kelompok seni	112.00%	
1.17.17.0032	Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra	Jumlah gedung Mitra yang dibangun dan diawasi	1 gedung	1 gedung	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.17.17.0054	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti	9 Festival	9 Festival	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.17.0062	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok seni yang mendapatkan fasilitas pembinaan	125 kelompok seni	168 kelompok seni	134.40%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 11 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0058	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.18	Pemuda dan Olah Raga					
1.18.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	65	65	100.00%	
1.18.16.0011	Fasilitasi Peningkatan Peran kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan tentang peningkatan peran kepemudaan	360 orang	500 orang	138.89%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0012	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda mandiri	140 orang	220 orang	157.14%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0013	Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti ajang pengembangan kreatifitas dan pembinaan kepemudaan	350 orang	300 orang	85.71%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0014	Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan	390 orang	500 orang	128.21%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0015	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti ajang peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan	3015 orang	3,725 orang	123.55%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0016	Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti ajang peningkatan dan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan	650 orang	500 orang	76.92%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.0017	Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	720 orang	600 orang	83.33%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya atlit/organisasi olahraga yang berprestasi	1305	1359	104.14%	
		meningkatnya prasarana olahraga yang dikembangkan	162	161	99.38%	
		meningkatnya jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	33	33	100.00%	
1.18.20.0073	Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV	Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.18.20.0003	Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah dokumen kebijakan dan manajemen olahraga yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0004	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga yang ditingkatkan kualitasnya	100 lokasi	9 lokasi	9.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0005	Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga	Jumlah pelaku olahraga yang mendapatkan penghargaan	1305 orang	1,359 orang	104.14%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0006	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi	Jumlah cabang kompetisi olahraga yang diselenggarakan	11 cabor	10 cabor	90.91%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0007	Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional	Jumlah jenis kegiatan pembinaan manajemen pelaku dan organisasi serta kompetisi olahraga umum dan tradisional yang dilaksanakan	9 jenis	8 jenis	88.89%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0008	Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah kegiatan pembinaan manajemen pelaku dan organisasi olahraga khusus dan lansia yang dilaksanakan	8 jenis	8 jenis	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0009	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapat peningkatan sarana dan prasarana	6 cabor	6 cabor	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0010	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah kompetisi olahraga khusus dan lansia yang diselenggarakan	9 jenis	9 jenis	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0018	Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo	Waktu operasional dan pemeliharaan Gelora Bung Tomo	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.0019	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga	Waktu operasional dan pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam					
1.19.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100.00%	
1.19.16.0001	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis	Waktu pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanak	209 hari	323 hari	154.55%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0002	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis	340 orang	340 orang	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0003	Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.19.16.0004	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas	525 orang	525 orang	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0005	Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Jumlah pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas	366 hari	366 hari	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0006	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0007	Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM	Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol, ormas dan LSM	500 orang	433 orang	86.60%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0008	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0009	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama	Pemantauan dan pendataan rumah ibadah yang dilaksanakan	36 kali	36 kali	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 kali	240 kali	100.00%	Kec. Asemrowo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Kec. Benowo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Bubutan
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Bulak
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Gayungan
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	312 Kali	312 Kali	100.00%	Kec. Genteng
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Gubeng
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	432 Kali	432 Kali	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Jambangan
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Karangpilang
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	264 kali	264 kali	100.00%	Kec. Kenjeran
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 Kali	240 Kali	100.00%	Kec. Krembangan
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	240 kali	240 kali	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	384 Kali	384 Kali	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Kec. Pakal
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Kec. Rungkut
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	240 Kali	240 Kali	100.00%	Kec. Sambikerep
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Sawahan
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	264 Kali	264 Kali	100.00%	Kec. Semampir
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Simokerto
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 7 wilayah	336 Kali	336 Kali	100.00%	Kec. Sukolilo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 8 wilayah	336 kali	336 kali	100.00%	Kec. Tambaksari
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	240 kali	240 kali	100.00%	Kec. Tandes
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	264 kali	264 kali	100.00%	Kec. Tegalsari
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	156 Kali	156 Kali	100.00%	Kec. Tenggiis Mejoyo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Wiyung
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Kec. Wonocolo
1.19.16.0006	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	300 kali	300 kali	100.00%	Kec. Wonokromo
1.19.16.0001	Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Bidang I	13448 Objek	13,482 Objek	100.25%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0002	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	380 Orang	380 Orang	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0003	Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Bidang II	1317 Objek	1,338 Objek	101.59%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0004	Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Bidang III	31780 Objek	57,431 Objek	180.71%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0005	Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota	79680 Orang	62,809 Orang	78.83%	Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
X.XX.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0011	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
X.XX.02.0007	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti	5	5	100.00%	
		Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	90%	93.33%	103.70%	
		% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	84%	62.60%	74.52%	
		Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	4	4	100.00%	
1.20.15.0001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD	5 Raperda	5 Raperda	100.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Hearing atau Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama	18 kali	18 kali	100.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0003	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	862 kali	905 kali	104.99%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0004	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	60 kali	64 kali	106.67%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0005	Reses	Jumlah Kegiatan Reses	3 kali	3 kali	100.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0006	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	192 kali	13 kali	6.77%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (SDM)	198 Kali	198 Kali	100.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0008	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	2000 orang	400 orang	20.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0009	Pengkajian/ Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah pengkajian/penelaahan Kebijakan Daerah	16 Dokumen	0 Dokumen		Sekretariat DPRD
1.20.15.0010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Waktu Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Sekretariat DPRD
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Peningkatan PAD	(9,42%) Rp 201.640.106.422	(20,84%) Rp 393.091.047.252	221.11%	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(28,39%) Rp 520.032.838.317	(25,75%) Rp 482.176.464.091	90.72%	
		% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	94.34%	117.93%	
1.20.17.0014	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan	Jumlah ijin gangguan yang diterbitkan	1000 ijin	875 ijin	87.50%	Badan Lingkungan Hidup
1.20.17.0001	Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada 5 BUMD	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1.20.17.0035	Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%	Bagian Perlengkapan
1.20.17.0039	Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi laporan penghapusan aset/barang daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Bagian Perlengkapan
1.20.17.0003	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah ijin bidang tata bangunan yang diproses	8750 berkas	5,627 berkas	64.31%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.20.17.0003	Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi	68200 alat	44,187 alat	64.79%	Dinas Kebakaran
1.20.17.0019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan	pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan dan pertamanan di 31 kecamatan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.20.17.0001	Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah pengendalian pajak daerah yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0002	Pengembangan Pajak Daerah	Jumlah sistem yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	9 sisem	9 sisem	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0003	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Hasil Laporan pemeriksaan pajak daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0004	Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah yang disusun	12 Dokumen	10 Dokumen	83.33%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0005	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan Pajak Penerangan Jalan Non PLN kepada 370 obyek pajak	24 kali	21 kali	87.50%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0006	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada 1.990 WP	24 kali	23 kali	95.83%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0007	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada 380 WP	24 kali	20 kali	83.33%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0008	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada 270 WP	24 kali	24 kali	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada 1.115 WP	24 kali	20 kali	83.33%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0010	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame	Pelaksanaan pengawasan, pendataan dan operasi simpatik di 20.420 obyek pajak	36 kali	36 kali	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0011	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak	20000 WP	21,158 WP	105.79%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0012	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah	Jumlah pelaksanaan pendataan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada 200 wajib pajak	24 kali	17 kali	70.83%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0013	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	jumlah SPPT yang disampaikan	750000 lembar	608,055 lembar	81.07%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0014	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak	Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan Ekstensifikasi bagi hasil pajak yang dilaksanakan	154 kali	197 kali	127.92%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0016	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian belanja hibah dan bantuan sosial yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0017	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 sistem	1 sistem	50.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0020	Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Jumlah Surat Perintah Membayar yang diteliti dan dinilai serta SKPP yang diterbitkan	18840 Berkas	23,334 Berkas	123.85%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0021	Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD	Jumlah Penyusunan APBD, Jumlah Penyusunan APBD, Perubahan APBD Tahun 2013	24 Dokumen	21 Dokumen	87.50%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0022	Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0023	Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Waktu pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan kas	264 Hari	246 Hari	93.18%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0024	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0025	Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0026	Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0027	Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0005	Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Jumlah Pendataan dan Penelitian 47.347 IPT yang dikelola	12 buku	12 buku	100.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0020	Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya	24 buku	4 buku	16.67%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0028	Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot	12 laporan	11 laporan	91.67%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0032	Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Pengawasan dan Pengelolaan Gedung sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	12 dokumen	4 dokumen	33.33%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0015	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.20.17.0016	Pelayanan UPTD Pasar Turi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 41 jenis pendukung pelayanan UPTD Pasar Turi	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.20.17.0017	Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi	Jumlah TPS Pasar Turi yang terbangun	580 Unit	0 Unit		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.20.17.0003	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan	Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak	31464000 lembar	31,464,000 lembar	100.00%	Dinas Perhubungan
1.20.17.0018	Pengelolaan Parkir	Waktu pengelolaan parkir	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perhubungan
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	215	55	174.42%	
1.20.20.0010	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus tentang pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota	100 kasus	56 kasus	56.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.20.0005	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja	Pemeliharaan dan Pengembangan 3 Sistem Informasi Pengukuran Kinerja selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Bina Program
1.20.20.0006	Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement	Jumlah Pelaksanaan E-Procurement yang dilaksanakan	24 putaran	31 putaran	129.17%	Bagian Bina Program

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.20.20.0007	Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung	Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak	7 Dokumen	10 Dokumen	142.86%	Bagian Bina Program
1.20.20.0007	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (Kormonev) di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Inspektorat
1.20.20.0008	Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil Inventarisasi dan Evaluasi temuan hasil pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Inspektorat
1.20.20.0009	Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100.00%	Inspektorat
1.20.20.0010	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peserta pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30 Orang	29 Orang	96.67%	Inspektorat
1.20.20.0011	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	33 Orang	92 Orang	278.79%	Inspektorat
1.20.20.0015	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah I di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	124 Laporan	87 Laporan	70.16%	Inspektorat
1.20.20.0016	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah II di lingkungan Kota Surabaya	124 laporan	78 laporan	62.90%	Inspektorat
1.20.20.0017	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah III di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	123 Laporan	88 Laporan	71.54%	Inspektorat
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentasae jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	100%	100%	100%	
1.20.24.0001	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Waktu Pelayanan Keluhan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	88.00%	88.89%	101.01%	
1.20.25.0001	Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kegiatan delegasi internasional	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00%	Bagian Kerjasama
1.20.25.0002	Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%	Bagian Kerjasama
1.20.25.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.00%	Bagian Kerjasama
1.20.25.0004	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Dan Atau Pemerintah Luar Neger	13 Kegiatan	8 Kegiatan	61.54%	Bagian Kerjasama
1.20.25.0005	Kajian Kerjasama	Jumlah Dokumen Kajian Kerjasama yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	Bagian Kerjasama
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	100.00%	100.00%	
1.20.26.0001	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Produk Hukum Yang Berlaku untuk 800 Orang Peserta	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100.00%	Bagian Hukum
1.20.26.0002	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Bagian Hukum
1.20.26.0003	Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	65 Perkara/Kasus	65 Perkara/Kasus	100.00%	Bagian Hukum
1.20.26.0006	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan daerah yang disusun	70 Rancangan Produk Hukum	113 Rancangan Produk Hukum	161.43%	Bagian Hukum
1.20.26.0007	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	70 Produk hukum	113 Produk hukum	161.43%	Bagian Hukum
1.20.29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	88.01%	80.01%	90.91%	
1.20.29.0009	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase penataan jabatan struktural	88.01%	79.31%	90.11%	
1.20.29.0001	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kearsipan dan Perpustakaan	3 Orang	3 Orang	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.20.29.0002	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah	127 orang	127 orang	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0002	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	1577 orang	1,577 orang	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0003	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional	6100 orang	4,920 orang	80.66%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0004	Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS	Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya	375 orang	375 orang	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0005	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS	19000 orang	0 orang	0,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0006	Penempatan Pegawai	Jumlah SK mutasi yang diterbitkan	500 SK	495 SK	99.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0007	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Waktu Pelaksanaan 4 Jenis Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0008	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0009	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan	850 orang	835 orang	98.24%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah mahasiswa tugas belajar yang diberi bantuan biaya	11 orang	7 orang	63.64%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0012	Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang diambil Sumpah dan Janjinya	1000 orang	1,000 orang	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0013	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan	311 orang	290 orang	93.25%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0014	Pembekalan kepada PNS dan CPNS	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan formasi PNS, Sosialisasi CPNS dan Rapat teknis Administrasi Kepegawaian	785 orang	785 orang	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0015	Promosi Jabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Fit and Proper test	160 orang	0 orang	0,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.20.29.0016	Pengangkatan CPNS dan PNS	Jumlah SK pengangkatan CPNS dan PNS yang diterbitkan	1100 SK	343 SK	31.18%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0017	Peningkatan Wawasan Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dalam negeri dan diklat luar negeri	225 orang	322 orang	143.11%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0018	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Waktu pelaksanaan 3 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0019	Tes Kesehatan bagi PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan	380 orang	330 orang	86.84%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0020	Ujian Dinas Tingkat I	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I	70 orang	50 orang	71.43%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.29.0015	Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 kali	5 kali	62.50%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	34%	37.08%	109.06%	
		Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	14%	15.28%	109.14%	
1.20.31.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi	Jumlah SKPD yang dianjab dan distandart kompetensinya	5 SKPD	5 SKPD	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Analisa kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0004	Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0005	Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan	Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0006	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pengukuran IKM Dinas, Lemtek, BUMD, Kecamatan dan Puskesmas yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0007	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001-2008 yang dilaksanakan	1 Sertifikasi	1 Sertifikasi	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0009	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah dokumen LAKIP Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0010	Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan saking	3 SKPD	3 SKPD	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0011	Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan	Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0012	Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Kebijakan Reformasi Birokrasi Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0013	Pembinaan Tata Naskah Dinas	Pembinaan Tata Naskah Dinas	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.31.0036	Pelayanan Pengadaan Barang Daerah	Jumlah dokumen lelang	2000 buku	1,338 buku	66.90%	Bagian Perlengkapan
1.20.31.0037	Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun	75 Buku	75 Buku	100.00%	Bagian Perlengkapan
1.20.31.0038	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas & kelengkapannya yang disediakan	26760 Stel	26,760 Stel	100.00%	Bagian Perlengkapan
1.20.31.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan sarana sistem persandian	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Umum dan Protokol
1.20.31.0004	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan 6 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Umum dan Protokol
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	30%	30%	100.00%	
1.20.32.0001	Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Patok Batas Wilayah yang dipasang	260 Patok	260 Patok	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0002	Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	10836 orang	10,228 orang	94.39%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0003	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina administrasi umum dan pemerintahannya	191 Lembaga	191 Lembaga	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0004	Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0005	Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan	Jumlah dokumen pemekaran/penggabungan kelurahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0006	Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Toponimi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0009	Lomba Kelurahan Berhasil	Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil	160 Kelurahan	160 Kelurahan	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Asemrowo
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 orang	120 orang	100.00%	Kec. Asemrowo
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Benowo
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	450 orang	450 orang	100.00%	Kec. Benowo
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bubutan
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	360 Orang	360 Orang	100.00%	Kec. Bubutan
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bulak
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	420 Orang	420 Orang	100.00%	Kec. Bulak
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	75 Orang	75 Orang	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gayungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tandes
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	200 orang	200 orang	100.00%	Kec. Tandes
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tegalsari
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	150 orang	150 orang	100.00%	Kec. Tegalsari
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 Orang	120 Orang	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wiyung
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta pembinaan, penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	100 Orang	100 Orang	100.00%	Kec. Wiyung
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wonocolo
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Kec. Wonocolo
1.20.32.0002	Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Wonokromo
1.20.32.0003	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	245 orang	245 orang	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
X.XX.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan 7 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Bina Program
X.XX.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Hubungan Masyarakat
X.XX.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 6 Jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Hukum
X.XX.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Kerjasama
X.XX.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
X.XX.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 5 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
X.XX.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
X.XX.01.0003	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Pelaksanaan penyediaan 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Perencanaan dan Usaha Daerah
X.XX.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Perlengkapan
X.XX.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Umum dan Protokol
X.XX.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
X.XX.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	11 Bulan	91.67%	Inspektorat
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Asemrowo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Benowo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bubutan
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bulak
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gayungan
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Genteng
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gubeng
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Jambangan
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Karangpilang
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Kenjeran
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Lakarsantri
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Mulyorejo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Pakal
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Rungkut
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sambikerep
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sawahan
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Semampir
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Simokerto
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sukolilo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sukomanunggal
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 18 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tambaksari
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tandes
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tegalsari
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wiyung
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wonocolo
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Sekretariat DPRD
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0022	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
X.XX.02.0009	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan 31 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Bina Program
X.XX.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana prasarana	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Hubungan Masyarakat
X.XX.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 1 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Hukum
X.XX.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 1 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Kerjasama
X.XX.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/ Pengadaan jenis Sarana prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
X.XX.02.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pemeliharaan 1 jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
X.XX.02.0008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 1 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
X.XX.02.0004	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
X.XX.02.0034	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Bagian Perlengkapan
X.XX.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan 3 jenis pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Umum dan Protokol
X.XX.02.0019	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan pemeliharaan pada 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
X.XX.02.0014	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	10 Bulan	83.33%	Inspektorat
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Asemrowo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Benowo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Bulak
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gayungan
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Genteng
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gubeng
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Jambangan
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Karangpilang
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Kenjeran
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Krembangan
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Lakarsantri
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Mulyorejo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Pakal
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Rungkut
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sambikerep
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sawahan
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Semampir
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Simokerto
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Sukolilo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Sukomanunggal
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tambaksari
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tandes
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Tegalsari
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wiyung
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kec. Wonocolo
X.XX.02.0004	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kec. Wonokromo
X.XX.02.0012	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Sekretariat DPRD
1.21	Ketahanan Pangan					
1.21.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					
1.21.15.0001	Pengembangan Perikanan	Jumlah KK Miskin Yang Mendapatkan Urban Farming Perikanan	5000 KK	5,000 KK	100.00%	Dinas Pertanian
1.21.15.0005	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pertanian
1.21.15.0016	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura	Jumlah KK Miskin yang mendapatkan Fasilitas Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (Urban Farming)	6000 KK	6,000 KK	100.00%	Dinas Pertanian
1.21.15.0018	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	60 kali	73 kali	121.67%	Dinas Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.21.15.0001	Kewaspadaan dan Keamanan Pangan	Jumlah pembinaan dan penyuluhan kewaspadaan pangan	8 kali	8 kali	100.00%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.15.0002	Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Waktu pelaksanaan koordinasi dewan ketahanan pangan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.15.0003	Promosi Hasil Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan	2 Event Promosi	2 Event Promosi	100.00%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.15.0004	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan diversifikasi pangan	1050 Orang	740 Orang	70.48%	Kantor Ketahanan Pangan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kantor Ketahanan Pangan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Kantor Ketahanan Pangan
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 Orang	1500 orang	100.87%	
1.22.20.0003	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Peserta Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	2500 Orang	2,500 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0004	Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan sumber daya alam	660 Orang	706 Orang	106.97%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0005	Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Peserta Seleksi program Teknologi Tepat Guna (TTG)	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0006	Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Waktu Pelaksanaan Pameran Hasil Produk Lembaga Ekonomi Mikro	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0007	Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan	7000 Orang	6,416 Orang	91.66%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0008	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapat ketrampilan kerja	4550 Orang	3,570 Orang	78.46%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0009	Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)	Waktu Pelaksanaan monitoring program beras miskin	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0010	Pemberdayaan Lembaga dan Ormas	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	160 Lembaga	160 Lembaga	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0011	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0030	Penunjang Kegiatan PNPB Mandiri Perkotaan (P2KP)	Waktu penyediaan operasional penunjang pelaksanaan kegiatan PNPB mandiri perkotaan selama	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Asemrowo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Benowo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan Monitoring dan Pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Bubutan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Bulak
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Gayungan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Genteng
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Gubeng
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Jambangan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Karangpilang
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Kenjeran
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Krembangan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Pakal
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Rungkut
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Sambikerep
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Sawahan
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Semampir
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Simokerto
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Sukolilo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan Monitoring Dan Pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Tambaksari
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Tandes
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Tegalsari
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Pendataan Kemiskinan Yang Disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Wiyung
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Kec. Wonocolo
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Kec. Wonokromo
1.24	Kearsipan					
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku)	50%	50%	100%	
1.24.15.0005	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah peserta yang dibina sistem kearsipan	117 Orang	117 Orang	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0006	Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Instansi yang arsip in aktifnya ditata, didampingi dan diakuisisi	201 Instansi	201 Instansi	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0007	Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Sistem Kearsipan Daerah	Waktu pelaksanaan pengadaan sarana sistem penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan arsip daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0008	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0025	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.25	Komunikasi dan Informatika					
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	45.162 kunjungan	134.952 kunjungan	298.82%	
1.25.15.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik yang terlaksana	8 kegiatan	9 kegiatan	112.50%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.15.0002	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.15.0003	Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	pembuatan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	12 bulan	12 bulan	100.00%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.15.0002	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi yang Dilakukan	25 Kali	25 Kali	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0003	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Dilakukan	53 Kali	53 Kali	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0004	Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Disebarluaskan	2262 Materi	1,350 Materi	59.68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0005	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa yang Dilakukan	42 Kali	42 Kali	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	9,26% = 10 sistem	12,96% = 14 sistem	139.96%	
		Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	5%	21.33%	426.60%	
1.25.19.0006	Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	19 Jenis	14 Jenis	73.68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0007	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0008	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Website yang Terbangun dan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data	10 Sistem	14 Sistem	140.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0009	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik	Waktu Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0010	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	700 Obyek	832 Obyek	118.86%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0011	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Jumlah Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya	7 Gedung	7 Gedung	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0012	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 140 Unit Prasarana Jaringan Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0013	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Waktu Pelaksanaan Pengawasan Mengenai Pemanfaatan Menara Bersama yang Dilakukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0017	Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software	Monitoring dan Evaluasi Komputer yang Telah Termigrasi ke Open Source Software	700 PC	704 PC	100.57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0018	Sosialisasi dan Pembinaan TIK	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembinaan TIK sebanyak	70 Kali	70 Kali	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 10 Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pengadaan dan Pemeliharaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.26	Perpustakaan					
1.26.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	1.506.924 orang	2.147.829 orang	142.53%	
1.26.15.0001	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Orang yang dibina tentang pengelolaan perpustakaan	403 orang	403 orang	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.26.15.0002	Pengelolaan Layanan Baca	Waktu Pengelolaan layanan baca di 440 lokasi	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1.26.15.0003	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Bahan pustaka yang disediakan	117922 Buku	117,922 Buku	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.26.15.0004	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	jumlah orang yang mendapatkan Publikasi dan Sosialisasi minat budaya baca	250 orang	250 orang	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 10 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0011	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.01	Pertanian					
2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
2.01.15.0006	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terbentuknya Sentra Produk Pertanian	22 Sentra	22 sentra	100%	
2.01.15.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jenis Hewan yang dikembangkan	2 jenis	2 jenis	100.00%	Dinas Pertanian
2.01.15.0008	Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah Prasarana peternakan yang disediakan dan dipelihara	2 unit	2 unit	100.00%	Dinas Pertanian
2.01.15.0009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah Sarana yang dibangun dan dipelihara	1 unit	1 unit	100.00%	Dinas Pertanian
2.01.15.0011	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	7 lokasi	7 lokasi	100.00%	Dinas Pertanian
2.01.15.0012	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jenis Benih dan Bibit Tanaman yang dikembangkan	24 jenis	25 jenis	104.17%	Dinas Pertanian
2.01.15.0017	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Tenaga Penyuluh yang dilaksanakan	15 kali	16 kali	106.67%	Dinas Pertanian
2.01.15.0019	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah Peserta Pengembangan Agribisnis Pertanian	200 orang	200 orang	100.00%	Dinas Pertanian
2.01.15.0020	Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan	Waktu Pelaksanaan 1 Jenis Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Peliharaan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pertanian
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran	Jumlah Prasarana Laboratorium Pengembangan Perbenihan/Perbibitan yang disediakan	12 item	12 item	100.00%	Dinas Pertanian
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 unit Sarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pertanian
2.04	Pariwisata					
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
2.04.15.0050	Penyelenggaraan Wisata Kuliner	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	179.835 wisatawan	323.037 wisatawan	179.63%	
2.04.15.0051	Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	7.869.775 wisatawan	9.561.881 wisatawan	121.50%	
2.04.15.0052	Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata	Jumlah event kuliner yang dilaksanakan dan diikuti	5 event	5 event	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0055	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata	8 event	8 event	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0056	Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan	180 orang	180 orang	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0059	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Jumlah peserta forum komunikasi antara pelaku industri pariwisata dan budaya	500 orang	500 orang	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0060	Pelayanan perijinan kepariwisataan	Jumlah kegiatan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0063	Penyusunan direktori pariwisata	Jumlah ijin kepariwisataan yang dikeluarkan	600 ijin	859 ijin	143.17%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0064	Pelayanan di UPTD Ampel	Jumlah dokumen direktori pariwisata yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0065	Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Ampel selama 12 bulan	25 kegiatan	25 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0066	Pelayanan di UPTD Kenjeran	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Balai Pemuda dan GNI selama 12 bulan	72 kegiatan	72 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0067	Pelayanan di UPTD THR	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Kenjeran selama 12 bulan	135 kegiatan	135 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.15.0067	Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan di UPTD THR selama 12 bulan	105 kegiatan	105 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Tugu Pahlawan selama 12 bulan	57 kegiatan	57 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.16.0053	Pengembangan obyek pariwisata	Terbentuknya destinasi wisata	13 Lokasi	13 lokasi	100%	
2.04.16.0061	Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan obyek wisata yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.05	Kelautan dan Perikanan					
2.05.15	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir					
2.05.15.0002	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan	Jumlah Kelurahan Pada Kawasan Pesisir yang Diberdayakan	9 Kelurahan	9 kelurahan	100%	
2.05.15.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan	Jumlah SDM Bidang Perikanan dan Kelautan yang dilatih	1285 orang	1,285 orang	100.00%	Dinas Pertanian
2.05.15.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan	Jumlah Sarana Perikanan Kelautan yang dibangun dan dipelihara	3 unit	3 unit	100.00%	Dinas Pertanian
2.06	Perdagangan					
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Prasarana Perikanan Kelautan yang disediakan	14 item	14 item	100.00%	Dinas Pertanian
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	81%	100%	123.46%	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
2.06.15.0010	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan	36 kasus	43 kasus	119.44%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.06.15.0011	Pengawasan Peredaran Barang	Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi	93 lokasi	93 lokasi	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.06.15.0012	Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri	260 UKM	219 UKM	84.23%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.06.19	Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	2 sentra	40.00%	
		jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	26 sentra	19 sentra	73.08%	
2.06.19.0005	Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL	Jumlah sentra baru PKL yang dikembangkan	6 sentra	2 sentra	33.33%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.06.19.0010	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL	Waktu pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan 26 sentra PKL	12 bulan	9 bulan	75.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.06.19.0045	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya	3 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
X.XX.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
X.XX.02.0013	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan. Oleh karena itu rumusan permasalahan pembangunan di Kota Surabaya tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan ilegal;
2. Belum optimalnya upaya penertiban bangunan liar;
3. Belum sempurnanya koneksi antar saluran serta tingginya sedimentasi saluran;
4. Tingginya tingkat pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan pertumbuhan jalan;
5. Belum sempurnanya aksesibilitas antar kawasan, kapasitas jalan dan jembatan;
6. Belum optimalnya daya tampung sekolah khususnya sekolah negeri untuk menampung lulusan jenjang sebelumnya;
7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
8. Masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja;
9. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh penduduk Kota Surabaya;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sehingga masih perlu ditingkatkannya pengawasan kecukupan gizi dan keamanan bahan pangan di masyarakat;
11. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin;
12. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin;
13. Masih rendahnya aksesibilitas keluarga miskin dalam usaha skala mikro;
14. Keterbatasan sistem jaringan kerjasama usaha dan pemasaran pelaku usaha skala mikro dan kecil;
15. Belum optimalnya pengelolaan lembaga dan usaha koperasi;
16. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat koperasi;
17. Rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang disebabkan belum selarasnya dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta rendahnya minat pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru;
18. Masih adanya lahan aset pemerintah kota yang bukti kepemilikannya baik secara administrasi maupun fisik kurang/tidak lengkap sehingga belum dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk diproses sertifikatnya/legalitasnya;
19. Kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan daerah ketentraman dan ketertiban;
20. Belum optimalnya prasarana olahraga di masyarakat dan sekolah yang berstandar nasional dan internasional;

21. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata;
22. Pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan kegiatan/usaha serta limbah rumah tangga;
23. Pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari suatu kegiatan/usaha;
24. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan sistem sanitasi terpadu dan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di Kota Surabaya;
25. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
26. Belum optimalnya partisipasi perempuan dan anak dalam mendukung pengarusutamaan gender;

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 Dan Perkiraan Tahun 2013

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Memasuki tahun 2012 dampak perlambatan ekonomi global diperkirakan mulai mempengaruhi kondisi domestik melalui jalur ekspor. Namun, dengan perkiraan masih kuatnya daya beli masyarakat serta tetap tingginya keyakinan konsumen, permintaan domestik diperkirakan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan PDRB. Dengan perkembangan tersebut, sepanjang tahun 2012 PDRB Kota Surabaya mencapai Rp264.335.620,09 juta atau setara dengan Rp101.671.633,57 juta bila dinilai dalam harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan meningkat pada tahun 2013, sehingga bisa mencapai Rp108.844.365,67 juta. Secara rinci Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

No.	Sektor	2012	2013 [*]
		(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	Pertanian	78.013,26	76.191,06
2	Pertambangan dan Penggalian	6.743,23	10.884,44
3	Industri Pengolahan	21.421.547,93	22.498.130,38
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.188.117,38	3.102.064,42
5	Konstruksi	6.782.218,21	7.727.949,96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	44.011.461,26	48.163.631,81
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12.054.700,61	12.136.146,77
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.613.389,33	6.421.817,57
9	Jasa-Jasa	8.515.422,36	8.707.549,25
	PDRB	101.671.633,57	108.844.365,67

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Mei 2013
Keterangan : ^{*}) tahun 2013 merupakan data perkiraan

Angka proyeksi di tahun 2013 mempertimbangkan masih adanya ketidakpastian dalam perekonomian dunia. Akan tetapi *global economic recovery* terus diusahakan di negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga diharapkan dapat memberi dampak positif pada aktivitas perdagangan internasional.

Sementara itu, dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Surabaya, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2013

diperkirakan mencapai Rp298.903215,31 juta,-. Berikut ini perkiraan nilai PDRB per sektornya pada tahun 2012 - 2013.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

No.	Sektor	2012	2013*
		(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	Pertanian	192.395,48	209.242,71
2	Pertambangan dan Penggalian	13.582,50	14.945,91
3	Industri Pengolahan	57.379.281,61	62.982.056,57
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.070.853,58	10.223.001,11
5	Konstruksi	18.154.474,45	21.312.864,89
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	117.525.130,35	135.021.333,42
7	Pengangkutan dan Komunikasi	26.887.741,57	28.636.359,84
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	16.032.979,68	17.128.010,64
9	Jasa-Jasa	20.079.180,87	23.375.400,21
	PDRB	264.335.620,09	298.903.215,31

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Mei 2013
Keterangan : *) tahun 2013 merupakan data perkiraan

b. Sumbangan Sektoral

Selama tahun 2011 dan 2012 tidak ada perubahan struktur kontribusi PDRB Kota Surabaya. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB. Peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor PHR adalah sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor pertanian dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Pola ini juga akan terus berlanjut di masa mendatang mengingat perekonomian Kota Surabaya relatif masih bertumpu pada kegiatan perdagangan dan jasa baik pariwisata maupun keuangan, sehingga pada proyeksi PDRB ADHK tahun 2013, struktur kontribusi PDRB sektoral diperkirakan masih tetap didukung oleh 3 sektor utama yaitu PHR, industri pengolahan serta pengangkutan dan komunikasi dengan jumlah peranan ketiganya diperkirakan sebesar 76,07% sebagaimana tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Kontribusi PDRB Sektoral berdasarkan Lapangan Usaha
(Atas Dasar Harga Konstan) Kota Surabaya
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

No.	Sektor	2012 (%)	2013* (%)
1	Pertanian	0,08	0,07
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	21,07	20,67
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,15	2,85
5	Konstruksi	6,67	7,10
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	43,29	44,25
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,86	11,15
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	6,50	5,90
9	Jasa-Jasa	8,38	8,00
	PDRB	100,00	100,00

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, 2013
Keterangan : *) tahun 2013 merupakan data perkiraan

c. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian dunia yang masih belum menunjukkan perbaikan pasca krisis keuangan di Eropa dan Amerika nyatanya berdampak pada aktivitas perdagangan internasional Kota Surabaya yang selanjutnya berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga menjadi kekuatan tersendiri untuk mendorong perekonomian Kota Surabaya, sehingga sampai dengan akhir tahun 2012 pertumbuhan ekonomi telah mencapai 7,62%.

Berlangsungnya pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus 2013 nanti diperkirakan dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat sehubungan dengan persiapan-persiapan serta sosialisasi pemilu. Selain itu, economic recovery dari negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa tetap terus diusahakan sehingga diharapkan mampu menjaga situasi perekonomian dunia semakin stabil dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat koreksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran 7,40-7,80%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	7,62
2013*	7,40-7,80

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Mei 2013
Keterangan : *) tahun 2013 merupakan data perkiraan

d. Inflasi

Tingkat inflasi Kota Surabaya pada tahun 2012 dapat terkendali, sehingga tingkatnya berada di bawah inflasi Provinsi yaitu 4,39%. Selanjutnya range angka proyeksi inflasi Kota Surabaya untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar 5 - 6% sebagai dampak dari adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan pada Januari 2013. Selain itu, dari sisi eksternal masih adanya kemungkinan meningkatnya harga pangan di pasar internasional terkait dengan iklim dan tingginya harga minyak dunia yang nantinya dapat menyebabkan semakin besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Adapun perkembangan tingkat inflasi di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Tingkat Inflasi di Kota Surabaya
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
2012	4,39
2013*	5,0-6,0

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Januari 2013
Keterangan : *) tahun 2013 merupakan data perkiraan

e. Investasi (PMA dan PMDN)

Tingkat investasi perusahaan berskala nasional (PMA dan PMDN) di kota Surabaya tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dimana tercatat sebanyak 24 proyek PMA dan PMDN dengan nilai investasi Rp4.695.081,57 juta dan \$11.184.152 dengan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 20.011 orang.

Adapun investasi pada tahun 2013 diprediksikan meningkat cukup signifikan dengan adanya rencana pembangunan moda transportasi massal (trem dan monorail). Selain itu kondisi perekonomian kota Surabaya yang cukup stabil didukung situasi yang aman dan kondusif juga mendorong peningkatan investasi. Berikut ini perkembangan nilai investasi dari PMA dan PMDN di kota Surabaya.

Tabel 3.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2009 s/d 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tahun	PMA & PMDN	
	Nilai Investasi	
	Rp (Milyar)	USD (Juta)
2009	567,11	5,32
2010	1.207,32	42,57
2011	748,13	25,43
2012	4.695,08	11,18
2013*	4.785,59	21,24

Sumber :BKPPM 2013, diolah

Keterangan : *) tahun 2013 merupakan data perkiraan

Tingkat investasi di Surabaya secara keseluruhan dapat di evaluasi dengan melihat nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk menentukan tingkat efisiensi dari investasi. Nilai ICOR yang memiliki produktifitas investasi yang baik berada pada kisaran 3 – 4. Adapun prediksi ICOR Kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar 3,31 (prediksi RPJMD Kota Surabaya) mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 3,34 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2009 s/d 2012 dan Proyeksi Tahun 2013

Uraian	2009	2010	2011	2012*	Prediksi 2013
ICOR	3,77	3,43	3,21	3,34	3,31

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2013

Keterangan : *) tahun 2012 merupakan angka sementara

f. Ekspor

Perdagangan dunia yang masih belum stabil dan sedang berada pada kondisi pemulihan ekonomi membuat kumulatif nilai ekspor dan impor Kota Surabaya bulan Januari hingga Desember 2012 masing-masing sebesar US\$ 15.448,54 juta dan US\$ 16.852,60 juta.

Kondisi perekonomian global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, volume perdagangan dunia kembali akan meningkat, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia umumnya dan Kota Surabaya pada khususnya ke beberapa negara sebagai pasar tujuan ekspor. Sejalan dengan kinerja ekspor, impor juga mengalami peningkatan. Impor barang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dan sektor produksi. Sementara itu, sebagian konsumsi masyarakat juga masih

memerlukan impor barang konsumsi meskipun persentasenya relatif kecil, sehingga pertumbuhan nilai ekspor dan impor di kota Surabaya pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan, dimana nilai ekspor bisa mencapai US\$ 18.915,35 juta dan nilai impor mencapai US\$ 18.795,70 juta. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Nilai Ekspor Kota Surabaya
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tahun		2012*	2013**
Ekspor	Nilai (Juta Us\$)	15.448,54	18.915,35
	Tingkat Perubahan (%)	-11,95	11,00 - 12,50
Impor	Nilai (Juta Us\$)	16.852,60	18.795,70
	Tingkat Perubahan (%)	5,51	11,50 - 14,00

Sumber: Bappeko dan Bank Indonesia, April 2013

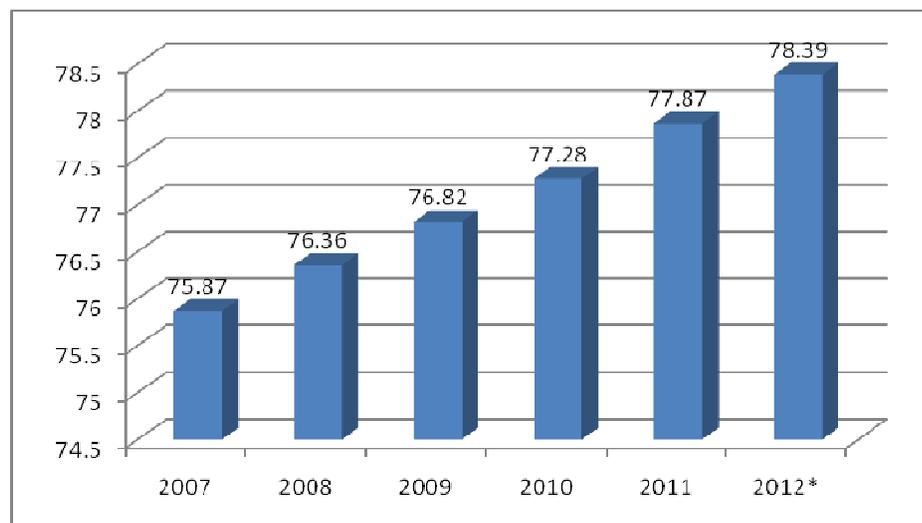
Keterangan : *) data sementara;

**) tahun 2013 merupakan data perkiraan berdasarkan Nota APBN 2013

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran secara menyeluruh tingkat pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Hal ini dapat dilihat perbandingan setiap tahunnya pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
IPM Kota Surabaya
Tahun 2007 s/d 2012



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013

Keterangan: *) tahun 2012 merupakan Angka Sementara

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, nilai IPM Kota Surabaya pada tahun 2012 sebesar 78,39. Dari gambar 3.1 diketahui bahwa, mulai tahun 2007 hingga tahun 2012, nilai IPM Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dengan

peningkatan nilai IPM yang positif, menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial menuju peningkatan kualitas hidup manusia.

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi pencari kerja di daerah Jawa Timur, sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, maupun Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun perbandingan TPT di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Kota Surabaya	Prov. Jatim	Nasional
2012	5,07	4,0 ¹⁾	6,46 ¹⁾
2013	5,20 ²⁾	5,4 – 5,6 ³⁾	5,8 – 6,1 ⁴⁾

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2013

1) : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

2) : Target RPJMD Kota Surabaya

3) : Target RPJMD Provinsi Jawa Timur

4) : Target RPJM Nasional

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 Dan Tahun 2015

Memperhatikan perkembangan perekonomian kota Surabaya hingga tahun 2012 serta proyeksi perekonomian tahun 2013, maka berikut ini tantangan dan prospek perekonomian kota Surabaya yang akan dihadapi dan berpengaruh pada tahun 2014 dan 2015:

a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

a.1. Kekuatan

Pertama: Perekonomian Kota Surabaya yang relatif stabil dan terjaga dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Meskipun pemulihan kondisi perekonomian global dan kebijakan nasional dapat berdampak pada kinerja perekonomian Kota Surabaya, namun

terjaganya daya beli masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat stabil diatas angka 7% di tahun 2014 dan 2015. Selain itu, variabel inflasi juga dapat terjaga di bawah angka 5%.

Kedua: Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang semakin terkendali diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi peningkatan perekonomian Kota Surabaya ke depannya. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran tercatat 5,15% dan menurun menjadi 5,07% di tahun 2012. Ditargetkan angka ini semakin menurun pada periode 2013-2015.

Ketiga: Iklim investasi di Kota Surabaya yang semakin baik, terlihat dari meningkatnya jumlah dan nilai investasi baik PMA maupun PMDN sejak tahun 2012. Hal ini tidak lepas dari tingkat kondusifitas daerah yang terjamin serta adanya fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang memudahkan birokrasi pelayanan perijinan, meskipun perlu terus dioptimalkan. Oleh karena itu di tahun 2013-2015 diharapkan dengan iklim investasi yang terjaga, nilai investasi di Kota Surabaya semakin meningkat.

Keempat: Kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini terlihat dari realisasi APBD yang meningkat di tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4,2 triliun dan Rp5,1 triliun. Ditargetkan, di tahun 2013 APBD Kota Surabaya dapat mencapai Rp5,7 triliun dan semakin meningkat jumlahnya di tahun 2014-2015, seiring dengan perekonomian Kota yang semakin stabil. Nilai APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

Kelima: Struktur keuangan Kota Surabaya yang semakin menunjukkan perbaikan, ditandai dengan meningkatnya capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2012 yaitu 97,37% atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaiannya pada 2011 yang hanya sebesar 88,17%. Capaian PAD ini diharapkan meningkat di tahun 2013-2015 mendatang, dikarenakan berjalannya manajemen pajak yang cukup baik.

Keenam: Infrastruktur Kota Surabaya yang sangat lengkap terutama ketersediaan sarana publik yang mudah dijangkau, menjadi pendukung kelancaran perekonomian kota. Selain itu, banyaknya taman kota yang tersebar di berbagai wilayah di Surabaya memperindah posisinya sebagai kota metropolitan. Di samping itu, banjir yang terjadi sudah bisa dikurangi dengan pembangunan box culvert pada beberapa titik rawan banjir di Kota Surabaya. Akses kota juga semakin baik dengan adanya Frontage Road Ahmad Yani, Lingkar Tengah Timur, rel kereta dari Jalur Utara ke Selatan yang sudah langsung terhubung melalui Stasiun Surabaya Kota, jalan tol ke Bandara Juanda, jalan tol dari Pelabuhan Tanjung Perak ke arah Gresik dan Sidoarjo serta Jembatan Suramadu ke arah Madura. Ketersediaan listrik serta air bersih tidak mengalami kelangkaan atau gangguan.

Ketujuh: Kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik melalui program urban farming, pembangunan sentra PKL yang semakin bertambah tiap tahunnya serta pemberian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan kewirausahaan. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan dengan program urban farming secara tidak langsung menjaga sektor pertanian di Surabaya agar tetap ada serta diharapkan dapat menjadi salah satu ikon pariwisata baru di Kota Surabaya.

Kedelapan: Sebagai pusat dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, perbankan dan jasa-jasa yang dapat menunjang perkembangan perekonomian kota. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana publik yang baik dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kualitas SDM yang baik dapat menjadi kekuatan bagi perkembangan perekonomian Kota Surabaya selanjutnya.

a.2. Kelemahan

Pertama: Kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) per triwulanan sepanjang tahun 2013 serta adanya peluang rencana kenaikan harga BBM dikhawatirkan berpotensi memberi tekanan cukup besar pada angka inflasi. Pelarangan impor beberapa produk hortikultura dan kondisi cuaca juga perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap produksi komoditas. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang mulai berlangsung di awal tahun 2013 sedikit banyak juga menjadi tekanan bagi sektor industri untuk melakukan efisiensi produksi tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada. Kebijakan pemerintah nasional khususnya yang dianggap beresiko menjadi catatan tersendiri bagi perkembangan perekonomian kota di tahun 2013. Oleh karena itu, usaha stabilitasi perekonomian secara makro menjadi perhatian utama bagi semua pihak.

Kedua: iklim usaha yang kondusif tidak diiringi dengan pelayanan perijinan UMKM yang optimal, terbukti dari relatif sulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM dikarenakan beberapa hambatan seperti kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, sehingga menyebabkan rendahnya daya saing produk UMKM, harga produk yang kurang kompetitif, pemasaran produk yang masih terbatas area lokal dan belum mampu melakukan pemasaran ke luar daerah. Oleh karena itu, program pendampingan UMKM/kewirausahaan penting dilakukan untuk membantu peningkatan daya saing produk UMKM di Kota Surabaya.

Ketiga: Beban dan belanja infrastruktur Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya. Disadari bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada suatu daerah dan selanjutnya berdampak

pada tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang mampu menopang pembiayaan infrastruktur Kota Surabaya ke depannya, baik dalam format kerjasama dengan pihak swasta maupun mekanisme-mekanisme inovatif lain yang tersedia (misalnya melalui surat berharga daerah maupun pinjaman ke pemerintah pusat).

Keempat: Beberapa project pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti perluasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda, menjadi hal yang mendesak karena frekuensi penggunaan oleh masyarakat yang semakin meningkat. Belum selesainya pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, pemasangan box culvert di wilayah Surabaya Barat serta pembangunan jalan lingkar tengah barat dapat menjadi kendala bagi kelancaran transportasi masyarakat. Diharapkan pembangunan ini dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat memperlancar aktivitas perekonomian warga kota.

Kelima: Jumlah penduduk Kota Surabaya yang melebihi 3 juta jiwa di tahun 2012, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Mekanisme pengendalian dan penataan jumlah penduduk ini perlu dilakukan agar sumberdaya manusianya semakin berkualitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dan memunculkan masalah-masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan (urban poverty), wilayah kumuh, kriminalitas dan sebagainya.

Keenam: Tersedianya fasilitas umum yang memadai serta membaiknya kinerja perekonomian kota, berpotensi menyebabkan tingginya arus urbanisasi ke Kota Surabaya dari kota-kota lain di sekitarnya, khususnya setelah selesai dibangunnya Jembatan Suramadu dan akses jalan penghubung lainnya.

Analisis Kondisi Eksternal

b.1. Peluang

Pertama: Kota Surabaya menjadi pusat perdagangan baik domestik maupun internasional di Indonesia Timur. Kebijakan perdagangan bebas dengan negara-negara Asean dan China sudah terbuka (melalui ACFTA), Penerapan skema kawasan ekonomi Asia (Asean Economic Community) maupun perjanjian dagang bilateral lainnya seperti perjanjian RI-Korsel dan Uni Eropa-RI yang akan dijalankan pada beberapa tahun mendatang, dapat membuka peluang bagi sektor perdagangan di Kota Surabaya untuk lebih berkembang di pasar Internasional, melalui skema perdagangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua: Kinerja perekonomian serta perdagangan di Kota Surabaya yang membaik dan berkontribusi besar pada PDRB kota menarik minat kabupaten/kota lainnya untuk

menjalin kerjasama dengan pemerintah kota, seperti pengelolaan Terminal Purabaya oleh pemerintah Kota Surabaya dan Sidoarjo, kerjasama sistem teknologi informasi dengan DIY Yogyakarta, serta kerjasama dengan pemerintah Banjarmasin dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa hubungan bilateral yang dijalin oleh pemerintah Kota Surabaya dengan beberapa negara seperti Jepang (sister city program) menjadi peluang bagi pemasaran investasi di Kota Surabaya. Dengan tumbuhnya perekonomian kota, maka akan berpotensi semakin memperkuat dan memperluasnya akses kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dengan daerah-daerah maupun negara-negara lainnya.

b.2. Ancaman

Pertama: Krisis keuangan yang melanda Amerika dan beberapa negara Eropa yang sedang dalam masa pemulihan (recovery) masih memiliki peluang terjadinya ketidakpastian dalam ekonomi dunia yang kemudian dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak pada perlambatan perekonomian Kota Surabaya. Terbukti neraca perdagangan luar negeri Kota Surabaya sempat mengalami defisit di triwulan IV tahun 2012. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor perlu dilakukan terutama penguatan ekspor antar pulau dan antar provinsi/kota. Sementara itu krisis energi yang ditandai dengan harga minyak dunia yang belum stabil dan masih menunjukkan tren meningkat, praktis akan mendorong inflasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Kedua: Ketidakstabilan cuaca/iklim terbukti dapat mempengaruhi peningkatan harga barang/komoditas pangan yang kemudian menekan inflasi Kota Surabaya ke angka yang lebih tinggi.

Ketiga: Perdagangan internasional yang semakin bebas seperti implementasi ACFTA dan beberapa perjanjian perdagangan bilateral lainnya dikhawatirkan akan berdampak pada daya saing produk lokal menjadi kurang kompetitif, jika struktur perdagangan daerah tidak dikuatkan terlebih dahulu. Bukan hanya produk barang tetapi di sektor jasa juga harus bersiap bersaing dengan jasa yang berasal dari luar negeri seperti perusahaan konstruksi, jasa kesehatan dan lainnya, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta daya saing produk-produk lokal perlu ditingkatkan melalui program-program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 Dan 2015

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp117.007.693,09 juta (atas dasar harga konstan) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 7,5 - 7,9%. Kemudian PDRB tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp125.900.277,77 juta dengan asumsi ekonomi tahun 2015 tumbuh 7,5 - 8,0%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Perkiraan Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Tahun 2014 dan Tahun 2015
(dalam juta rupiah)

No.	Sektor	2014*	2015*
1	Pertanian	81.905,39	88.130,19
2	Pertambangan dan Penggalian	11.700,77	12.590,03
3	Industri Pengolahan	23.811.065,54	25.217.825,64
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.826.151,56	4.305.789,50
5	Konstruksi	8.541.561,60	9.366.980,67
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	52.372.643,43	56.617.354,91
7	Pengangkutan dan Komunikasi	13.280.373,13	14.440.761,86
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	6.248.210,81	6.521.634,39
9	Jasa-Jasa	8.834.080,83	9.329.210,58
	PDRB	117.007.693,09	125.900.277,77

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, April 2013
Keterangan : *) Angka Proyeksi

2) Sumbangan Sektoral

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) diperkirakan masih menjadi sektor terbesar pada tahun 2014 dan 2015 dengan nilai kontribusi atas dasar harga konstan (Hk) diperkirakan mencapai 44,76% dan 44,97%. Selanjutnya, sektor industri pengolahan pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan kontribusinya mencapai 20,35% dan 20,03%. Sektor terbesar ketiga adalah pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi di tahun 2014 dan 2015 diperkirakan sebesar 11,35% dan 11,47%. Meningkatnya kontribusi dari sektor PHR dan pengangkutan tersebut sebagai kompensasi dari menguatnya sektor ekonomi yang bergerak di bidang jasa di Kota Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2014 dan 2015

No	Sektor	2014* (%)	2015* (%)
1	Pertanian	0,07	0,07
2	Pertambangan & Penggalian	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	20,35	20,03
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,27	3,42
5	Konstruksi	7,3	7,44
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	44,76	44,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,35	11,47
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,34	5,18
9	Jasa-Jasa	7,55	7,41
	PDRB	100	100

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, April 2013
Keterangan : *) Angka Proyeksi

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,8-7,2%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2014 diperkirakan mencapai 7,5-7,9% dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7,5-8,0% dengan asumsi tidak ada gangguan atau gejolak yang mengganggu stabilitas perekonomian domestik maupun ekonomi dunia. Faktor pendorong yang diperkirakan dapat menggerakkan perekonomian Kota Surabaya adalah berlangsungnya Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif yang akan berlangsung pada tahun 2014, sehingga diharapkan dapat menjadi insentif pendorong konsumsi dalam negeri yang kemudian berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya yang akan dilangsungkan pada tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dari tahun sebelumnya. Selengkapny dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2014 dan 2015

Uraian	2014*	2015*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,5-7,9	7,5-8,0

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Mei 2013
Keterangan : *) Angka Proyeksi

4) Tingkat Inflasi

Jika pada tahun 2013 tingkat inflasi didorong oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diperlakukan pada bulan Januari, maka kondisi di tahun 2014 dan 2015

diperkirakan lebih stabil, mengingat bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif. Selain itu dari sisi eksternal, pemulihan perekonomian dunia diharapkan juga dapat berjalan baik, sehingga tidak ada variabel atau kebijakan yang mengganggu perekonomian nasional. Tingkat inflasi Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan terjaga pada kisaran angka 4-5%, sedangkan tingkat inflasi nasional sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 diperkirakan sebesar 4,5%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel. 3.13
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya Tahun 2014 dan 2015

Uraian	2014*	2015*
Inflasi (%)	4 - 5	4 - 5

Sumber: Bappeko dan BPS Kota Surabaya, Januari 2013
Keterangan : *) Angka Proyeksi

5) Tingkat Investasi (PMA & PMDN)

Berdasarkan perkembangan nilai investasi perusahaan skala nasional (PMA dan PMDN) di Kota Surabaya selama 4 tahun terakhir dan kondisi perekonomian kota Surabaya yang stabil serta adanya rencana pembangunan kota yang berkesinambungan maka diproyeksikan nilai investasi akan meningkat secara signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Proyeksi Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Nilai Investasi	
	dalam miliar rupiah	dalam juta USD
2014*	5.978,06	25,93
2015*	7.170,53	29,92

Sumber: Bappeko, 2013, diolah
Keterangan : *) Angka Proyeksi

6) Ekspor

Nilai ekspor Kota Surabaya pada tahun 2014 diperkirakan mulai mengalami peningkatan seiring membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sehingga diharapkan dapat meningkat sebesar 12-14% atau kurang lebih mencapai US\$ 21.410,29 juta. Sedangkan nilai impor di tahun tersebut diperkirakan mencapai US\$ 21.235,38 juta. Performa positif ini diproyeksikan akan terus berlanjut di tahun 2015 dengan capaian ekspor sebesar US\$ 24.403,45 juta (meningkat 13-14,5%) dan impornya sebesar US\$ 24.218,95 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel. 3.15
Perkiraan Ekspor - Impor Kota Surabaya
Tahun 2014 dan 2015

Tahun		2014*	2015*
Ekspor	Nilai (Juta Us\$)	21.410,29	24.403,45
	Tingkat Perubahan (%)	12,0-14,0	13,0-14,5
Impor	Nilai (Juta Us\$)	21.235,38	24.218,95
	Tingkat Perubahan (%)	13,0-14,5	13,5-15,0

Sumber: Bappeko dan Bank Indonesia, April 2013

Keterangan : *) Angka Proyeksi

7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator IPM antara lain meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah. Di Kota Surabaya, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Di bidang pendidikan misalnya, terhitung mulai tahun 2011 dana BOPDA telah dialokasikan untuk seluruh siswa mulai jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya yakin bahwa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga semakin meningkat. Prediksi capaian untuk persentase angka melek huruf diperkirakan sebesar 99,29% pada tahun 2014 dan 99,79% pada tahun 2015. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, diprediksi sebesar 10,58 pada tahun 2014 dan 2015. Demikian pula untuk indikator kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup yang diprediksi mengalami peningkatan dari sebesar 72,66 tahun pada tahun 2014 menjadi sebesar 72,96 tahun pada tahun 2015. Dengan menghitung komposit nilai dari indeks pendidikan dan kesehatan, maka nilai IPM diprediksi semakin meningkat. Nilai IPM pada tahun 2014 diprediksi sebesar 79,16 dan meningkat menjadi 79,69 pada tahun 2015.

8) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya pada tahun 2014-2015 diestimasikan mengalami sedikit penurunan, dengan asumsi kondisi perekonomian berjalan sesuai dengan estimasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Tingkat Pengangguran Kota Surabaya
Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2014*	4,9 – 5,2
2015*	4,6 – 4,9

Sumber: Bappeko Surabaya, 2013
Keterangan : *) Angka Proyeksi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini terlihat dari data realisasi tahun 2011-2012 dan target tahun 2013-2015, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PAD.

Pada tahun 2013, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 50,48%. Angka kontribusi tersebut lebih tinggi dari tahun 2012, yaitu sebesar 49,19%. Sedangkan pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 49,86% dan 49,93% pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2011	3,759,034,427,311	1,886,514,301,581	50.19%
2	Realisasi 2012	4,634,301,938,654	2,279,613,848,833	49.19%
3	Target 2013	5,092,599,934,103	2,570,793,944,555	50.48%
4	Proyeksi 2014	5,586,403,261,778	2,785,382,696,012	49.86%
5	Proyeksi 2015	5,841,071,732,134	2,916,548,548,273	49.93%

Sumber : Bapeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 81,37% dan pada tahun 2015 sebesar 83,99% (tabel 3.18).

Tabel 3.18
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2011	1,886,514,301,581	1,488,358,147,753	78.89%
2	Realisasi 2012	2,279,613,848,833	1,852,977,636,887	81.28%
3	Target 2013	2,570,793,944,555	2,098,292,666,000	81.62%
4	Proyeksi 2014	2,785,382,696,012	2,266,522,735,000	81.37%
5	Proyeksi 2015	2,916,548,548,273	2,449,631,106,911	83.99%

Sumber : Bapeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 9,06% dan 9,08% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian tarif pajak retribusi pada Peraturan Daerah yang baru (tabel 3.19).

Tabel 3.19
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2011	1,886,514,301,581	209,834,317,888	11.12%
2	Realisasi 2012	2,279,613,848,833	183,482,993,435	8.05%
3	Target 2013	2,570,793,944,555	221,303,062,247	8.61%
4	Proyeksi 2014	2,785,382,696,012	252,443,185,683	9.06%
5	Proyeksi 2015	2,916,548,548,273	264,813,858,106	9.08%

Sumber : Bapeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 4,20% dan pada tahun 2015 sebesar 3,17% (tabel 3.20).

Tabel 3.20
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
terhadap PAD
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kontribusi
1	Realisasi 2011	1,886,514,301,581	75,962,115,306	4.03%
2	Realisasi 2012	2,279,613,848,833	97,696,057,373	4.29%
3	Target 2013	2,570,793,944,555	92,461,561,125	3.60%
4	Proyeksi 2014	2,785,382,696,012	116,943,761,958	4.20%
5	Proyeksi 2015	2,916,548,548,273	92,425,380,898	3.17%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2014 diproyeksikan menurun menjadi 5,37% dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian potensi riil yang ada di BLUD-RSUD Dr. Soewandhie. Demikian pula dengan tahun 2015 yang diproyeksikan sebesar 3,76% (tabel 3.21).

Tabel 3.21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap PAD
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2011	1,886,514,301,581	112,359,720,634	5.96%
2	Realisasi 2012	2,279,613,848,833	145,457,161,139	6.38%
3	Target 2013	2,570,793,944,555	158,736,655,183	6.17%
4	Proyeksi 2014	2,785,382,696,012	149,473,013,371	5.37%
5	Proyeksi 2015	2,916,548,548,273	109,678,202,358	3.76%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada tahun 2013, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 29,92%. Angka kontribusi tersebut lebih rendah dari tahun 2012, yaitu sebesar 30,92%. Sedangkan pada tahun 2014, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 30,66% dan 30,40% pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi
1	Realisasi 2011	3,759,034,427,311	963,419,947,354	25.63%
2	Realisasi 2012	4,634,301,938,654	1,433,067,691,897	30.92%
3	Target 2013	5,092,599,934,103	1,523,841,223,096	29.92%
4	Proyeksi 2014	5,586,403,261,778	1,712,933,561,498	30.66%
5	Proyeksi 2015	5,841,071,732,134	1,775,709,209,846	30.40%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan kontribusi obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 22,36% dan 23,45% pada tahun 2015 (tabel 3.23).

Tabel 3.23
Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2011	963,419,947,354	225,590,330,815	23.42%
1	Realisasi 2012	1,433,067,691,897	299,746,830,080	20.92%
2	Target 2013	1,523,841,223,096	284,850,437,468	18.69%
3	Proyeksi 2014	1,712,933,561,498	383,023,101,104	22.36%
4	Proyeksi 2015	1,775,709,209,846	416,376,691,472	23.45%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

2. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 0,76% dan 0,79% pada tahun 2015 (tabel 3.24).

Tabel 3.24
Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil bukan Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2011	963,419,947,354	8,692,232,539	0.90%
2	Realisasi 2012	1,433,067,691,897	18,467,773,817	1.29%
3	Target 2013	1,523,841,223,096	10,784,302,628	0.71%
4	Proyeksi 2014	1,712,933,561,498	13,002,385,240	0.76%
5	Proyeksi 2015	1,775,709,209,846	14,011,065,564	0.79%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap dana perimbangan pada tahun 2014 diproyeksikan menurun menjadi 72,70% dan 71,73% pada tahun 2015 (tabel 3.25).

Tabel 3.25
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	Kontribusi
1	Realisasi 2011	963,419,947,354	679,262,759,000	70.51%
2	Realisasi 2012	1,433,067,691,897	1,061,625,528,000	74.08%
3	Target 2013	1,523,841,223,096	1,160,025,693,000	76.13%
4	Proyeksi 2014	1,712,933,561,498	1,245,318,245,654	72.70%
5	Proyeksi 2015	1,775,709,209,846	1,273,731,623,310	71.73%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap dana perimbangan pada tahun 2014 diproyeksikan menurun menjadi 4,18% dan 4,03% pada tahun 2015 (tabel 3.26).

Tabel 3.26
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokas Khusus	Kontribusi
1	Realisasi 2011	963,419,947,354	49,874,625,000	5.18%
2	Realisasi 2012	1,433,067,691,897	53,227,560,000	3.71%
3	Target 2013	1,523,841,223,096	68,180,790,000	4.47%
4	Proyeksi 2014	1,712,933,561,498	71,589,829,500	4.18%
5	Proyeksi 2015	1,775,709,209,846	71,589,829,500	4.03%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tahun 2013, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 19,60%. Angka kontribusi tersebut lebih rendah dari tahun 2012, yaitu sebesar 19,89%. Sedangkan pada tahun 2014, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 19,48% dan 19,67% pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel 3.27.

Tabel 3.27
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2011	3,759,034,427,311	909,100,178,376	24.18%
2	Realisasi 2012	4,634,301,938,654	921,620,397,924	19.89%
3	Target 2013	5,092,599,934,103	997,964,766,452	19.60%
4	Proyeksi 2014	5,586,403,261,778	1,088,087,004,268	19.48%
5	Proyeksi 2015	5,841,071,732,134	1,148,813,974,015	19.67%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kontribusi objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 67,82% dan 68,19% pada tahun 2015 (tabel 3.28).

Tabel 3.28
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kontribusi
1	Realisasi 2011	909,100,178,376	509,508,087,368	56.05%
2	Realisasi 2012	921,620,397,924	594,448,090,669	64.50%
3	Target 2013	997,964,766,452	661,107,493,688	66.25%
4	Proyeksi 2014	1,088,087,004,268	737,945,095,168	67.82%
5	Proyeksi 2015	1,148,813,974,015	783,390,947,967	68.19%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

2. Kontribusi dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2014 diproyeksikan menurun menjadi 32,14%. Angka proyeksi dana penyesuaian dan otonomi khusus tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.29
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Kontribusi
1	Realisasi 2011	909,100,178,376	386,951,310,320	42.56%
2	Realisasi 2012	921,620,397,924	309,819,125,000	33.62%
3	Target 2013	997,964,766,452	334,460,943,736	33.51%
4	Proyeksi 2014	1,088,087,004,268	349,733,480,072	32.14%
5	Proyeksi 2015	1,148,813,974,015	364,983,924,000	31.77%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

3. Kontribusi dana bagi hasil lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2014 dan 2015 diproyeksikan menurun menjadi 0,04% (tabel 3.30).

Tabel 3.30
Kontribusi Dana Bagi Hasil Lainnya terhadap
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Dana Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	Kontribusi
1	Realisasi 2011	909,100,178,376	1,551,780,688	0.17%
2	Realisasi 2012	921,620,397,924	558,714,255	0.06%
3	Target 2013	997,964,766,452	2,396,329,028	0.24%
4	Proyeksi 2014	1,088,087,004,268	408,429,028	0.04%
5	Proyeksi 2015	1,148,813,974,015	439,102,048	0.04%

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 3.31.

Tabel 3.31
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Target 2013	Proyeksi 2014	Proyeksi 2015
1	PENDAPATAN DAERAH					
1	Pendapatan Asli Daerah	1,886,514,301,581	2,279,613,848,833	2,570,793,944,555	2,785,382,696,012	2,916,548,548,273
1.1.1	Pajak Daerah	1,488,358,147,753	1,852,977,636,887	2,098,292,666,000	2,266,522,735,000	2,449,631,106,911
1.1.2	Retribusi Daerah	209,834,317,888	183,482,993,435	221,303,062,247	252,443,185,683	264,813,858,106
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	75,962,115,306	97,696,057,373	92,461,561,125	116,943,761,958	92,425,380,898
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	112,359,720,634	145,457,161,139	158,736,655,183	149,473,013,371	109,678,202,358
1.2	Dana Perimbangan	963,419,947,354	1,433,067,691,897	1,523,841,223,096	1,712,933,561,498	1,775,709,209,846
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	225,590,330,815	299,746,830,080	284,850,437,468	383,023,101,104	416,376,691,472
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	8,692,232,539	18,467,773,817	10,784,302,628	13,002,385,240	14,011,065,564
1.2.3	Dana Alokasi Umum	679,262,759,000	1,061,625,528,000	1,160,025,693,000	1,245,318,245,654	1,273,731,623,310
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	49,874,625,000	53,227,560,000	68,180,790,000	71,589,829,500	71,589,829,500
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	909,100,178,376	921,620,397,924	997,964,766,452	1,088,087,004,268	1,148,813,974,015
1.3.1	Hibah	600,000,000	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	509,508,087,368	594,448,090,669	661,107,493,688	737,945,095,168	783,390,947,967
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	386,951,310,320	309,819,125,000	334,460,943,736	349,733,480,072	364,983,924,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	10,364,000,000	16,777,000,000	-	-	-
1.3.6	Dana Bagi Hasil Lainnya	1,551,780,688	558,714,255	2,396,329,028	408,429,028	439,102,048
1.3.7	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
1.3.8	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	125,000,000	17,468,000	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3,759,034,427,311	4,634,301,938,654	5,092,599,934,103	5,586,403,261,778	5,841,071,732,134

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Sejak tahun 2013, pendapatan daerah Kota Surabaya dikelola oleh 18 SKPD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.32 tentang Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per SKPD Tahun 2011 - 2014.

Tabel 3.32
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2011 s/d 2014

No.	SKPD	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Target 2013	Proyeksi 2014
1	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	23,544,764,966	14,562,091,366	34,928,579,454	35,522,510,000
2	Dinas Perhubungan	31,612,362,780	30,643,203,793	37,111,182,500	40,000,000,000
3	Dinas Kebakaran	1,755,553,278	1,225,409,953	2,030,648,477	2,030,648,477
4	Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan	31,251,706,545	40,467,518,000	41,242,862,985	45,219,521,485
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	91,265,265,755	76,752,021,997	58,154,229,003	77,324,349,995
6	Badan Lingkungan Hidup	7,479,458,535	7,625,197,441	8,000,000,000	8,136,000,000
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	624,460,000	1,251,051,319	1,000,000,000	1,359,700,000
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,446,107,500	1,299,545,000	1,000,000,000	1,000,000,000
9	RSUD Bhakti Dharma Husada	5,025,953,189	9,826,180,388	18,500,000,000	22,200,000,000
10	RSUD Dr. M. Soewandhi	35,750,681,135	49,417,253,321	66,022,613,312	54,922,513,000
11	Dinas Kesehatan	19,573,037,298	22,607,290,561	21,306,352,371	22,683,946,561
12	Dinas Koperasi & UMKM	229,558,333	13,174,996	314,782,500	314,782,500
13	Bagian Perlengkapan	701,706,900	1,110,344,000	1,010,800,000	1,110,000,000
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	454,856,825	378,312,510	403,239,850	450,008,300
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,617,618,348	2,590,941,520	3,416,405,640	3,641,937,500
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	3,504,247,343,346	4,374,465,273,208	4,793,311,525,909	5,265,675,871,960
17	Dinas Pertanian			507,552,000	311,472,000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika			4,339,160,102	4,500,000,000
19	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	438,888,379	18,920,780		
20	Badan Arsip dan Perpustakaan	15,104,200	48,208,500		
JUMLAH		3,759,034,427,311	4,634,301,938,654	5,092,599,934,103	5,586,403,261,778

Sumber :

Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2012 sebesar Rp4.634.301.938.654,- dan target tahun 2013 sebesar Rp5.092.599.934.103,-, maka pendapatan daerah pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp5.586.403.261.778,- atau meningkat sebesar Rp493.803.327.675,- (9,70%) dari tahun 2013 yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2014, PAD diperkirakan meningkat sebesar Rp214.588.751.457,- atau 8,35% dari target tahun 2013. Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2012 sebesar Rp1.852.977.636.887,- dan target tahun 2013 sebesar Rp2.098.292.666.000,-, maka

pendapatan pajak daerah pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp2.266.522.735.000,- atau meningkat sebesar Rp168.230.069.000,- (8,02%) dari tahun 2013.

2. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya ada 3 jenis yaitu retribusi jasa umum yang terdiri dari 13 jenis retribusi, retribusi jasa usaha yang terdiri dari 9 jenis retribusi dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari 4 jenis retribusi.

Berdasarkan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2012 sebesar Rp183.482.993.435,- dan target tahun 2013 sebesar Rp221.303.062.247,- serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka pendapatan retribusi daerah pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp252.443.185.683,- atau meningkat sebesar Rp31.140.123.436,- (14,07%) dari tahun 2013.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp116.943.761.958,- atau meningkat sebesar Rp24.482.200.833,- (26,48%) dari tahun 2013. Adapun sumber-sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD meliputi bagian laba atas Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Pasar Surya, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, PT. Bank Jatim, PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur/Bank UMKM Jawa Timur, PT. Surya Karsa Utama dan PT. Surya Artha Utama.

Pada tahun 2014, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD diproyeksikan sebesar Rp112.916.389.833,- atau meningkat sebesar Rp22.181.772.312,- (24,45%) dari tahun 2013.

b) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN berasal dari PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER), dimana pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp3.720.000.000,- atau meningkat sebesar Rp2.297.878.500,- dari tahun 2013.

c) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta berasal dari PT. STAR/Taman Remaja Surabaya, dimana pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp307.372.125,- atau meningkat sebesar Rp2.550.021,- (0,84%) dari tahun 2013.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang sah

Lain-lain PAD yang Sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah, BLUD RSUD dr.M.Soewandhie dan penerimaan lain-lain.

Berdasarkan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2012 sebesar Rp145.457.161.139,- dan target tahun 2013 sebesar Rp158.736.655.183,-, maka pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp149.473.013.371,- atau berkurang sebesar Rp9.263.641.812,- (-5,84%) dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan penyesuaian dengan potensi riil yang ada di BLUD-RSUD Dr. Soewandhie.

b. Dana Perimbangan

Pada tahun 2014, pendapatan dari dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp1.712.933.561.498,- atau meningkat sebesar Rp189.092.338.402,- (12,41%) dari target tahun 2013. Adapun rincian pendapatan dari dana perimbangan menurut obyek pendapatan diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2014, dana bagi hasil pajak diproyeksikan sebesar Rp383.023.101.104,- atau meningkat sebesar Rp98.172.663.636,- (34,46%) dari tahun 2013. Adapun rincian dana bagi hasil pajak sebagai berikut:

- a) Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp22.539.817.057,- atau menurun sebesar Rp10.457.324.665,- (-31,69%) dari tahun 2013. Pembagian dana bagi hasil pajak antara Pemerintah Pusat dengan kabupaten/kota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- b) Pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp331.703.120.698,- atau meningkat sebesar Rp97.731.944.516,- (41,77%) dari tahun 2013. Alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang merupakan pajak negara dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi dan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil.

- c) Pendapatan dari bagi hasil cukai tembakau pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp28.780.163.349,- atau meningkat Rp10.898.043.785,- (60,94%) dari tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah dana bagi hasil cukai tembakau di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pada tahun 2014, dana bagi hasil bukan pajak diproyeksikan sebesar Rp13.002.385.240,- atau meningkat sebesar Rp2.218.082.612,- (20,57%) dari tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp288.411.334,- atau menurun sebesar Rp100.519.882,- (-25,85%) dari tahun 2013;
- b) Pendapatan bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp4.575.100,- atau menurun sebesar Rp7.361.100,- (-61,67%) dari tahun 2013;
- c) Pendapatan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp289.738.431,- atau meningkat sebesar Rp35.258.887,- (13,86%) dari tahun 2013;
- d) Pendapatan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp11.663.901.000,- atau meningkat sebesar Rp1.977.116.411,- (20,41%) dari tahun 2013;
- e) Pendapatan bagi hasil dari pertambangan gas bumi pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp738.838.000,- atau meningkat sebesar Rp296.666.921,- (67,09%) dari tahun 2013;
- f) Pendapatan bagi hasil panas bumi pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp16.921.375,-

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada tahun 2014, dana alokasi umum diproyeksikan sebesar Rp1.245.318.245.654,- atau meningkat sebesar Rp85.292.552.654,- (7,35%) dari tahun 2013.

DAU merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat "*Block Grant*" dan besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Formula DAU menggunakan pendekatan *fiscal gap* (celah fiskal) yaitu selisih antara *fiscal needs* (kebutuhan fiskal) dikurangi dengan *fiscal capacities* (kapasitas fiskal) daerah dan Alokasi Dasar (AD). Adapun formula DAU sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana: AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

Variabel kebutuhan fiskal terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Variabel kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tahun 2014, dana alokasi khusus diproyeksikan sebesar Rp71.589.829.500,- atau meningkat sebesar Rp3.409.039.500,- (5%) dari tahun 2013. Penghitungan alokasi DAK dilakukan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2014, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp1.088.087.004.268,- atau meningkat Rp90.122.237.816,-(9,03%) dari tahun 2013. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut obyek pendapatan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tahun 2014, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diproyeksikan sebesar Rp739.945.095.168,- atau meningkat sebesar Rp76.837.601.480,- (11,62%) dari tahun 2013. Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun rincian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebagai berikut:

- a) Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp249.157.271.195,- atau meningkat sebesar Rp33.896.692.308,- (15,75%) dari tahun 2013;
- b) Pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp289.514.995.698,- atau meningkat sebesar Rp42.366.321.344,- (17,14%) dari tahun 2013;

- c) Pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp197.721.630.550,- atau meningkat sebesar Rp1.203.338.829,- (0,61%) dari tahun 2013;
- d) Pendapatan dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp1.475.695.054,- atau menurun sebesar Rp656.052.900,- (-30,78%) dari tahun 2013;
- e) Pendapatan bagi hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp75.502.671,- atau meningkat sebesar Rp27.301.899,- (56,64%) dari tahun 2013;

Khusus pendapatan bagi hasil dari PKB dan BBNKB yang diterima oleh kabupaten/kota, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, yaitu sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan prasarana jalan.

2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp349.733.480.072,- atau meningkat sebesar Rp15.272.536.336,- (4,57%) dari tahun 2013, yang terdiri dari dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya.

3. Dana Bagi Hasil Lainnya

Dana bagi hasil lainnya pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp408.429.028,- atau menurun sebesar Rp1.987.900.000,- (-82,96%). Hal ini dikarenakan tidak adanya bagi hasil penerimaan retribusi TERA dan IMTA.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah kota Surabaya terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2014, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5.962.581.475.047,- atau meningkat sebesar Rp242.482.312.945,- (4,24%) dari tahun 2013, dengan rincian:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp2.021.281.922.267,- dengan komposisi sebesar 33,90%;
2. Belanja langsung sebesar Rp3.941.299.552.780,- dengan komposisi sebesar 66,10%.

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2012 dan target tahun 2013, maka belanja tidak langsung pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat sebesar Rp59.354.231.535,- atau 3,03% dari tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp1.758.776.138.267,-;
2. Belanja hibah sebesar Rp247.754.784.000,-;
3. Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.651.000.000,-;
4. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp1.200.000.000,-;
5. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp1.900.000.000,-;
6. Belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,-.

Sedangkan untuk belanja langsung, berdasarkan realisasi tahun 2012 dan target tahun 2013, maka belanja langsung pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat sebesar Rp183.128.081.410,- atau 4,87% dari tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp415.521.889.225,-;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.734.526.393.081,-;
3. Belanja Modal sebesar Rp1.791.251.270.474,-

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2011-2012 dan target belanja daerah tahun 2013 serta proyeksi belanja daerah tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Target 2013	Proyeksi 2014	Proyeksi 2015
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,707,668,118,574	1,868,245,698,669	1,961,927,690,732	2,021,281,922,267	2,178,411,041,874
2.1.1	Belanja Pegawai	1,377,173,082,114	1,601,256,346,557	1,708,378,288,132	1,758,776,138,267	1,897,663,652,389
2.1.2	Belanja Bunga	2,903,307,374	2,223,619,192	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	325,744,017,586	258,999,514,331	235,325,228,371	247,754,784,000	265,996,389,485
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,046,730,000	867,500,000	1,651,000,000	1,651,000,000	1,651,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	1,200,000,000	4,673,174,229	1,200,000,000	1,200,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	644,213,000	644,208,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	156,768,500	3,054,510,589	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	2,046,042,295,317	2,430,904,524,412	3,758,171,471,370	3,941,299,552,780	4,023,048,343,149
2.2.1	Belanja Pegawai	337,939,443,824	307,548,751,752	418,044,632,488	415,521,889,225	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,164,991,205,504	1,210,639,630,540	1,608,107,422,736	1,734,526,393,081	
2.2.3	Belanja Modal	543,111,645,989	912,716,142,120	1,732,019,416,146	1,791,251,270,474	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	3,753,710,413,891	4,299,150,223,081	5,720,099,162,102	5,962,581,475,047	6,201,459,385,023
	Surplus/(Defisit)	5,324,013,420	335,151,715,573	(627,499,227,999)	(376,178,213,269)	(360,387,652,889)

Sumber: Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam kurun waktu 2010 - 2012 menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dengan meningkatnya pendapatan daerah melalui PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah obyek pajak dan retribusi sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Kebijakan pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2014 diarahkan pada:

1. optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. penyesuaian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah serta regulasi penetapan tarif berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
3. peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. peningkatan kontribusi laba BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
5. peningkatan kualitas pelayanan publik dengan diterapkannya *Surabaya Single Window* (SSW).

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah pemerintah kota Surabaya tahun anggaran 2014 dititikberatkan kepada kebutuhan masyarakat khususnya pada fungsi pelayanan dasar dan bidang-bidang yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian daerah, sehingga bisa memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, belanja daerah juga ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. fasilitasi penyelenggaraan layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. pemberian stimulus pembangunan bidang ekonomi sektor produktif dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal;
3. pengembangan sarana dan prasarana wilayah dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap perekonomian setempat, melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan antara lain jalan, jembatan, saluran, transportasi, ruang terbuka hijau, pemukiman, pedestrian dan lain-lain;

4. pemenuhan belanja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator program RPJMD dengan di dasari prinsip efektivitas, efisiensi dan berdaya guna;
5. peningkatan fasilitasi bagi UKM informal menjadi formal melalui pembangunan sentra-sentra PKL;
6. peningkatan revitalisasi pasar tradisional dalam rangka meminimalkan dampak pertumbuhan toko modern;
7. pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai non Guru dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang didasarkan pada:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pada penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan pemberian tambahan penghasilan sebagai bagian dari belanja pegawai yang didasarkan atas beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya;
 - Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang secara detail memberikan panduan lengkap tentang pembangunan sistem penilaian kinerja dan pemberian remunerasi (Tambahan Penghasilan Pegawai).

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

APBD pada tahun 2014 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp376.178.213.269,-. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan proyeksi defisit yang terjadi di tahun 2013, yaitu sebesar Rp627.499.227.999,-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2014, diproyeksikan sebesar Rp396.806.520.269,- atau menurun sebesar Rp247.165.376.200,-

dari tahun 2013. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan daerah, yang pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp20.628.307.000,-. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya sebesar Rp10.000.000.000,-; Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,- dan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama sebesar Rp628.307.000,-. Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2011 - 2012 serta target tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Target 2013	Proyeksi 2014	Proyeksi 2015
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	508,635,998,157	503,149,922,343	643,971,896,469	396,806,520,269	360,387,652,889
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	505,770,166,765	502,999,263,251	643,971,896,469	396,806,520,269	360,387,652,889
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,865,831,392	150,659,092	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,960,748,326	32,882,244,978	16,472,668,470	20,628,307,000	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	16,472,668,470	20,628,307,000	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	10,960,748,326	32,882,244,978	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	497,675,249,831	470,267,677,365	627,499,227,999	376,178,213,269	360,387,652,889
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	502,999,263,252	805,419,392,938	-	-	-
	PAGU ANGGARAN	3,052,040,821,820	4,041,743,310,288	3,758,171,471,370	3,941,299,552,780	4,023,048,343,149

Sumber : Bappeko dan DPPK, 2013, diolah dan Realisasi 2012 per tanggal 27 Mei 2013

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2014 dan tema pembangunan provinsi pada RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dengan tetap memperhatikan visi pembangunan pemerintah kota Surabaya tahun 2010-2015, yaitu **“Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan”**, maka tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2014 adalah:

“Pemantapan Ekonomi Lokal yang Berbasis Komunitas melalui Pemantapan Infrastruktur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Kota untuk Menuju Surabaya Lebih Baik”

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kota Surabaya tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan; 2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya; 	<p>Meningkatnya kualitas hidup warga kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
		<p>3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;</p> <p>4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial <p>Peningkatan Kualitas Pendidikan</p> <p>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</p>
2.	Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga	<p>1. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;</p> <p>2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;</p> <p>3. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;</p> <p>4. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah.</p>	<p>Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik yang Ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik</p> <p>Peningkatan Daya Saing Kota untuk Mendukung Iklim Investasi</p> <p>Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Peningkatan Kekayaan Daerah</p>
3.	Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional	<p>1. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas;</p> <p>2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;</p> <p>3. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;</p> <p>4. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan</p>	<p>Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja</p> <p>Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas</p> <p>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu</p> <p>Peningkatan taraf hidup dan</p>

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
		kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	kesejahteraan
4.	Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer; 2. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota; 3. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal. 4. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota. 	<p>Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan</p> <p>Terwujudnya revitalisasi dan pelestarian nilai budaya</p> <p>Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota</p>

4.2 Prioritas Pembangunan

Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014 dan berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan maka prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur;
- b. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- c. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- e. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Koperasi dan UMKM;
- f. Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
- g. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- h. Peningkatan peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga;
- i. Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang;
- j. Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta terjaminnya Kesetaraan Gender.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diatas, maka ditentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jalan serta jembatan beserta kelengkapannya untuk kelancaran lalu lintas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana drainase untuk mengantisipasi ancaman banjir;
3. Mewujudkan penataan dan pengembangan wilayah yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman/ rumah susun sederhana sesuai dengan tata ruang, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta pemerataan kesempatan pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pemerataan pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan kepedulian dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin;
7. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan UMKM yang diarahkan agar semakin berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik;
8. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan koperasi;
9. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
10. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk mewujudkan good governance;
11. Meningkatkan dan pembangunan prasarana olahraga di masyarakat dan sekolah yang berstandar nasional dan internasional;
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas seni budaya dan olahraga serta pelestarian kebudayaan daerah;
13. Meningkatkan sistem pengawasan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
14. Meningkatkan peran perempuan dan penguatan kelembagaan serta jaringan pengarusutamaan gender dan anak di berbagai bidang.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana Tabel 4.2 tentang Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
1	Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur			
	Program Pengendalian Banjir	Luas wilayah genangan	2111 ha	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata lama terjadinya genangan	60 menit	
		Rata-rata tinggi genangan yang terjadi	20 cm	
	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	% Cakupan layanan air bersih	88,06%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan/PDAM Surya Sembada
		% kebocoran air bersih	31,95%	
	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101	Dinas Kebakaran dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit	82%	
		Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran	91%	
	Program Utilitas Perkotaan	Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83,36%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	
	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23,73	Dinas Perhubungan
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21,47	
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72	
		Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20	
2	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	97%	Dinas Pendidikan dan Bapemas dan KB
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97%	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengkapan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Perlengkapan
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	100%	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	96,08%	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	1.936.800 orang	Badan Arsip dan Perpustakaan.
3	Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie.
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19	Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8	
	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Dr. M. Soewandhi	Kelas B	RSUD Dr. M. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	Dinas Kesehatan
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90%	
		Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	
	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	80,26%	
4	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	Dinas Sosial dan Kecamatan
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	60% (791)	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	Bapemas dan KB

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
5	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Koperasi dan UMKM			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 unit	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	100 unit	
		Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	75	Dinas Pemuda dan Olahraga.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan	92,92	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terbentuknya sentra produk pertanian	30 sentra	Dinas Pertanian
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan	17 kelurahan	Dinas Pertanian
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
		jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra	

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
6	Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja			
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5%	Dinas Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	75%	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal.
7	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan
	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	647	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	% penduduk yang berKTP	93%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kecamatan
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	90%	
	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti	6	Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	91%	
		% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	86%	
		Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5	
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp 2.785.382 (dln juta)	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11.07%) Rp 2.801.020 (dln juta)	
		% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203	Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat serta Bagian Bina Program
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	94,44%	Bagian Kerjasama

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	Bagian Hukum
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	96,71%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		Persentase penataan jabatan struktural	90,64%	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (<i>Core Business</i>) yang memiliki prosedur tetap	44%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perlengkapan serta Bagian Umum & Protokol.
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan	44%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	83%	Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	52.689 kunjungan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat.
	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	18,52%= 20 sistem	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	7%	
8	Peningkatan peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	200 Kelompok seni	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya atlit/organisasi olahraga yang berprestasi	1578	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya prasarana olahraga yang dikembangkan	242	
		Meningkatnya jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	43	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190.872 wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.296.157 wisatawan	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terbentuknya destinasi wisata	19 lokasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Prioritas-Program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
9	Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang			
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air limbah industri		Badan Lingkungan Hidup
		BOD	72%	
		COD	66%	
		TSS	66%	
		Kualitas air limbah domestik		
		BOD	46%	
		TSS	48%	
		Kualitas air limbah RS		
		BOD	63%	
		COD	62%	
		TSS	60%	
		Kualitas air limbah hotel		
		BOD	48%	
		COD	36%	
		TSS	42%	
	Kualitas udara emisi di kawasan industri			
	SO2	80%		
	NO2	70%		
	Program Penataan Ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81,12%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
10	Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta terjaminnya Kesetaraan Gender			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	Bapemas dan KB
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100%	Bapemas dan KB

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2014, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada Tabel 5.1 tentang Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 sebagaimana berikut.

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1900	Badan Arsip dan Perpustakaan			18.698.625.335
1,24	Kearsipan			1.210.638.411
1.24.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	83%	1.210.638.411
1.24.15.0008	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah unit kerja yang mendapat pembinaan sistem kearsipan	193 Unit Kerja	257.746.791
1.24.15.0009	Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	jumlah unit kerja yang mendapatkan penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah	51 Unit Kerja	68.292.525
1.24.15.0010	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Waktu Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	12 bulan	867.839.370
1.24.15.0011	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran	3 kali	16.759.725
1,26	Perpustakaan			17.487.986.924
1.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	1.936.800 orang	15.225.866.849
1.26.21.0008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	jumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	3 kegiatan	113.763.196
1.26.21.0011	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Bahan pustaka yang disediakan	139730 buku	5.794.126.567
1.26.21.0012	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Orang yang dibina tentang pengelolaan perpustakaan	250 orang	165.488.910
1.26.21.0013	Pengelolaan Layanan Baca	Waktu Pengelolaan layanan baca di 519 lokasi	12 bulan	9.152.488.176
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.814.511.686
1.26.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	1.814.511.686
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			447.608.389
1.26.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	447.608.389
800	Badan Kepegawaian dan Diklat			17.898.507.313
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			17.898.507.313
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203	542.552.597
1.20.20.0013	Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota	100 SK	542.552.597
1.20.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	96,71%	14.699.064.085
		Persentase penataan jabatan struktural	90,64%	
1.20.29.0001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan	450 orang	1.857.161.085

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.29.0002	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah	162 orang	2.238.466.836
1.20.29.0003	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	1178 orang	2.111.418.220
1.20.29.0004	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional	11230 orang	2.512.141.475
1.20.29.0006	Ujian Dinas Tingkat I	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I	80 orang	42.215.850
1.20.29.0007	Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS	Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya	2007 orang	238.569.595
1.20.29.0008	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan	1 sistem	147.219.900
1.20.29.0009	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan	750 orang	61.500.475
1.20.29.0011	Tes Kesehatan bagi PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan	540 orang	135.325.425
1.20.29.0012	Seleksi Penerimaan calon PNS dan Administrasi Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Administrasi Calon Peserta IPDN	19060 orang	1.848.945.910
1.20.29.0013	Peningkatan Wawasan Aparatur dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah Pegawai ditingkatkan wawasannya	1046 orang	1.465.417.505
1.20.29.0014	Penempatan Pegawai dan Promosi Jabatan	Jumlah PNS yang ditempatkan dan mengikuti fit and proper test	660 orang	873.116.709
1.20.29.0015	Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian	Waktu Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	573.750.055
1.20.29.0016	Pelayanan Kelengkapan Kepegawaian	Waktu pelaksanaan 4 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	12 bulan	593.815.045
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.290.777.623
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	2.290.777.623
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			366.113.008
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	366.113.008
2100	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			24.634.186.486
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			24.634.186.486
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	21.113.643.163
1.19.16.0002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan	12 bulan	1.272.585.220
1.19.16.0006	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis	Waktu pelaksanaan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	12 bulan	248.596.027
1.19.16.0007	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis	840 orang	851.078.628
1.19.16.0008	Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	141.603.474

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	
1.19.16.0009		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas	930 orang	1.925.548.051
1.19.16.0010		Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Waktu pelaksanaan pengerahan dan pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas	12 bulan	13.530.062.260
1.19.16.0011		Pemberdayaan dan Fasilitas Parpol, Ormas dan LSM	Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol, ormas dan LSM	700 orang	546.081.695
1.19.16.0012		Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan	400 orang	912.218.950
1.19.16.0013		Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	3 Kegiatan	1.685.868.858
x.xx.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.875.575.592
1.19.01.0019		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.875.575.592
x.xx.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.644.967.731
1.19.02.0045		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	1.644.967.731
B004	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal				5.956.464.610
1,16	Penanaman Modal				5.956.464.610
1.16.16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90%	4.009.057.549
1.16.16.0002		Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah kegiatan Fasilitas kemitraan UMKM dengan Pengusaha Skala Nasional	3 kali	191.134.680
1.16.16.0010		Fasilitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pelayanan perijinan	120 perusahaan	252.703.580
1.16.16.0011		Pelayanan UPTSA	Waktu pelaksanaan Pelayanan UPTSA	12 bulan	1.771.002.192
1.16.16.0012		Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah even promosi investasi yang dilaksanakan	2 even	313.499.266
1.16.16.0013		Penyusunan Pemetaan Potensi Investasi	jumlah dokumen pemetaan potensi investasi yang tersusun	5 Dokumen	865.528.500
1.16.16.0014		Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN	6 Dokumen	165.867.811
1.16.16.0015		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang mendukung investasi	Waktu pelaksanaan monitoring Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	12 bulan	121.678.000
1.16.16.0016		Pengelolaan dan pemutakhiran data investasi	Waktu pengelolaan dan pemutakhiran data investasi	12 Bulan	327.643.520
x.xx.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.644.573.221
1.16.01.0019		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.644.573.221
x.xx.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			302.833.840
1.16.02.0045		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	302.833.840
2900	Badan Lingkungan Hidup				19.456.811.261
1,01	Pendidikan				210.831.157
1.01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	210.831.157

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0082	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup	700 orang	210.831.157
1,08	Lingkungan Hidup			18.273.761.161
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air limbah domestik BOD	46%	15.534.633.831
		Kualitas air limbah domestik TSS	48%	
		Kualitas air limbah hotel BOD	48%	
		Kualitas air limbah hotel COD	36%	
		Kualitas air limbah hotel TSS	42%	
		Kualitas air limbah industri BOD	72%	
		Kualitas air limbah industri COD	66%	
		Kualitas air limbah industri TSS	66%	
		Kualitas air limbah RS BOD	63%	
		Kualitas air limbah RS COD	62%	
		Kualitas air limbah RS TSS	60%	
		Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	70%	
		Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	80%	
1.08.16.0001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	jumlah koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura yang dilaksanakan	55 kali	304.287.682
1.08.16.0017	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji guna pemantauan kualitas air laut	32 sampel	376.507.743
1.08.16.0018	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim	150 kali	1.361.994.459
1.08.16.0019	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup	1100 peserta	908.728.874
1.08.16.0020	Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan	1 aplikasi	587.844.460
1.08.16.0021	Pemantauan Kualitas Air	waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air	12 bulan	441.909.950
1.08.16.0022	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	430.677.005
1.08.16.0023	Operasional dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	waktu Operasional dan pengadaan 1 paket peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien	12 bulan	5.400.589.600
1.08.16.0024	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim yang dilaksanakan	3 dokumen	436.731.160

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.08.16.0026	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Waktu operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup	12 bulan	843.288.366
1.08.16.0027	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air	jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi terkait penggunaan sumber daya air	100 Kegiatan/Usaha	108.997.690
1.08.16.0028	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)	waktu operasional pelaksanaan DAK bidang LH	12 bulan	2.832.720.000
1.08.16.0029	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel yang diambil dan diuji untuk pengendalian dampak lingkungan	651 sampel	954.980.962
1.08.16.0032	Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	26 Kegiatan/Usaha	545.375.880
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.993.593.745
1.08.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.993.593.745
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			745.533.585
1.08.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	745.533.585
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			972.218.943
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	972.218.943
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0022	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan	Jumlah ijin gangguan yang diterbitkan	1000 ijin	972.218.943
3100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana			40.618.370.381
1,01	Pendidikan			218.560.600
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97%	218.560.600
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	97%	
1.01.15.0067	Pelatihan Bina Keluarga Balita	Jumlah peserta pelatihan bina keluarga balita	1000 Orang	218.560.600
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2.001.785.350
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	689.021.999
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Lembaga berbasis gender yang dibina	85 Lembaga	383.694.289
1.11.16.0006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	1000 orang	305.327.710
1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100%	1.312.763.351

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.11.17.0008	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terfasilitasi	200 kasus	517.912.186
1.11.17.0010	Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	11 Kegiatan	794.851.165
1,12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			7.894.357.508
1.12.15	Program Keluarga Berencana		Persentase peserta KB aktif	80,26%
1.12.15.0001	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	273 orang	553.296.044
1.12.15.0005	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah pelaksana program keluarga berencana yang dibina	5764 orang	307.117.736
1.12.15.0007	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 1577 Institusi Masyarakat Perkotaan Peduli Keluarga Berencana	12 Bulan	974.598.800
1.12.15.0008	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana	5 Item	1.513.568.870
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.588.248.715
1.12.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran		2.588.248.715
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.957.527.343
1.12.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	1.957.527.343
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			30.503.666.923
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan		jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang
1.22.20.0003	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	2500 Orang	236.602.650
1.22.20.0004	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pemanfaatan sumber daya alam	1487 orang	421.402.560
1.22.20.0006	Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Waktu Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	12 Bulan	1.727.402.005
1.22.20.0007	Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan	9872 orang	6.261.398.100
1.22.20.0008	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras miskin	Waktu Pelaksanaan program beras miskin	12 Bulan	17.541.516.526
1.22.20.0009	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan	Jumlah Peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan	1052 orang	248.925.302
1.22.20.0010	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	12 Bulan	567.596.610
1.22.20.0011	Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data gakin	160 Kelurahan	3.498.823.170
600	Badan Perencanaan Pembangunan Kota			17.058.776.258
1,06	Perencanaan Pembangunan			17.058.776.258
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%
				13.990.761.429

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.06.21.0013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun	5 dokumen	272.851.650
1.06.21.0014	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun	2 dokumen	370.064.850
1.06.21.0015	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen	589.029.470
1.06.21.0016	Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD	Jumlah dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD yang disusun	2 dokumen	77.803.740
1.06.21.0018	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	1 dokumen	129.454.830
1.06.21.0022	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan	2 kegiatan	262.386.729
1.06.21.0025	Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan	2 Dokumen	3.690.324.040
1.06.21.0026	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	5 dokumen	1.634.730.000
1.06.21.0028	Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	210.520.000
1.06.21.0029	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	712.270.000
1.06.21.0031	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen penunjang penyusunan perencanaan bidang aparatur pemerintahan	2 Dokumen	775.285.400
1.06.21.0032	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan	1 Dokumen	529.882.300
1.06.21.0033	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan	1 Dokumen	420.688.600
1.06.21.0034	Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Penunjang Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	1 Dokumen	394.578.600
1.06.21.0035	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus	2 dokumen	212.438.000
1.06.21.0036	Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi	3 dokumen	640.006.300
1.06.21.0037	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah dan PDRB yang disusun	7 Dokumen	658.123.720
1.06.21.0038	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya	4 Dokumen	570.010.700
1.06.21.0039	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun	2 Dokumen	379.400.000

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.06.21.0042	Penunjang Perhubungan dan Pematusan	Jumlah dokumen penunjang perhubungan dan pematusan	4 Dokumen	1.460.912.500
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.279.233.494
1.06.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	2.279.233.494
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			788.781.335
1.06.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasaran perkantoran	12 Bulan	788.781.335
305	Bagian Bina Program			6.453.802.689
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.013.211.220
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.013.211.220
1.06.21.0040	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD	Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun	5 Dokumen	1.115.037.900
1.06.21.0041	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	898.173.320
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.440.591.469
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203	2.213.502.930
1.20.20.0014	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Waktu pelaksanaan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan selama	12 Bulan	1.505.340.530
1.20.20.0015	Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung	Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak	100 Buku	708.162.400
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			988.443.956
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan 7 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran selama	12 Bulan	988.443.956
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.238.644.583
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan 46 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran selama	12 Bulan	1.238.644.583
310	Bagian Hubungan Masyarakat			6.004.318.441
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			1.260.052.902
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.042.363.672
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	1.042.363.672
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			217.689.230
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana prasarana	12 Bulan	217.689.230
1,25	Komunikasi dan Informatika			4.744.265.539

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	52.689 kunjungan	4.744.265.539
1.25.15.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Waktu Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	12 Bulan	534.829.315
1.25.15.0009	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Waktu pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	12 bulan	2.946.389.245
1.25.15.0010	Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	20 Dokumen	1.263.046.979
302	Bagian Hukum			3.909.875.808
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.909.875.808
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	3.067.846.933
1.20.26.0001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	65 Perkara/Kasus	1.663.066.200
1.20.26.0002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 Rancangan Produk Hukum	824.647.280
1.20.26.0004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Berlaku untuk 800 Orang	8 Kegiatan	301.126.173
1.20.26.0005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui lembaran daerah dan berita daerah	70 Produk Hukum	233.919.780
1.20.26.0006	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	12 Dokumen	45.087.500
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			748.655.375
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 Jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	748.655.375
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			93.373.500
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	93.373.500
304	Bagian Kerjasama			11.117.089.953
1,01	Pendidikan			5.240.310.458
1.01.17	Program Pendidikan Menengah			5.240.310.458
		Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
1.01.17.0070	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Jumlah Delegasi Pendidikan yang Difasilitasi Ke Luar Negeri	58 Orang	5.240.310.458

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			5.876.779.495
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	94,44%	5.324.771.721
1.20.25.0005	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Terhadap 8 Lembaga	8 Kegiatan	141.865.245
1.20.25.0006	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	13 Kegiatan	879.519.580
1.20.25.0007	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	14 Kegiatan	2.245.770.058
1.20.25.0008	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan fasilitasi delegasi internasional yang Dilaksanakan	10 Kegiatan	2.015.000.290
1.20.25.0009	Penyusunan Kajian dan laporan Kerjasama	Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun	10 Dokumen	42.616.548
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			482.526.274
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	482.526.274
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			69.481.500
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	69.481.500
B001	Bagian Kesejahteraan Rakyat			1.293.102.020
1,06	Perencanaan Pembangunan			809.213.042
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	809.213.042
1.06.21.0019	Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesehatan yang disusun	2 Dokumen	170.674.894
1.06.21.0020	Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan Keluarga	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang disusun	3 Dokumen	398.479.800
1.06.21.0021	Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang pendidikan yang disusun	2 Dokumen	240.058.348
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			483.888.978
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			355.933.978
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	355.933.978
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127.955.000
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/ Pengadaan jenis Sarana prasarana Perkantoran	12 Bulan	127.955.000
303	Bagian Organisasi dan Tata Laksana			2.033.964.451
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.033.964.451

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.366.693.015
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi pada 5 SKPD	9 Dokumen	341.206.800
1.20.31.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah Dokumen Analisa Kelembagaan yang disusun	2 Dokumen	113.628.100
1.20.31.0003	Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	2 Kegiatan	238.404.900
1.20.31.0005	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kerja yang Diukur IKM-nya	114 unit kerja	365.236.570
1.20.31.0008	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	1 Dokumen	18.779.310
1.20.31.0009	Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan	3 Kegiatan	100.662.600
1.20.31.0010	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	115.433.575
1.20.31.0011	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah SKPD yang Dimonitor dan Dievaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	12 SKPD	73.341.160
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			575.120.036
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 6 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	575.120.036
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			92.151.400
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	92.151.400
301	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah			4.419.684.229
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.419.684.229
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	3.553.899.588
1.20.32.0001	Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah patok batas wilayah yang terpasang	260 Patok	1.377.575.834
1.20.32.0002	Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	10836 orang	1.309.737.368
1.20.32.0003	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina administrasi umum dan pemerintahannya	191 SKPD	368.814.475
1.20.32.0004	Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun	3 Dokumen	46.716.877
1.20.32.0005	Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Toponimi	1 Dokumen	117.677.585
1.20.32.0006	Lomba Kelurahan Berhasil	Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil	160 Kelurahan	269.780.979
1.20.32.0009	Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya	1 Dokumen	63.596.470

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			728.506.841
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	728.506.841
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			137.277.800
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	137.277.800
B005	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah			1.500.017.688
1,06	Perencanaan Pembangunan			322.441.288
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	322.441.288
1.06.21.0024	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	monitoring dan evaluasi	12 bulan	322.441.288
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			1.177.576.400
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	680.875.000
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dln juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dln juta)	
1.20.17.0020	Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD	monitoring 6 BUMD	12 bulan	680.875.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			345.871.210
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	345.871.210
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			150.830.190
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	pemeliharaan dan pengadaan perkantoran	12 bulan	150.830.190
309	Bagian Perlengkapan			69.376.977.958
1,01	Pendidikan			41.622.527.555
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	33.596.998.715
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0083	Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tersedia	33 Item	33.596.998.715
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	8.025.528.840
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
1.01.17.0073	Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Menengah yang tersedia	22 Item	8.025.528.840
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			27.754.450.403
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	1.408.062.500
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0016	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Waktu pelaksanaan manajemen aset/barang daerah	12 bulan	811.702.500
1.20.17.0028	Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah	Jumlah dokumen Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah	4 Dokumen	596.360.000
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	10.489.154.735
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0014	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlayani	1200 Paket	4.475.188.575
1.20.31.0015	Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun	1 Dokumen	379.929.120
1.20.31.0016	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	7683 Stel	5.634.037.040
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.173.870.306
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.173.870.306
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.683.362.862
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	14.683.362.862
308	Bagian Umum dan Protokol			51.104.660.094
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			51.104.660.094
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	4.739.493.515
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan 50 item sarana sistem persandian	12 bulan	518.788.970
1.20.31.0013	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan 5 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	4.220.704.545
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			42.860.847.928
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan 10 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	42.860.847.928
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.504.318.651
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan 3 jenis pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	3.504.318.651
2300	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			421.297.458.921
1,01	Pendidikan			265.819.409.561
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	215.138.488.987
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0080	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lokasi sekolah pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun/direhabilitasi	66 lokasi	167.031.688.987
1.01.16.1081	pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)	Jumlah gedung pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun dalam tahun jamak	10 unit	48.106.800.000
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	50.680.920.574
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
1.01.17.0071	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Jumlah lokasi sekolah Pendidikan Menengah yang dibangun/direhabilitasi	11 lokasi	22.330.920.574
1.01.17.1072	pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)	Jumlah gedung pendidikan menengah yang dibangun dalam tahun jamak	5 unit	28.350.000.000
1,02	Kesehatan			25.992.932.916

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19	22.553.417.811
		jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8	
1.02.25.0024	Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi	6 unit	22.553.417.811
1.02.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	3.439.515.105
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B	
1.02.33.0007	Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi	Jumlah gedung RSD dr. Soewandhi yang dibangun	1 unit	3.439.515.105
1,04	Perumahan Rakyat			23.566.732.185
1.04.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91%	668.053.184
		Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101	
		Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	82%	
1.04.21.0001	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Jumlah gedung Pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang dibangun	1 unit	668.053.184
1.04.23	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	22.898.679.001
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	
1.04.23.0001	Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman	Jumlah permukiman yang dibangun sarana dan prasarana dasarnya	7 lokasi	16.275.126.372
1.04.23.0002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)	waktu operasional pengadaan sarana dan prasarana sanitasi yang dilaksanakan	12 bulan	6.623.552.629
1,05	Penataan Ruang			96.744.757.998
1.05.18	Program Penataan Ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81,12%	7.725.207.118
1.05.18.0001	Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen Regulasi Zoning RDTRK yang disusun	6 dokumen	2.904.322.464
1.05.18.0002	Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kotataan peningkatan infrastruktur kota	12 dokumen	175.925.756
1.05.18.0003	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang	24 dokumen	357.465.050
1.05.18.0004	Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah dokumen hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan yang disusun	3 dokumen	1.910.530.700

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.05.18.0005		Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan	Waktu Pengawasan Pengendalian dan Penertiban bangunan di 31 Kecamatan	12 bulan 772.864.360
1.05.18.0006		Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota	12 buku 857.402.248
1.05.18.0007		Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	waktu Kegiatan Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	12 bulan 266.849.140
1.05.18.0008		Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 berkas 105.944.450
1.05.18.0009		Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS	Jumlah dokumen hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS yang disusun	19 dokumen 280.965.700
1.05.18.0010		Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan	Jumlah kasus penataan ruang dan perijinan bangunan yang ditangani	6 kasus 92.937.250
x.xx.01		Program Pelayanan Administrasi		5.585.546.375
1.05.01.0019		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan 5.585.546.375
x.xx.02		Program Peningkatan Sarana dan		83.434.004.505
1.05.02.0045		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan 1.011.455.605
1.05.02.0046		Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi	84 unit 82.422.548.900
1,15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		5.441.863.943
1.15.17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok 5.441.863.943
1.15.17.0006		Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibangun	2 unit 5.441.863.943
1,17		Kebudayaan		1.373.200.000
1.17.17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	200 Kelompok seni 1.373.200.000
1.17.17.0008		Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra	Jumlah gedung Mitra yang dibangun dan diawasi	1 unit 1.373.200.000
1,2		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat		2.252.199.868
1.20.17		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80% 2.252.199.868
			% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)
			% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)
1.20.17.0021		Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah pelayanan perizinan (IMB, izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diproses	6002 berkas 2.252.199.868
1,24		Kearsipan		106.362.450

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.24.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	83%	106.362.450
1.24.15.0012	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan	12 bulan	106.362.450
2500	Dinas Kebakaran			62.945.028.898
1,04	Perumahan Rakyat			62.364.903.148
1.04.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91%	49.570.262.837
		Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101	
		Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	82%	
1.04.21.0002	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	waktu pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	3.471.895.000
1.04.21.0003	Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan	Jumlah Gedung/Bangunan yang keandalan sistem proteksi kebakarannya diperiksa	5940 gedung/bangunan	272.949.093
1.04.21.0004	Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan	132 kegiatan	712.889.320
1.04.21.0005	Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran	715 orang	631.865.625
1.04.21.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	1430 unit	19.051.101.279
1.04.21.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	2.688.062.520
1.04.21.1008	Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)	Jumlah pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran	1 unit	22.741.500.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			10.561.409.865
1.04.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 6 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	10.561.409.865
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			2.233.230.446
1.04.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara	12 bulan	2.233.230.446
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat			580.125.750
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	580.125.750
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0034	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi	76857 alat	580.125.750
3000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan			391.242.488.478
1,04	Perumahan Rakyat			149.978.775.093
1.04.22	Program Utilitas Perkotaan	Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83,36%	132.267.586.420

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.04.22.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipasang	3708 titik	49.228.230.813
1.04.22.0002	Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Waktu pelaksanaan pembayaran biaya rekening listrik untuk PJU	12 bulan	83.039.355.607
1.04.23	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	17.711.188.673
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	
1.04.23.0005	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam	Waktu pemeliharaan 13 makam dan pembangunan sarana dan prasarana makam di 59 lokasi	12 bulan	17.711.188.673
1,08	Lingkungan Hidup			240.602.230.630
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%	39.119.343.154
1.08.24.0005	Penataan RTH	Jumlah lokasi Ruang terbuka Hijau yang ditata di Kota Surabaya	34 lokasi	12.394.705.289
1.08.24.0015	Pengembangan Dekorasi Kota	Waktu pelaksanaan kegiatan dekorasi kota	12 bulan	2.745.753.183
1.08.24.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan prasarana taman rekreasi	12 bulan	6.039.336.732
1.08.24.0017	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Waktu pelaksanaan pemeliharaan taman dan jalur hijau	12 bulan	17.939.547.950
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	192.783.679.308
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	15 Jenis	15.238.984.132
1.08.25.0003	Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan	waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 26 lokasi	12 bulan	3.912.947.239
1.08.25.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah kegiatan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan sampah mandiri	6 Kegiatan	1.908.340.500
1.08.25.0005	Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah	Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah	12 Bulan	495.925.000
1.08.25.0006	Operasional Pengangkutan Sampah	Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah	12 Bulan	24.488.277.629
1.08.25.0007	Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun	1 dokumen	269.380.000
1.08.25.0008	Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih	Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT	365 hari	1.155.247.700
1.08.25.0009	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 229 kendaraan operasional dan 17 alat berat	12 bulan	32.524.942.059
1.08.25.0010	Operasional Pengolahan Sampah	Waktu pelaksanaan operasional pengolahan sampah	365 hari	61.229.177.100

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.08.25.0011	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan	104 Hari	871.940.000
1.08.25.0012	Operasional Penyapuan Jalan	Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan seluas 832.402 m2	365 Hari	41.646.640.200
1.08.25.0013	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah di saluran	12 Bulan	9.041.877.749
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.845.040.395
1.08.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	7.845.040.395
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			854.167.773
1.08.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	854.167.773
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			661.482.755
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	661.482.755
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0032	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan di 31 kecamatan	12 bulan	661.482.755
3300	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			24.966.301.346
1,17	Kebudayaan			11.883.110.197
1.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	200 Kelompok seni	4.852.897.307
1.17.17.0001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	waktu pelaksanaan fasilitasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi 376 kelompok seni	12 bulan	2.643.594.315
1.17.17.0005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti	10 Festival	2.209.302.992
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.237.795.343
1.17.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jangka waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	6.237.795.343
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			792.417.547
1.17.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	792.417.547
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			260.999.573
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	260.999.573
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0033	Pelayanan Pendaftaran Usaha Kepariwisata	Jumlah ijin kepariwisataan yang diterbitkan	700 Ijin	260.999.573
2,04	Pariwisata			12.822.191.576
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190.872 wisatawan	11.186.306.785
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.296.157 wisatawan	
2.04.15.0004	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah forum Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata yang dilaksanakan	6 Forum	193.445.905
2.04.15.0005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan	11 promosi	3.280.578.169
2.04.15.0009	Penyelenggaraan Festival Kuliner	Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan dan diikuti	4 Festival	697.829.705
2.04.15.0010	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel	Waktu Pelaksanaan 6 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel	12 bulan	436.756.887
2.04.15.0011	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI	Waktu Pelaksanaan 10 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI	12 bulan	805.650.719
2.04.15.0012	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas	Waktu Pelaksanaan 15 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas	12 Bulan	2.044.370.823
2.04.15.0013	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR	Waktu Pelaksanaan 112 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR	12 bulan	1.103.581.788
2.04.15.0014	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November	Waktu Pelaksanaan 4 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November	12 bulan	1.302.420.460
2.04.15.0015	Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata	Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata	9 Event	789.899.969
2.04.15.0016	Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata	Jumlah Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata yang dibina	150 Orang	225.741.860
2.04.15.0017	Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya	Jumlah dokumen direktori pariwisata Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen	306.030.500
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terbentuknya destinasi wisata	19 lokasi	1.635.884.791
2.04.16.0006	Pengembangan daerah tujuan wisata	waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata di 3 lokasi	12 bulan	792.857.238
2.04.16.0008	Pengelolaan Cagar Budaya	waktu pengelolaan 165 bangunan dan 10 situs cagar budaya	12 Bulan	843.027.553
3200	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			13.950.110.454
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			13.950.110.454
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	9.874.897.471
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu pelaksanaan 13 jenis Layanan Publik dalam Bidang Kependudukan yang dilaksanakan	12 bulan	5.280.429.076
1.10.15.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Waktu pelaksanaan 5 Layanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	12 bulan	2.195.183.967

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan			Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.10.15.0016			Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Waktu Publikasi bidang kependudukan yang dilaksanakan melalui 10 media	12 bulan	1.580.002.576
1.10.15.0017			Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak	1 dokumen	372.148.800
1.10.15.0018			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen profil Perkembangan kependudukan yang disusun	1 dokumen	447.133.052
x.xx.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.132.573.953
1.10.01.0019			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	3.132.573.953
x.xx.02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			942.639.030
1.10.02.0045			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	942.639.030
1700	Dinas Kesehatan					308.191.295.447
1,02	Kesehatan					308.191.295.447
1.02.16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	190.859.591.718
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
1.02.16.0007			Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	2.991.482.384
1.02.16.0009			Peningkatan kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	1.141.943.000
1.02.16.0014			Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah sampel sanitasi lingkungan yang diuji	5305 sampel	3.567.387.480
1.02.16.0017			Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang dilaksanakan	922 Kegiatan	703.839.760
1.02.16.0018			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Waktu Pelaksanaan 4 layanan Kesehatan Khusus di 62 Puskesmas	12 Bulan	25.426.424.640
1.02.16.0019			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diuji	304 sampel	118.581.460
1.02.16.0020			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	Jumlah pelatihan kepada 1500 kader dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan	23 Pelatihan	759.821.160
1.02.16.0021			Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi dalam Sertifikasi dan Akreditasi	900 orang	161.258.440
1.02.16.0022			Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang dilaksanakan	5 kegiatan	599.519.160
1.02.16.0023			Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas (DAK bidang kesehatan)	Ketersediaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas	92 Item	6.856.324.200
1.02.16.0024			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya / rumah sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	142.957.113.550
1.02.16.0026			Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi 2.170 Penderita Penyakit Menular	12 Bulan	5.575.896.484

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19	45.987.918.900
		jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8	
1.02.25.0025	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Waktu layanan kesehatan spesialis di 21 puskesmas yang dilaksanakan	12 Bulan	375.803.000
1.02.25.0026	Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah dokumen pengembangan standart pelayanan kesehatan	3 dokumen	572.916.500
1.02.25.0027	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan	130 Item	6.171.628.595
1.02.25.0028	Operasional Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan	12 Bulan	35.270.780.956
1.02.25.0029	Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	8 Jenis	3.596.789.849
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	29.663.778.080
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90%	
		Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90%	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	
1.02.32.0004	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Waktu pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan	12 Bulan	20.528.061.920
1.02.32.0005	Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi	4108 orang	9.135.716.160
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33.777.438.578
1.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	33.777.438.578
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.902.568.171
1.02.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Layak	12 Bulan	7.902.568.171
2700	Dinas Komunikasi dan Informatika			30.803.017.931
1,01	Pendidikan			2.209.462.020
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	2.209.462.020

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0089	Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan	Jumlah lokasi pendidikan yang memanfaatkan layanan Internet 552 lokasi	12 Bulan	2.209.462.020
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			180.938.080
1.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	100%	180.938.080
1.20.24.0002	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat	12 Bulan	180.938.080
1,25	Komunikasi dan Informatika			28.412.617.831
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	52.689 kunjungan	2.157.065.755
1.25.15.0003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan	20 Kali	307.254.180
1.25.15.0011	Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id	1872 Materi	600.795.565
1.25.15.0012	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan	107 kali	1.249.016.010
1.25.19	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	18,52% = 20 sistem	23.625.131.978
		Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	7%	
1.25.19.0001	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pembangunan Jaringan Fiber Optik	5 SKPD	4.312.343.340
1.25.19.0002	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi	12 Bulan	12.679.327.949
1.25.19.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data	Jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data	10 Sistem	1.865.706.385
1.25.19.0004	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan 4 jenis sistem informasi pelayanan publik	12 Bulan	862.950.000
1.25.19.0005	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengawasan dan penertiban perijinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi	36 Kali	187.041.042

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.25.19.0006	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Jumlah pembangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya	12 Gedung	278.167.770
1.25.19.0007	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi	12 Bulan	1.440.169.680
1.25.19.0008	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan	12 Bulan	352.721.790
1.25.19.0009	Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software	Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software	12 Bulan	448.909.466
1.25.19.0010	Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	20 Kali	1.197.794.556
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.010.940.852
1.25.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	2.010.940.852
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			619.479.246
1.25.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	619.479.246
1500	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			24.566.496.418
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			7.139.820.911
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok	2.421.981.133
1.15.17.0007	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah kelompok usaha mikro-kecil yang difasilitasi menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha	5 kelompok	703.946.509
1.15.17.0008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jangka waktu pendampingan pembinaan usaha bagi 5 kelompok usaha mikro-kecil	12 bulan	542.133.084
1.15.17.0009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm	23 kegiatan	1.175.901.540
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit	2.773.893.330
		Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	100 unit	
		Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 unit	
1.15.18.0004	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian	1630 orang	545.677.334
1.15.18.0006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha	150 koperasi	345.626.076
1.15.18.0010	Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru	Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk	30 koperasi	242.254.363
1.15.18.0011	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya	300 koperasi	727.810.311
1.15.18.0012	Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT	Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya	200 koperasi	342.163.018

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.15.18.0013	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT	Jumlah koperasi aktif belum RAT yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya	120 koperasi	271.487.558
1.15.18.0015	Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang direvitalisasi	100 koperasi	298.874.670
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.308.099.393
1.15.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 8 jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	1.308.099.393
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			635.847.055
1.15.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	635.847.055
2,06	Perdagangan			17.426.675.507
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra	17.426.675.507
		Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	
2.06.19.0001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jangka waktu pendampingan pembinaan di 21 sentra PKL yang telah terbangun	12 bulan	598.720.780
2.06.19.0003	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah lokasi usaha PKL yang ditata	15 lokasi	15.317.761.837
2.06.19.0005	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah sentra PKL terbangun yang mendapatkan pengawasan mutu dagangan	36 sentra	1.510.192.890
2600	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			987.046.829.993
1,03	Pekerjaan Umum			895.561.735.873
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Luas wilayah genangan	2111 ha	339.398.450.984
		rata-rata Lama terjadinya genangan	60 menit	
		rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	20 cm	
1.03.28.0012	Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	17 lokasi	106.813.462.870
1.03.28.0013	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan	35 dokumen	10.987.130.789
1.03.28.0014	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota	72 dokumen	7.127.454.306
1.03.28.0015	Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pematusan kota	3 jenis	48.112.686.753
1.03.28.0016	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan	12 bulan	13.115.879.045
1.03.28.0018	Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	waktu pelaksanaan posko pengendalian dan penanggulangan banjir	12 bulan	1.293.445.000
1.03.28.0021	Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai	Jumlah lokasi rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	470 lokasi	117.503.450.167
1.03.28.0022	Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai	Terpeliharanya saluran pematusan/sungai/kali	12 bulan	16.725.890.210
1.03.28.1019	Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	2 lokasi	16.819.975.844

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.03.28.1020	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematuan	1 dokumen	899.076.000
1.03.31	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	% Cakupan Layanan Air Bersih	88,06%	2.150.347.489
		% kebocoran air bersih	31,95%	
1.03.31.0002	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)	Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun	36 lokasi	1.919.775.489
1.03.31.0003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih	2 dokumen	230.572.000
1.03.32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit	529.032.792.589
1.03.32.0001	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dibangun/ditingkatkan	10 lokasi	74.681.185.425
1.03.32.0002	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab	19 lokasi	38.918.661.791
1.03.32.0003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan	42 dokumen	11.638.083.580
1.03.32.0004	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan	75 dokumen	8.663.161.088
1.03.32.0005	Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang direhab/dipelihara	101 lokasi	28.327.979.413
1.03.32.0006	Pengadaan Tanah	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan	9 lokasi	248.837.253.220
1.03.32.0007	Pembangunan Kelengkapan Jalan	Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan	15 lokasi	82.588.740.707
1.03.32.0008	Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut	Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana bina marga	12 bulan	5.635.384.623
1.03.32.0009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	4 dokumen	1.891.071.000
1.03.32.0010	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan	12 dokumen	1.844.313.750
1.03.32.0012	Koordinasi Jaringan Utilitas	waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas	12 bulan	169.798.000
1.03.32.0013	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan kelengkapannya	12 bulan	22.233.156.992
1.03.32.1014	Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)	jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab	2 lokasi	3.348.817.000
1.03.32.1015	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	1 dokumen	255.186.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			18.931.508.983
1.03.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	18.931.508.983
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.048.635.828

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.03.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 bulan	6.048.635.828
1,04	Perumahan Rakyat			91.485.094.120
1.04.23	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	91.485.094.120
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	
1.04.23.0004	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman	419 lokasi	91.485.094.120
306	Dinas Pemuda dan Olahraga			81.147.998.988
1,18	Kepemudaan dan Olah Raga			81.147.998.988
1.18.16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	75	5.735.426.135
1.18.16.0010	Fasilitasi peningkatan peran kepemudaan	jumlah kegiatan peningkatan peran kepemudaan yang difasilitasi	25 kegiatan	693.072.334
1.18.16.0011	Pengembangan Kewirausahaan pemuda mandiri	jenis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri	2 kegiatan	482.026.520
1.18.16.0012	Pengembangan kreatifitas dan aktualisasi kepemudaan	jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Aktualisasi Kepemudaan	5 kegiatan	712.362.570
1.18.16.0013	Penumbuhan jiwa sosial kepemudaan	jumlah kegiatan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan yang dilaksanakan	9 kegiatan	631.488.270
1.18.16.0014	Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja	Jumlah Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja yang dilaksanakan	15 Kegiatan	690.281.341
1.18.16.0015	Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan	jumlah kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan yan dilaksanakan	5 kegiatan	412.996.400
1.18.16.0016	Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	4505 Orang	2.113.198.700
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi	1578	73.011.411.658
		meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	43	
		meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan	242	
1.18.20.0005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	30 Kegiatan	3.289.282.726
1.18.20.0008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pelaku olahraga yang mendapatkan penghargaan	1852 orang	8.912.545.786
1.18.20.0010	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan	29 Kegiatan	1.731.860.024
1.18.20.0011	Pengembangan olahraga rekreasi	Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	8 Kegiatan	1.332.664.160
1.18.20.0014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	6 kegiatan	3.007.965.756

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan			Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.18.20.0019			Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga	Waktu operasional dan pemeliharaan 4 Gedung dan Lapangan Olahraga	12 bulan	2.692.344.346
1.18.20.0020			Peningkatan SDM dan Manajemen Olahraga Prestasi	jumlah kegiatan peningkatan SDM dan manajemen olahraga prestasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	652.124.726
1.18.20.0021			Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan	45 lokasi	24.306.587.534
1.18.20.0022			Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi	penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi	13 Kali	23.421.358.713
1.18.20.0023			Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo	12 bulan	3.664.677.887
x.xx.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.655.606.426
1.18.01.0019			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.655.606.426
x.xx.02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			745.554.769
1.18.02.0045			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	745.554.769
900	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan					42.153.619.526
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					42.153.619.526
1.20.17			Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	34.405.057.983
				% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
				% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0027			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan	6 Kali	150.105.095
1.20.17.0037			Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keuangan	4 Dokumen	747.340.375
1.20.17.0038			Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan	12 kali	7.879.638.831
1.20.17.0039			Pengembangan Sistem Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak Daerah yang Dikembangkan	3 Sistem	2.336.888.600
1.20.17.0040			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan penetapan 749.595 wajib pajak daerah	108 Dokumen	16.241.224.518
1.20.17.0041			Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun	15 Dokumen	977.442.451
1.20.17.0042			Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Waktu Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang disediakan	12 Bulan	271.075.894
1.20.17.0043			Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Dearah	12 Dokumen	185.833.360

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.17.0044	Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Jumlah berkas SPM dan SKPP yang diteliti, dinilai, dan diterbitkan	18840 Berkas	650.071.875
1.20.17.0045	Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD	Jumlah Dokumen APBD, Perubahan APBD Tahun 2014 dan RAPBD Tahun 2015	24 Dokumen	996.373.705
1.20.17.0046	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Bahan Anggaran kas yang disusun	2 Dokumen	129.487.370
1.20.17.0047	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak	Jumlah kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak yang dilaksanakan	4 Kali	297.619.596
1.20.17.0048	Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang dilaksanakan	4 Kali	84.257.120
1.20.17.0049	Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan dan pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi pajak daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	3.457.699.193
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.676.963.350
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan penyediaan 11 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	5.676.963.350
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.071.598.193
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan pemeliharaan pada 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 Bulan	2.071.598.193
2000	Dinas Pendidikan			521.702.418.591
1,01	Pendidikan			521.702.418.591
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97%	23.290.956.175
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	97%	
1.01.15.0059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di 2690 lembaga	7 kegiatan	23.290.956.175
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	275.000.925.673
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0084	Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan	Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan dasar	12 Bulan	96.868.254.450
1.01.16.0085	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Jumlah peserta ujian nasional SD dan SMP	86782 siswa	1.944.838.225

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.01.16.0086		Peningkatan mutu pembelajaran DIKDAS	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	3864 orang 597.767.648
1.01.16.0087		Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pembinaan kepada 94 lembaga pelayanan pendidikan dasar	12 bulan 12.905.028.630
1.01.16.0088		Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) jenjang Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 463 SD dan 64 SMP Negeri	12 bulan 113.333.676.000
1.01.16.0092		Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan dasar di 516 lembaga	12 bulan 39.943.980.000
1.01.16.0093		Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS	100 lembaga 69.727.600
1.01.16.0094		Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	38330 orang 2.714.931.445
1.01.16.0095		Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	1344 orang 517.874.700
1.01.16.0096		Pengadaan perlengkapan sekolah DIKDAS	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan dasar	65 sekolah 6.104.846.975
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	140.661.680.374
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
1.01.17.0066		Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	234 sekolah 598.681.630
1.01.17.0074		Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Jumlah peserta ujian nasional SMA dan SMK	38102 siswa 196.944.700
1.01.17.0075		Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	800 orang 1.440.124.240
1.01.17.0076		Penerimaan Peserta Didik Baru	Waktu persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru	3 bulan 1.644.684.454
1.01.17.0077		Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah	waktu pelaksanaan pembinaan kepada 17 lembaga pelayanan pendidikan menengah	12 bulan 4.692.318.520
1.01.17.0078		Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) jenjang Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 26 SMA dan 10 SMK Negeri	12 bulan 76.775.808.000
1.01.17.0079		Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan	Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan (DIKMEN)	12 bulan 44.145.932.050
1.01.17.0081		Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan menengah di 32 lembaga	12 bulan 7.872.187.200
1.01.17.0082		Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	843 orang 760.800.000

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.01.17.0083	Pengadaan perlengkapan sekolah DIKMEN	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan menengah	37 sekolah	2.534.199.580
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	100%	16.103.719.225
1.01.18.0014	Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah	Waktu pembinaan peningkatan mutu kepada 10685 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah	12 bulan	12.968.458.810
1.01.18.0015	Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS	Jumlah kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS yang dilaksanakan bagi 2094 siswa	4 kegiatan	3.135.260.415
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	96,08%	54.767.356.000
1.01.20.0007	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2	135 orang	1.973.652.000
1.01.20.0014	Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan mutu program pendidikan bagi 23414 orang	5 kegiatan	45.642.714.000
1.01.20.0015	Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Waktu Pelaksanaan Penunjang BOSDA Madin didalam pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	6 bulan	7.150.990.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.809.550.172
1.01.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	8.809.550.172
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.068.230.972
1.01.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	3.068.230.972
2400	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			67.830.674.979
1,02	Kesehatan			177.151.071
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	177.151.071
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
1.02.16.0016	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Penunjang Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Kesehatan	1 Lokasi	177.151.071
1,04	Perumahan Rakyat			28.680.125.053
1.04.23	Program Perumahan dan Permukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	12.799.237.549
		Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	
		Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	
1.04.23.0003	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	waktu pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa	12 bulan	12.799.237.549
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.513.741.693

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.04.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 7 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	1.513.741.693
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.367.145.811
1.04.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana	12 bulan	523.983.081
1.04.02.0047	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk prasarana kantor pemerintahan	3 Lokasi	13.843.162.730
1,05	Penataan Ruang			4.220.742.088
1.05.18	Program Penataan Ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81,12%	4.220.742.088
1.05.18.0011	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot Surabaya yang disusun	1 Peraturan	143.235.950
1.05.18.0012	Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	20 Kasus	636.365.046
1.05.18.0013	Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	10 Kasus	404.817.829
1.05.18.0014	Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 Buku	288.559.762
1.05.18.0015	Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD	Jumlah laporan pendataan dan pemanfaatan terhadap BTKD	2 Dokumen	639.563.948
1.05.18.0016	Survey dan Pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 Dokumen	1.902.176.554
1.05.18.0017	Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil verifikasi bangunan yang dikuasai/dikelola Pemerintah koto Surabaya	10 Dokumen	206.022.999
1,07	Perhubungan			560.261.200
1.07.21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20	560.261.200
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23,73	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21,47	
1.07.21.0001	Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan	Lokasi yang dibebaskan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan	2 Lokasi	560.261.200
1,08	Lingkungan Hidup			12.101.863.184
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%	12.101.863.184
1.08.24.0012	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	2 Lokasi	12.101.863.184
1,09	Pertanahan			6.939.179.514
1.09.19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	647	6.939.179.514
1.09.19.0001	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Waktu Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah	12 bulan	769.608.500

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.09.19.0002	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Lokasi Tanah Aset/Barang Daerah yang diajukan proses sertifikasi	100 Bidang	1.484.874.468
1.09.19.0003	Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengamanan dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Surabaya	2 Dokumen	4.684.696.546
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			11.086.349.157
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok	11.086.349.157
1.15.17.0006	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2 Lokasi	11.086.349.157
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.795.588.143
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	3.795.588.143
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0023	Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Jumlah dokumen hasil pendataan dan penelitian terhadap ijin pemakaian tanah yang dikelola	12 Buku	646.614.806
1.20.17.0024	Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya	24 Buku	452.072.494
1.20.17.0025	Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot	12 Dokumen	145.993.650
1.20.17.0026	Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengelolaan Gedung sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	12 Dokumen	2.550.907.193
2,06	Perdagangan			269.415.569
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra	269.415.569
		Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	
2.06.19.0003	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana penunjang penataan pedagang kakilima dan asongan	1 Lokasi	269.415.569
1400	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			29.243.009.560
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			12.749.976.980
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok	12.749.976.980
1.15.17.0008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah Industri Kecil yang dibina	402 UKM	1.306.563.396
1.15.17.0009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah event promosi yang diikuti oleh 55 UKM	12 event	3.062.573.086
1.15.17.0012	Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi	15 sentra	545.928.969

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.15.17.0013		Fasilitasi Pengembangan UKM	Jumlah UKM yang Memperoleh Fasilitasi pengembangan usaha	248 UKM 6.227.474.460
1.15.17.0015		Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri	Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan	25996 ijin 1.237.980.074
1.15.17.0016		Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	820 perusahaan 307.402.152
1.15.17.0017		Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Perdagangan yang diterbitkan	140 rekom 62.054.843
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			11.586.842.880
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	11.586.842.880
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dln juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dln juta)	
1.20.17.0029	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal	12 bulan	1.647.000.276
1.20.17.0030	Pelayanan UPTD Pasar Turi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 22 jenis pendukung pelayanan UPTD Pasar Turi	12 bulan	4.471.713.476
1.20.17.0031	Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi	Jumlah TPS Pasar Turi yang terbangun	580 unit	5.468.129.128
2,06	Perdagangan			4.906.189.700
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	87%	1.012.450.250
2.06.15.0002	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan	36 kasus	337.872.030
2.06.15.0003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi	139 lokasi	384.723.650
2.06.15.0005	Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri	220 UKM	289.854.570
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.373.133.243
2.06.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	2.373.133.243
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.520.606.207
2.06.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	1.520.606.207
2800	Dinas Perhubungan			115.931.287.264
1,01	Pendidikan			671.945.215
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	239.520.000
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0090	Operasional Bis Sekolah	Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah	12 bulan	239.520.000
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	432.425.215
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,00%	
		Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	
1.01.17.0080	Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar	Jumlah Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar	24 kali	432.425.215
1,07	Perhubungan			105.643.749.114
1.07.21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20	90.755.209.628
		Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23,73	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21,47	
1.07.21.0002	Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah jenis rambu lalu lintas dan marka yang disediakan	16 jenis	10.599.856.323
1.07.21.0003	Pengadaan / pemeliharaan APILL	Waktu pengadaan/pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS	12 bulan	29.252.690.009
1.07.21.0004	Penyelenggaraan manajemen lalu lintas	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas	9 dokumen	2.255.456.125
1.07.21.0005	Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum	Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan	7 lokasi	15.780.803.733
1.07.21.0006	Pengembangan sarana prasarana perhubungan	Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat	6 lokasi	5.437.823.836
1.07.21.0007	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Umum	6 kali	8.745.277.000
1.07.21.0008	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	4.243.212.987
1.07.21.0009	Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Waktu Penyelenggaraan Pelayanan perijinan angkutan umum	12 bulan	841.913.902
1.07.21.0010	Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	12 bulan	572.052.490
1.07.21.0012	Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	12 bulan	2.921.773.333
1.07.21.0013	Pengelolaan terminal angkutan umum	Waktu pengelolaan terminal angkutan umum	12 bulan	9.103.803.066

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.07.21.0014	Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	5 kali	61.429.607
1.07.21.0015	Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail	1 lokasi	939.117.217
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			11.676.781.070
1.07.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	11.676.781.070
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			3.211.758.416
1.07.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 bulan	3.211.758.416
1,08	Lingkungan Hidup			264.385.833
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air limbah domestik BOD	46%	264.385.833
		Kualitas air limbah domestik TSS	48%	
		Kualitas air limbah hotel BOD	48%	
		Kualitas air limbah hotel COD	36%	
		Kualitas air limbah hotel TSS	42%	
		Kualitas air limbah industri BOD	72%	
		Kualitas air limbah industri COD	66%	
		Kualitas air limbah industri TSS	66%	
		Kualitas air limbah RS BOD	63%	
		Kualitas air limbah RS COD	62%	
		Kualitas air limbah RS TSS	60%	
		Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	70%	
		Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	80%	
1.08.16.0033	Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak	Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor	51 kali	264.385.833
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			9.351.207.102
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	9.351.207.102
		% Peningkatan PAD	(8,35%) Rp2.785.382 (dlm juta)	
		% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,07%) Rp2.801.020 (dlm juta)	
1.20.17.0035	Pengelolaan Parkir	Waktu pengelolaan parkir	12 bulan	7.024.438.502
1.20.17.0036	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan	Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak	26.357.600 lembar	2.326.768.600
1300	Dinas Pertanian			20.292.527.784
1,08	Lingkungan Hidup			3.180.761.466
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%	3.180.761.466
1.08.24.0013	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Luasan kawasan lindung yang dikelola dengan penanaman mangrove	60 Ha	2.007.864.427
1.08.24.0014	Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota	Optimalisasi hutan kota	17.2 Ha	1.172.897.039
1,21	Ketahanan Pangan			3.729.176.753
1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan harapan	92,92	3.729.176.753

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan		Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.21.16.0009		Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitas Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (Urban Farming)	3000 KK	1.440.616.610
1.21.16.0020		Pengembangan perbenihan/perbibitan	Jenis benih dan bibit tanaman yang dikembangkan	24 Jenis	585.704.600
1.21.16.0034		Pengembangan Perikanan	Jumlah KK Miskin Yang Mendapatkan Urban Farming Perikanan	2000 KK	1.231.805.926
1.21.16.0035		Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan asal hewan	Waktu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan	12 bulan	118.344.292
1.21.16.0036		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	64 kali	352.705.325
2,01	Pertanian				10.242.078.975
2.01.15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terbentuknya sentra produk pertanian	30 sentra	3.385.739.908
2.01.15.0006		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peserta pengembangan agribisnis peternakan	30 kelompok	595.565.572
2.01.15.0007		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan	Jumlah sarana yang dibangun dan dipelihara	4 unit	306.210.658
2.01.15.0008		Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah lokasi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	24 lokasi	1.379.635.380
2.01.15.0009		Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh yang dilaksanakan	15 kali	482.547.447
2.01.15.0010		Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah peserta pengembangan agribisnis pertanian	405 orang	409.240.912
2.01.15.0011		Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan	Waktu pelaksanaan 1 jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan peliharaan	12 bulan	212.539.939
x.xx.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.171.367.181
2.01.01.0019		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	6.171.367.181
x.xx.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			684.971.886
2.01.02.0045		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	684.971.886
2,05	Kelautan dan Perikanan				3.140.510.590
2.05.15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan	17 kelurahan	3.140.510.590
2.05.15.0002		Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Perikanan dan Kelautan	Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih	1086 orang	677.943.742
2.05.15.0003		Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang dibangun dan dipelihara	4 lokasi	1.151.780.661
2.05.15.0004		Pengadaan Sarana Perikanan dan Kelautan	Jumlah sarana perikanan dan kelautan yang disediakan	1111 Paket	1.310.786.187
2200	Dinas Sosial				102.265.280.655
1,01	Pendidikan				2.909.798.825
1.01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	2.909.798.825
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	
			Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	
1.01.16.0079	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Waktu pelaksanaan 10 kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 100 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kalijudan	12 Bulan	2.909.798.825
1,13	Sosial			99.355.481.830
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	68.590.842.707
1.13.16.0004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan serta pemberian permakanan	3432 Orang	16.021.825.250
1.13.16.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial	3537 Orang	796.208.480
1.13.16.0008	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	567.339.900
1.13.16.0010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Waktu penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia	12 Bulan	900.205.956
1.13.16.0013	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni di 20 kelurahan	400 Unit	2.625.047.940
1.13.16.0014	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 128 Orang Penghuni UPTD Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat	12 Bulan	1.361.975.794
1.13.16.0015	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Kampung Anak Negeri jo	12 Bulan	1.508.707.466
1.13.16.0016	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1300 Orang Penghuni UPTD Liponsos Keputih	12 Bulan	10.691.957.533
1.13.16.0017	Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan, pelayanan, pelatihan ketrampilan dan pemberian permakanan	12967 Orang	31.888.482.310

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.13.16.0018	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 50 Orang Lanjut Usia Penghuni UPTD Griya Werdha	12 Bulan	2.229.092.078
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60% (791)	28.834.290.605
1.13.21.0002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang dibina	550 Orang	583.172.000
1.13.21.0005	Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	1582 Orang	509.477.900
1.13.21.0006	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan	12 Bulan	1.374.431.725
1.13.21.0007	Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial	Waktu penyediaan kebutuhan dasar bagi 180 pansos/ orsos dan permakanan bagi 5158 anak yatim, piatu dan yatim piatu	12 Bulan	21.999.359.305
1.13.21.0008	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi umat beragama 23330 orang	12 Bulan	4.367.849.675
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.161.600.352
1.13.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa	12 Bulan	1.161.600.352
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			768.748.166
1.13.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	768.748.166
1600	Dinas Tenaga Kerja			22.291.255.609
1,14	Ketenagakerjaan			22.291.255.609
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5%	16.895.217.236
1.14.16.0002	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan	14 kali	292.883.500
1.14.16.0004	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal	1400 orang	6.080.009.375
1.14.16.0005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha	1820 orang	7.297.648.587
1.14.16.0008	Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat	Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan usaha mandiri	1270 orang	2.645.483.324
1.14.16.0009	Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di 31 Kecamatan	2 dokumen	466.600.000
1.14.16.0010	Pengembangan Produktivitas Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih produktivitas	100 orang	112.592.450
1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	75%	2.597.721.407
1.14.17.0002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial	516 perusahaan	607.531.273

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.14.17.0003	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1670 perusahaan	428.127.600
1.14.17.0004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3	3550 perusahaan	615.986.850
1.14.17.0005	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja	2600 perusahaan	231.031.084
1.14.17.0009	Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaan yang dimonitoring dan dibina	250 lembaga	58.443.000
1.14.17.0010	Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak	Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak di 3 lokasi	12 Bulan	656.601.600
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			1.954.075.988
1.14.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	1.954.075.988
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			844.240.978
1.14.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 4 Jenis	12 Bulan	844.240.978
700	Inspektorat			4.950.675.838
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.950.675.838
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203	2.892.224.586
1.20.20.0005	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah dokumen hasil Inventarisasi temuan pengawasan	2 Dokumen	203.645.720
1.20.20.0007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pengawasan	17 Laporan	235.125.880
1.20.20.0009	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit	27 Orang	172.695.840
1.20.20.0010	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah I	124 Laporan	761.495.320
1.20.20.0011	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah II	124 Laporan	760.219.651
1.20.20.0012	Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah III dilingkungan Kota Surabaya	123 Laporan	759.042.175
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.560.906.963
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	1.560.906.963
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			497.544.289

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	497.544.289
B002	Kantor Ketahanan Pangan			1.303.948.200
1,21	Ketahanan Pangan			1.303.948.200
1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan harapan	92,92	641.659.823
1.21.16.0022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah orang yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan	871 Orang	169.132.390
1.21.16.0030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak	500 Orang	117.104.363
1.21.16.0032	Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan	2 Event	149.816.720
1.21.16.0033	Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan	waktu pelaksanaan Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan	12 bulan	205.606.350
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			544.397.477
1.21.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	544.397.477
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			117.890.900
1.21.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana	12 bulan	117.890.900
1225	Kec. Asemrowo			2.922.789.392
1,06	Perencanaan Pembangunan			5.777.979
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	5.777.979
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	5.777.979
1,08	Lingkungan Hidup			53.609.790
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	53.609.790
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	53.609.790
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			98.339.475
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	98.339.475
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	98.339.475
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			95.409.800
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	95.409.800
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	95.409.800
1,13	Sosial			29.219.760
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	29.219.760

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	29.219.760
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			171.662.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	171.662.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 kali	171.662.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.414.304.588
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.600.712.935
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0141	Operasional Kelurahan Asemrowo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	437.759.547
1.20.31.0142	Operasional Kelurahan Genting	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	288.497.547
1.20.31.0143	Operasional Kelurahan Greges	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	299.595.947
1.20.31.0144	Operasional Kelurahan Kalianak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	307.925.747
1.20.31.0145	Operasional Kelurahan Tambaklangon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	266.934.147
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	8.330.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	120 orang	8.330.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			722.843.183
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	722.843.183
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			82.417.920
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	82.417.920
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			54.465.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	54.465.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	54.465.500
1227	Kec. Benowo			3.073.834.079
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.332.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.332.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.332.275
1,08	Lingkungan Hidup			54.801.825
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	54.801.825
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	54.801.825
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			63.583.350
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	63.583.350
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	63.583.350
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			32.864.850
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	32.864.850
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	32.864.850
1,13	Sosial			82.839.850
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	82.839.850
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	82.839.850
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			145.528.000
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	145.528.000
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 kali	145.528.000
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.636.935.879
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.919.389.310
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0152	Operasional Kelurahan Kandungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	385.642.442
1.20.31.0153	Operasional Kelurahan Klakahrejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	329.922.542
1.20.31.0154	Operasional Kelurahan Romokalisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	331.207.342
1.20.31.0155	Operasional Kelurahan Sememi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	502.936.242
1.20.31.0156	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	369.680.742
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	21.571.650
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	270 orang	21.571.650
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			618.680.708
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	618.680.708
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			77.294.211

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	77.294.211
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			53.948.050
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	53.948.050
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	53.948.050
1204	Kec. Bubutan			3.960.203.667
1,06	Perencanaan Pembangunan			7.312.475
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	7.312.475
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	7.312.475
1,08	Lingkungan Hidup			67.702.420
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	67.702.420
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 orang	67.702.420
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			62.862.250
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	62.862.250
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	62.862.250
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			65.115.250
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	65.115.250
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	65.115.250
1,13	Sosial			23.696.100
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	23.696.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	23.696.100
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			299.734.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	299.734.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 kali	299.734.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.330.762.172
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.551.796.609
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0032	Operasional Kelurahan Alon-alon contong	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	460.446.047
1.20.31.0033	Operasional Kelurahan Bubutan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	482.224.525
1.20.31.0034	Operasional Kelurahan Gundih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	500.618.797
1.20.31.0035	Operasional Kelurahan Jepara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	548.065.543
1.20.31.0036	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	560.441.697
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	24.706.050
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	360 orang	24.706.050
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			673.197.509
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	673.197.509
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			81.062.004
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	81.062.004
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			103.018.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	103.018.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	103.018.500
1231	Kec. Bulak			3.135.120.937
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.671.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.671.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	2.671.875
1,08	Lingkungan Hidup			58.031.540
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	58.031.540
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	58.031.540
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			51.193.200
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	51.193.200
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	51.193.200
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			73.837.300
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	73.837.300
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	73.837.300

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,13	Sosial			20.210.750
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	20.210.750
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	20.210.750
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			184.864.000
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	184.864.000
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	184.864.000
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.691.272.772
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.800.817.230
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0172	Operasional Kelurahan Bulak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	445.474.977
1.20.31.0173	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	331.279.877
1.20.31.0174	Operasional Kelurahan Kenjeran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	365.715.637
1.20.31.0175	Operasional Kelurahan Komplek Kenjeran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	328.570.072
1.20.31.0176	Operasional Kelurahan Sukolilo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	329.776.667
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	32.242.200
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 Orang	32.242.200
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			759.272.342
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	759.272.342
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			98.941.000
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	98.941.000
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			53.039.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	53.039.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	53.039.500
1218	Kec. Dukuh Pakis			3.062.475.395
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.546.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.546.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	6.546.875
1,08	Lingkungan Hidup			76.081.440
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	76.081.440

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	76.081.440
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			103.354.250
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	103.354.250
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	103.354.250
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			66.123.580
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	66.123.580
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	66.123.580
1,13	Sosial			15.441.900
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	15.441.900
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	15.441.900
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			169.832.540
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	169.832.540
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	169.832.540
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.559.546.690
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.667.038.406
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0108	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	445.619.996
1.20.31.0109	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	444.207.476
1.20.31.0110	Operasional Kelurahan Gunungsari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	379.604.817
1.20.31.0111	Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	397.606.117
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	10.521.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	10.521.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			780.886.146
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	780.886.146
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			101.100.588

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	101.100.588
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			65.548.120
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	65.548.120
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	65.548.120
1219	Kec. Gayungan			2.926.699.904
1,06	Perencanaan Pembangunan			5.276.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	5.276.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	5.276.875
1,08	Lingkungan Hidup			54.752.510
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	54.752.510
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	102 Orang	54.752.510
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			91.976.900
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	91.976.900
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	91.976.900
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			82.052.825
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	82.052.825
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	82.052.825
1,13	Sosial			20.418.700
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	20.418.700
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	20.418.700
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			144.195.700
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	144.195.700
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	144.195.700
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.460.149.494
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.688.769.458
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0112	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	401.318.864
1.20.31.0113	Operasional Kelurahan Gayungan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	436.960.207
1.20.31.0114	Operasional Kelurahan Ketintang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	443.875.907
1.20.31.0115	Operasional Kelurahan Menanggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	406.614.480
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	7.078.050
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	105 Orang	7.078.050
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			651.249.826
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	651.249.826
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			113.052.160
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	113.052.160
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			67.876.900
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	67.876.900
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	67.876.900
1201	Kec. Genteng			4.059.134.405
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.099.775
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.099.775
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	6.099.775
1,08	Lingkungan Hidup			53.453.310
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	53.453.310
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	53.453.310
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			93.747.500
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	93.747.500
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	93.747.500
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			82.267.300
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	82.267.300
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	82.267.300
1,13	Sosial			30.172.100

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	30.172.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	30.172.100
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			369.174.300
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	369.174.300
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	312 Kali	369.174.300
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.377.088.120
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.278.659.515
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0017	Operasional Kelurahan Genteng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	438.332.613
1.20.31.0018	Operasional Kelurahan Kapasari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	449.607.258
1.20.31.0019	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	450.705.878
1.20.31.0020	Operasional Kelurahan Ketabang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	452.783.273
1.20.31.0021	Operasional Kelurahan Peneleh	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	487.230.493
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	32.780.350
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	32.780.350
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			923.809.105
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	923.809.105
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			141.839.150
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	141.839.150
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			47.132.000
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	47.132.000
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	47.132.000
1210	Kec. Gubeng			4.522.633.480
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.209.375
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.209.375
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.209.375
1,08	Lingkungan Hidup			54.441.090
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	54.441.090

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	54.441.090
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			78.050.200
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	78.050.200
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	78.050.200
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			85.822.400
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	85.822.400
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	85.822.400
1,13	Sosial			25.988.230
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	25.988.230
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	25.988.230
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			240.631.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	240.631.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 kali	240.631.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.989.203.985
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	3.084.496.645
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0064	Operasional Kelurahan Airlangga	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	517.654.060
1.20.31.0065	Operasional Kelurahan Barata Jaya	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	477.213.897
1.20.31.0066	Operasional Kelurahan Gubeng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	444.567.697
1.20.31.0067	Operasional Kelurahan Kertajaya	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	537.282.497
1.20.31.0068	Operasional Kelurahan Mojo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	607.714.097
1.20.31.0069	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	500.064.397
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	7.847.300
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	90 orang	7.847.300
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			831.492.780

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	831.492.780
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			65.367.260
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	65.367.260
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			45.286.700
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	45.286.700
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	45.286.700
1212	Kec. Gunung Anyar			3.311.487.487
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.416.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.416.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	6.416.275
1,08	Lingkungan Hidup			54.601.825
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	54.601.825
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 orang	54.601.825
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			112.366.940
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	112.366.940
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	112.366.940
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			83.289.440
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	83.289.440
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	83.289.440
1,13	Sosial			14.586.850
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	14.586.850
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	14.586.850
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			139.016.380
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	139.016.380
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	432 kali	139.016.380
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat			2.846.049.597

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.587.611.951
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0076	Operasional Kelurahan Gununganyar	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	413.400.672
1.20.31.0077	Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	401.984.792
1.20.31.0078	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	365.891.020
1.20.31.0079	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	406.335.467
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	11.115.000
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	165 orang	11.115.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			1.179.326.635
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1.179.326.635
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			67.996.011
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	67.996.011
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			55.160.180
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	55.160.180
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	55.160.180
1220	Kec. Jambangan			2.760.067.788
1,06	Perencanaan Pembangunan			5.607.150
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	5.607.150
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	5.607.150
1,08	Lingkungan Hidup			57.147.990
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	57.147.990
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	57.147.990
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			47.657.420
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	47.657.420
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	47.657.420
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			54.908.140
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	54.908.140

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	54.908.140
1,13	Sosial			19.619.375
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	19.619.375
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	19.619.375
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			160.999.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	160.999.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	160.999.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.366.103.713
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.508.950.847
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0116	Operasional Kelurahan Jambangan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	371.123.148
1.20.31.0117	Operasional Kelurahan Karah	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	433.166.087
1.20.31.0118	Operasional Kelurahan Kebonsari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	343.159.010
1.20.31.0119	Operasional Kelurahan Pagesangan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	361.502.602
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	18.007.650
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	315 Orang	18.007.650
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			757.350.576
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	757.350.576
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			81.794.640
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	81.794.640
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			48.024.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	48.024.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	48.024.500
1217	Kec. Karangpilang			2.979.871.436
1,06	Perencanaan Pembangunan			4.585.525
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	4.585.525
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	4.585.525

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,08	Lingkungan Hidup			51.494.760
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	51.494.760
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	51.494.760
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			89.103.900
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	89.103.900
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	89.103.900
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			63.549.330
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	63.549.330
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	63.549.330
1,13	Sosial			23.485.500
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	23.485.500
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	23.485.500
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			179.629.700
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	179.629.700
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	179.629.700
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.511.379.021
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.673.251.044
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0104	Operasional Kelurahan Karangpilang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	361.028.403
1.20.31.0105	Operasional Kelurahan Kebraon	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	515.382.027
1.20.31.0106	Operasional Kelurahan Kedurus	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	434.704.507
1.20.31.0107	Operasional Kelurahan Warugunung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	362.136.107
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	8.351.575
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	8.351.575
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			767.605.002
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	767.605.002

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			62.171.400
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	62.171.400
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			56.643.700
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	56.643.700
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	56.643.700
1205	Kec. Kenjeran			3.616.685.485
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.055.650
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.055.650
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	3.055.650
1,08	Lingkungan Hidup			44.863.560
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	44.863.560
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	44.863.560
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			113.575.000
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	113.575.000
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	113.575.000
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			71.438.535
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	71.438.535
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	71.438.535
1,13	Sosial			17.843.100
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	17.843.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	17.843.100
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			168.367.000
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	168.367.000
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	264 Kali	168.367.000
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.145.039.840
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.332.415.035

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0037	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	481.703.102
1.20.31.0038	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	643.351.409
1.20.31.0039	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	466.372.259
1.20.31.0040	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	740.988.265
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	10.670.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	10.670.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			711.079.955
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	711.079.955
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			90.874.300
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	90.874.300
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			52.502.800
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	52.502.800
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	52.502.800
1208	Kec. Krembangan			3.793.872.430
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.671.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.671.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	2.671.875
1,08	Lingkungan Hidup			77.024.510
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	77.024.510
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	270 Orang	77.024.510
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			101.983.580
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	101.983.580
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	101.983.580
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			85.956.245
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	85.956.245
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	85.956.245

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,13	Sosial			25.997.880
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	25.997.880
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	25.997.880
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			306.823.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	306.823.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 Kali	306.823.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.147.915.840
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.400.004.735
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0051	Operasional Kelurahan Dupak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	447.796.832
1.20.31.0052	Operasional Kelurahan Kemayoran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	485.534.932
1.20.31.0053	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	491.792.432
1.20.31.0054	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	508.472.932
1.20.31.0055	Operasional Kelurahan Perak Barat	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	466.407.607
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	11.738.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	11.738.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			654.401.945
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	654.401.945
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			81.770.610
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	81.770.610
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			45.499.000
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	45.499.000
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	45.499.000
1228	Kec. Lakarsantri			3.382.051.240
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.769.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.769.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.769.275
1,08	Lingkungan Hidup			58.540.260
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	58.540.260

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 orang	58.540.260
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			94.962.680
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	94.962.680
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	94.962.680
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			75.811.600
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	75.811.600
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	75.811.600
1,13	Sosial			27.354.800
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	27.354.800
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	27.354.800
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			157.533.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	157.533.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 kali	157.533.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.922.031.625
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.170.867.323
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0157	Operasional Kelurahan Bangkingan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	408.934.408
1.20.31.0158	Operasional Kelurahan Jeruk	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	354.596.008
1.20.31.0159	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	309.161.008
1.20.31.0160	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	408.954.608
1.20.31.0161	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	371.834.758
1.20.31.0162	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	317.386.533
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	15.641.100
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	204 orang	15.641.100
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			662.801.254

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	662.801.254
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			72.721.948
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	72.721.948
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			42.047.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	42.047.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	42.047.500
1215	Kec. Mulyorejo			4.109.027.755
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.982.750
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.982.750
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	6.982.750
1,08	Lingkungan Hidup			55.568.990
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	55.568.990
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	55.568.990
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			69.004.950
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	69.004.950
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	69.004.950
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			74.876.675
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	74.876.675
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	74.876.675
1,13	Sosial			14.357.200
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	14.357.200
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	14.357.200
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			212.420.282
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	212.420.282
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	384 kali	212.420.282
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.623.255.128

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.671.353.032
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0092	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	464.667.797
1.20.31.0093	Operasional Kelurahan Kalijudan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	425.795.797
1.20.31.0094	Operasional Kelurahan Kalisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	463.109.797
1.20.31.0095	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	402.943.797
1.20.31.0096	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	454.127.797
1.20.31.0097	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	460.708.047
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	24.803.800
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 orang	24.803.800
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			836.457.938
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	836.457.938
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			90.640.358
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	90.640.358
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			52.561.780
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	52.561.780
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	52.561.780
1206	Kec. Pabean Cantian			3.934.581.237
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.371.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.371.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	6.371.875
1,08	Lingkungan Hidup			65.797.325
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	65.797.325
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	90 Orang	65.797.325
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			88.874.500
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	88.874.500
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	88.874.500

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			38.649.700
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	38.649.700
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	38.649.700
1,13	Sosial			70.317.000
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	70.317.000
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	70.317.000
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			215.396.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	215.396.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	215.396.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.382.136.837
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.298.859.745
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0041	Operasional Kelurahan Bongkaran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	424.953.822
1.20.31.0042	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	475.468.497
1.20.31.0043	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	454.639.837
1.20.31.0044	Operasional Kelurahan Perak Timur	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	453.453.822
1.20.31.0045	Operasional Kelurahan Perak Utara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	490.343.767
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	13.724.250
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	180 Orang	13.724.250
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			969.846.842
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	969.846.842
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			99.706.000
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	99.706.000
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			67.037.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	67.037.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	67.037.500
1230	Kec. Pakal			3.345.412.996
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.697.500

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.697.500
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.697.500
1,08	Lingkungan Hidup			58.190.790
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	58.190.790
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	58.190.790
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			67.996.200
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	67.996.200
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	67.996.200
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			65.417.350
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	65.417.350
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	65.417.350
1,13	Sosial			11.456.400
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	11.456.400
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	11.456.400
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			184.753.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	184.753.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 kali	184.753.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.867.474.856
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.077.545.585
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0167	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	555.576.997
1.20.31.0168	Operasional Kelurahan Benowo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	430.124.797
1.20.31.0169	Operasional Kelurahan Pakal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	394.274.797
1.20.31.0170	Operasional Kelurahan Sumberejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	353.784.397
1.20.31.0171	Operasional Kelurahan Tambakdono	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	343.784.597
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	12.641.100

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	12.641.100
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			711.590.971
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	711.590.971
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			65.697.200
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	65.697.200
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			86.426.400
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	86.426.400
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	86.426.400
1211	Kec. Rungkut			4.501.237.260
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.523.225
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.523.225
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	6.523.225
1,08	Lingkungan Hidup			68.355.650
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	68.355.650
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	360 orang	68.355.650
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			59.120.125
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	59.120.125
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	59.120.125
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			80.684.885
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	80.684.885
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	80.684.885
1,13	Sosial			29.931.895
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	29.931.895
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	29.931.895
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			342.260.900
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	342.260.900

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 wilayah	288 kali	342.260.900
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.820.910.400
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.915.415.203
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0031	Operasional Kelurahan Wonorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	438.718.428
1.20.31.0070	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	532.224.123
1.20.31.0071	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	457.338.948
1.20.31.0072	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	536.845.768
1.20.31.0073	Operasional Kelurahan Penjaringsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	481.229.968
1.20.31.0074	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	469.057.968
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	20.342.850
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 orang	20.342.850
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			781.576.227
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	781.576.227
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			103.576.120
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	103.576.120
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			93.450.180
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	93.450.180
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	93.450.180
1229	Kec. Sambikerep			3.051.827.972
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.737.150
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.737.150
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	2.737.150
1,08	Lingkungan Hidup			57.316.860
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	57.316.860
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	57.316.860
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			72.538.200

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	72.538.200
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	72.538.200
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			89.508.200
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	89.508.200
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	89.508.200
1,13	Sosial			21.791.100
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	21.791.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	21.791.100
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			113.758.860
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	113.758.860
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	240 kali	113.758.860
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.647.612.182
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.883.123.453
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0163	Operasional Kelurahan Bringin	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	390.900.792
1.20.31.0164	Operasional Kelurahan Lontar	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	581.257.267
1.20.31.0165	Operasional Kelurahan Made	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	392.219.647
1.20.31.0166	Operasional Kelurahan Sambikerep	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	518.745.747
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	10.295.850
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 orang	10.295.850
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			683.391.619
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	683.391.619
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			70.801.260
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	70.801.260
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			46.565.420
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	46.565.420

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	46.565.420
1222	Kec. Sawahan			4.822.825.750
1,06	Perencanaan Pembangunan			10.325.700
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	10.325.700
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	10.325.700
1,08	Lingkungan Hidup			76.432.020
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	76.432.020
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	280 Orang	76.432.020
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			122.428.400
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	122.428.400
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	122.428.400
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			73.811.000
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	73.811.000
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	73.811.000
1,13	Sosial			31.088.450
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	31.088.450
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	31.088.450
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			282.970.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	282.970.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 Kali	282.970.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.155.378.180
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	3.292.121.065
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0125	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	544.106.647
1.20.31.0126	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	455.053.027
1.20.31.0127	Operasional Kelurahan Pakis	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	530.581.527
1.20.31.0128	Operasional Kelurahan Petemon	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	600.411.869

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0129	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	680.344.068
1.20.31.0130	Operasional Kelurahan Sawahan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	481.623.927
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	16.819.200
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	300 Orang	16.819.200
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			763.376.045
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	763.376.045
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			83.061.870
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	83.061.870
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			70.391.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	70.391.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	70.391.500
1207	Kec. Semampir			4.547.591.854
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.671.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.671.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	2.671.875
1,08	Lingkungan Hidup			53.886.960
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	53.886.960
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	90 Orang	53.886.960
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			48.271.150
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	48.271.150
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	48.271.150
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			24.670.250
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	24.670.250
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	24.670.250
1,13	Sosial			53.765.100
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	53.765.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	53.765.100

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			201.554.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	201.554.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	264 Kali	201.554.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.116.434.519
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	3.109.613.934
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0046	Operasional Kelurahan Ampel	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	607.855.546
1.20.31.0047	Operasional Kelurahan Pegirian	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	576.409.097
1.20.31.0048	Operasional Kelurahan Sidotopo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	565.011.297
1.20.31.0049	Operasional Kelurahan Ujung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	598.717.897
1.20.31.0050	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	761.620.097
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	7.721.625
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	105 Orang	7.721.625
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			895.242.160
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	895.242.160
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			103.856.800
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	103.856.800
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			46.337.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	46.337.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	46.337.500
1202	Kec. Simokerto			4.129.795.741
1,06	Perencanaan Pembangunan			5.943.115
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	5.943.115
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	5.943.115
1,08	Lingkungan Hidup			61.937.150
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	61.937.150
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 Orang	61.937.150
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			147.666.500
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	147.666.500
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	147.666.500
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			72.501.150
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	72.501.150
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	72.501.150
1,13	Sosial			29.558.360
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	29.558.360
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	29.558.360
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			297.087.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	297.087.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	288 Kali	297.087.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.444.871.566
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.615.658.263
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0022	Operasional Kelurahan Kapasan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	507.028.836
1.20.31.0023	Operasional Kelurahan Sidodadi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	472.504.125
1.20.31.0024	Operasional Kelurahan Simokerto	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	577.557.706
1.20.31.0025	Operasional Kelurahan Simolawang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	509.203.308
1.20.31.0026	Operasional Kelurahan Tambakrejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	549.364.288
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	19.605.750
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	19.605.750
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			629.857.583
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	629.857.583
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			179.749.970

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	179.749.970
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			70.230.400
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	70.230.400
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	70.230.400
1214	Kec. Sukolilo			4.663.227.497
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.501.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.501.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.501.875
1,08	Lingkungan Hidup			67.481.540
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	67.481.540
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 orang	67.481.540
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			78.736.720
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	78.736.720
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	78.736.720
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			68.950.450
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	68.950.450
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	68.950.450
1,13	Sosial			22.715.100
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	22.715.100
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	22.715.100
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			246.111.460
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	246.111.460
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 7 Wilayah	336 kali	246.111.460
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.095.352.832
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	3.055.141.286
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0085	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	370.876.478
1.20.31.0086	Operasional Kelurahan Keputih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	407.403.658
1.20.31.0087	Operasional Kelurahan Klampisngasem	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	427.064.658
1.20.31.0088	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	457.948.558
1.20.31.0089	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	458.008.158
1.20.31.0090	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	460.246.678
1.20.31.0091	Operasional Kelurahan Semolowaru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	473.593.098
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	22.124.700
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 orang	22.124.700
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			944.017.386
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	944.017.386
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			74.069.460
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	74.069.460
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			80.377.520
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	80.377.520
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	80.377.520
1226	Kec. Sukomanunggal			3.535.699.260
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.766.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.766.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.766.275
1,08	Lingkungan Hidup			50.112.740
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	50.112.740
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	50.112.740
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			63.746.360
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	63.746.360
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	63.746.360
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			54.899.350
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	54.899.350

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	54.899.350
1,13	Sosial			20.574.600
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	20.574.600
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	20.574.600
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			147.628.000
1.19.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	147.628.000
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 kali	147.628.000
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.135.115.515
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.522.983.482
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0146	Operasional Kelurahan Putat Gede	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	325.189.347
1.20.31.0147	Operasional Kelurahan Simomulyo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	441.106.147
1.20.31.0148	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	591.601.347
1.20.31.0149	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	356.787.747
1.20.31.0150	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	382.757.947
1.20.31.0151	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	425.540.947
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	6.144.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	75 orang	6.144.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			534.671.932
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	534.671.932
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			71.315.551
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	71.315.551
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			59.856.420
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	59.856.420
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	59.856.420
1209	Kec. Tambaksari			5.531.266.319
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.814.500

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.814.500
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	6.814.500
1,08	Lingkungan Hidup			63.562.220
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	63.562.220
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	63.562.220
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			71.129.020
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	71.129.020
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	71.129.020
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			75.463.550
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	75.463.550
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	75.463.550
1,13	Sosial			43.368.675
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	43.368.675
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	43.368.675
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			216.580.600
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	216.580.600
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 8 Wilayah	336 kali	216.580.600
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.965.900.454
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	4.124.856.903
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0056	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	458.039.985
1.20.31.0057	Operasional Kelurahan Gading	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	533.533.665
1.20.31.0058	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	522.990.110
1.20.31.0059	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	535.451.055
1.20.31.0060	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	583.303.597
1.20.31.0061	Operasional Kelurahan Ploso	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	566.765.697

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31.0062	Operasional Kelurahan Rangkah	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	428.863.897
1.20.31.0063	Operasional Kelurahan Tambaksari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	495.908.897
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	13.691.350
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	240 orang	13.691.350
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			770.850.901
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	770.850.901
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			56.501.300
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	56.501.300
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			88.447.300
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	88.447.300
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	88.447.300
1224	Kec. Tandés			4.034.614.197
1,06	Perencanaan Pembangunan			3.689.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	3.689.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	3.689.275
1,08	Lingkungan Hidup			50.901.825
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	50.901.825
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	50.901.825
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			99.303.950
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	99.303.950
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	99.303.950
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			101.054.375
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	101.054.375
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	101.054.375
1,13	Sosial			20.412.500
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	20.412.500
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	20.412.500

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			139.668.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	139.668.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	240 kali	139.668.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.530.812.772
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.585.198.602
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0135	Operasional Kelurahan Balongsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	412.792.717
1.20.31.0136	Operasional Kelurahan Banjarsugihan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	364.969.127
1.20.31.0137	Operasional Kelurahan Karangpoh	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	450.810.577
1.20.31.0138	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	589.938.227
1.20.31.0139	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	393.214.327
1.20.31.0140	Operasional Kelurahan Tandes	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	373.473.627
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	11.571.400
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	200 orang	11.571.400
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			857.325.750
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	857.325.750
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			76.717.020
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	76.717.020
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			88.771.000
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	88.771.000
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	88.771.000
1203	Kec. Tegalsari			4.078.207.124
1,06	Perencanaan Pembangunan			6.439.375
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	6.439.375
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	6.439.375
1,08	Lingkungan Hidup			70.543.450
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	70.543.450
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	250 Orang	70.543.450
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			89.016.880
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	89.016.880
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	89.016.880
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			76.888.350
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	76.888.350
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	76.888.350
1,13	Sosial			39.333.600
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	39.333.600
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	39.333.600
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			314.911.500
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	314.911.500
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	264 Kali	314.911.500
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			3.414.299.469
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.516.257.004
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0027	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	508.288.104
1.20.31.0028	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	499.798.875
1.20.31.0029	Operasional Kelurahan Keputran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	511.819.875
1.20.31.0030	Operasional Kelurahan Tegalsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	464.259.875
1.20.31.0031	Operasional Kelurahan Wonorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	532.090.275
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	11.220.550
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	11.220.550
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			805.998.815
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	805.998.815
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			80.823.100

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	80.823.100
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			66.774.500
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	66.774.500
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	66.774.500
1213	Kec. Tenggilis Mejoyo			3.110.330.136
1,06	Perencanaan Pembangunan			2.839.060
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	2.839.060
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	2.839.060
1,08	Lingkungan Hidup			55.974.710
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	55.974.710
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	175 Orang	55.974.710
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			107.467.300
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	107.467.300
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	107.467.300
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			81.138.010
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	81.138.010
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	81.138.010
1,13	Sosial			79.443.000
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	79.443.000
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	79.443.000
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			123.938.000
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	123.938.000
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	156 Kali	123.938.000
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.582.524.056
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.675.244.480

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0080	Operasional Kelurahan Kendangsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	344.863.342
1.20.31.0081	Operasional Kelurahan Kutisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	354.845.887
1.20.31.0082	Operasional Kelurahan Panjangjiwo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	342.271.217
1.20.31.0083	Operasional Kelurahan Prapen	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	298.986.767
1.20.31.0084	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	334.277.267
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	7.591.400
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 Orang	7.591.400
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			803.727.076
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	803.727.076
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			95.961.100
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	95.961.100
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			77.006.000
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	77.006.000
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	77.006.000
1223	Kec. Wiyung			2.815.776.044
1,06	Perencanaan Pembangunan			5.790.875
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	5.790.875
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	5.790.875
1,08	Lingkungan Hidup			53.368.300
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	53.368.300
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 Orang	53.368.300
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			111.023.920
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	111.023.920
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	111.023.920
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			75.740.600
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	75.740.600

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	75.740.600
1,13	Sosial			33.105.900
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	33.105.900
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	33.105.900
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			210.079.900
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	210.079.900
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	210.079.900
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.266.412.249
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	1.614.813.088
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0131	Operasional Kelurahan Babatan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	459.976.137
1.20.31.0132	Operasional Kelurahan Balas Klumprik	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	412.199.117
1.20.31.0133	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	349.877.317
1.20.31.0134	Operasional Kelurahan Wiyung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	392.760.517
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	8.207.400
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	100 Orang	8.207.400
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			559.364.661
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	559.364.661
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			84.027.100
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	84.027.100
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			60.254.300
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	60.254.300
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	60.254.300
1221	Kec. Wonocolo			3.555.960.514
1,06	Perencanaan Pembangunan			9.522.275
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	9.522.275
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	9.522.275

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,08	Lingkungan Hidup			67.172.390
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	67.172.390
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 Orang	67.172.390
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			154.379.348
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	154.379.348
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	154.379.348
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			94.349.210
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	94.349.210
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	94.349.210
1,13	Sosial			47.867.050
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	47.867.050
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	47.867.050
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			263.077.920
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	263.077.920
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	263.077.920
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.849.605.281
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	2.068.168.720
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0120	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	436.597.512
1.20.31.0121	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	505.150.677
1.20.31.0122	Operasional Kelurahan Margorejo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	390.905.352
1.20.31.0123	Operasional Kelurahan Sidosermo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	383.212.627
1.20.31.0124	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	352.302.552
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	11.137.100
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	11.137.100
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			652.656.794

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	652.656.794
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			117.642.667
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	117.642.667
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			69.987.040
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	69.987.040
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	69.987.040
1216	Kec. Wonokromo			5.228.785.193
1,06	Perencanaan Pembangunan			7.161.375
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	7.161.375
1.06.21.0023	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.161.375
1,08	Lingkungan Hidup			65.062.260
1.08.25	Program Pengelolaan Kebersihan	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	65.062.260
		Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	
		Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	
1.08.25.0001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	65.062.260
1,1	Kependudukan dan Catatan Sipil			113.268.480
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	113.268.480
		% penduduk yang berKTP	93%	
1.10.15.0008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	113.268.480
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			83.685.170
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	83.685.170
1.11.16.0005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	83.685.170
1,13	Sosial			65.524.140
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54% (34.402)	65.524.140
1.13.16.0012	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	65.524.140
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			325.927.680
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	325.927.680
1.19.16.0001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	300 Kali	325.927.680
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.413.467.688

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44%	3.231.228.657
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28%	
1.20.31.0098	Operasional Kelurahan Darmo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	521.462.867
1.20.31.0099	Operasional Kelurahan Jagir	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	492.239.447
1.20.31.0100	Operasional Kelurahan Ngagel	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	430.606.347
1.20.31.0101	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	621.213.472
1.20.31.0102	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	568.637.587
1.20.31.0103	Operasional Kelurahan Wonokromo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	597.068.937
1.20.32	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	14.001.400
1.20.32.0008	Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	245 Orang	14.001.400
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			1.021.163.260
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	1.021.163.260
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			147.074.371
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	147.074.371
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			154.688.400
1.22.20	Program Penanggulangan Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	154.688.400
1.22.20.0001	Monitoring dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	154.688.400
300	RSUD Bhakti Dharma Husada			77.554.113.265
1,02	Kesehatan			77.554.113.265
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	6.786.503.590
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
1.02.16.0024	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya / rumah sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	3.514.391.550
1.02.16.0025	Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit	Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit	12 Bulan	3.272.112.040
1.02.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	43.894.083.384
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B	
1.02.33.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Waktu penyediaan 15 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	26.224.395.980
1.02.33.0002	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Waktu pelaksanaan 8 kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	12 Bulan	667.886.028

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.02.33.0003	Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah fasilitasi pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi RS	5 Kali	895.984.200
1.02.33.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Jumlah sarana kesehatan bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang tersedia	2 Jenis	7.559.170.661
1.02.33.0008	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	8.546.646.515
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			21.696.599.829
1.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RSUD. Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	21.696.599.829
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			5.176.926.462
1.02.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa RSUD Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	5.176.926.462
1800	RSUD Dr. Mohamad Soewandie			85.362.176.390
1,02	Kesehatan			85.362.176.390
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	4.844.217.613
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
1.02.16.0024	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya / rumah sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	101.395.940
1.02.16.0025	Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit	Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit	12 bulan	4.742.821.673
1.02.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	61.105.596.751
		Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi	Kelas B	
1.02.33.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	waktu penyediaan 3 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	7.695.873.267
1.02.33.0003	Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan	1 Aplikasi	853.442.814
1.02.33.0004	pengadaan sarana kesehatan bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	5 Jenis	2.294.513.450
1.02.33.0005	Peningkatan mutu SDM Rumah Sakit	Waktu penyediaan alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan	12 Bulan	22.035.002.500
1.02.33.0006	Peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pelayanan rumah sakit yang terstandarisasi	3 Kegiatan	671.000.000
1.02.33.0008	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	27.555.764.720
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			13.524.676.665
1.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	13.524.676.665
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			5.887.685.361
1.02.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	5.887.685.361
1100	Satuan Polisi Pamong Praja			18.474.206.782

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			18.474.206.782
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	14.170.214.375
1.19.16.0004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	1120 Orang	985.838.000
1.19.16.0014	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang I	16925 Obyek	3.488.926.765
1.19.16.0015	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang II	1600 Obyek	440.792.110
1.19.16.0016	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang III	36550 Obyek	1.856.357.500
1.19.16.0017	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota	115800 Orang	7.398.300.000
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			2.970.598.950
1.19.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	2.970.598.950
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			1.333.393.457
1.19.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	1.333.393.457
400	Sekretariat DPRD			67.749.002.514
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			67.749.002.514
1.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5	62.368.946.573
		Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti	6	
		% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	86%	
		Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	91%	
1.20.15.0001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD yang dibahas	6 Raperda	1.688.289.180
1.20.15.0002	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah Hearing atau Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh	154 kegiatan	3.162.759.358
1.20.15.0003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	907 kali	1.384.384.950
1.20.15.0004	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	60 Kali	1.544.393.200
1.20.15.0005	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses untuk 50 Anggota DPRD	3 Kali	8.890.347.900
1.20.15.0006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	50 kali	54.086.230
1.20.15.0007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	229 kali	41.321.515.390
1.20.15.0008	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	600 orang	100.265.800
1.20.15.0009	Pengkajian/ Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah yang Dikaji atau Ditelaah	10 Dokumen	965.966.575

Kode	Dinas - Urusan - Program - Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian
1.20.15.0010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Waktu Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	12 bulan	3.256.937.990
x.xx.01	Program Pelayanan Administrasi			3.737.121.246
1.20.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	3.737.121.246
x.xx.02	Program Peningkatan Sarana dan			1.642.934.695
1.20.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	1.642.934.695
TOTAL				3.941.299.552.780